

PERANAN SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT DI YOGYAKARTA SEBAGAI SUMBER SEJARAH MENEGAKKAN KEDAULATAN (1945 - 1949)

*Indonesia - history
revolution 1945-1949*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

ISTIARINI

NIM : 90214032

NIRM : 900052010604120027

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1996**

SKRIPSI

**PERANAN SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT DI YOGYAKARTA
SEBAGAI SUMBER SEJARAH MENEGAKKAN KEDAULATAN
(1945 - 1949)**

Oleh :

ISTIARINI

NIM : 90214032

NIRM : 900052010604120027

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal 15 - 2 - 1996

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto

Tanggal 15 - 2 - 1996

SKRIPSI
PERANAN SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT DI YOGYAKARTA
SEBAGAI SUMBER SEJARAH MENEGAKKAN KEDAULATAN
(1945 - 1949)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

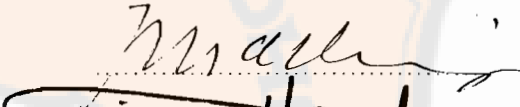
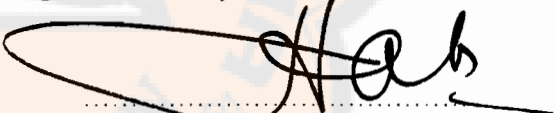
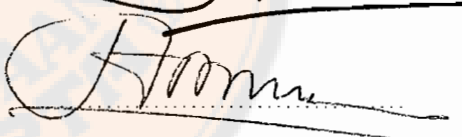
ISTIARINI

NIM : 90214032

NIRM : 900052010604120027

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 2 Maret 1996
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. J. Markiswo	
Sekretaris	: Drs. A.K. Wiharyanto	
Anggota	: Drs. G. Moedjanto, M.A.	
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto	
Anggota	: Drs. J.B.M. Mudjihardjo	

Yogyakarta ... 11 April 1996

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Dekan





(Dr. A. Priyono Marwan, S.J.)

MOTTO

- * Ketakutan sebelum berusaha adalah suatu hal yang tidak beralasan



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

* Bapak dan Ibu tersayang

Kakak-kakakku :

* Isti Supriyati + I Wayan Widana

* Ir. Ismanto

* Ismawan, Ssn. + Dra. Tri Supadmi

Keponakan-keponakanku :

* Ni Luh Gede Prapika Wida Prawesti

* I Kadek Respati Widya Kumara

* Bimma Listya Aji Nurwicaksono

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul "Peranan Surat Kabar **Kedaulatan Rakyat** Di Yogyakarta Dalam Menegakkan Kedaulatan (1945-1949)". Penulisan skripsi ini dapat terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. J. Markiswo, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
3. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak DR. H. Soemadi M Wonohito selaku Direktur Utama PT. BP. Kedaulatan Rakyat Group yang telah bersedia memberikan izin dan keterangan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
6. Romo Dick Hartoko yang telah bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

7. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan buku-buku yang penulis perlukan.
8. Seluruh staf Perpustakaan Nasional R.I., Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang penulis perlukan khususnya surat kabar Kedaulatan Rakyat terbitan tahun 1945-1949 sebagai sumber utama penulisan skripsi.
9. Teman-temanku, Sulistriani, Mawar Emiliana Nurhayati, Purwanti Budi Rahayu, Heri Triariningsih, Widati. Terakhir kepada bapak dan ibu yang telah memberikan bantuan sepenuhnya.

Segala yang tertuang dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan hati terbuka penulis menerima kritik dan sarannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya peminat sejarah.

Yogyakarta,

1996

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Pemilihan Sumber.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Garis Besar Isi Skripsi.....	12
BAB. II YOGYAKARTA DARI PROKLAMASI	
SAMPAI PENGAKUAN KEDAULATAN.....	19
A. Reaksi Terhadap Proklamasi.....	19
B. Tindak Lanjut Terhadap Proklamasi.....	24
1. Amanat Pernyataan Pemimpin Yogyakarta.....	25
2. Pengambilalihan Kekuasaan	
Dari Tangan Jepang.....	28
3. Pembentukan Pasukan Keamanan.....	34

4. Pembentukan KNI Daerah Yogyakarta.....	35
C. Yogyakarta Menghadapi Agresi	
Militer Belanda.....	38
1. Agresi Militer Belanda I.....	38
2. Agresi Militer Belanda II.....	39
3. Pengakuan Kedaulatan.....	41
BAB III KONDISI KEDAULATAN RAKYAT DARI TAHUN 1945	
SAMPAI TAHUN 1949	44
A. Sejarah Berdirinya Kedaulatan Rakyat....	43
B. Keorganisasian Kedaulatan Rakyat	
Dari Tahun 1945 Sampai Tahun 1949	46
1. Kepengurusan Awal	46
2. Dari Peristiwa Menjadi Berita	48
C. Hubungan Kedaulatan Rakyat, Pemerintah	
Dan Masyarakat	51
BAB IV PERANAN KEDAULATAN RAKYAT	
SEBAGAI SUMBER SEJARAH	
DITINJAU DARI ISI KEDAULATAN RAKYAT.....	54
A. Peran Kedaulatan Rakyat	
Hubungannya Dengan Fungsi Pers.....	54
1. Fungsi Perjuangan.....	54
2. Fungsi Pendidikan.....	58
B. Peran Kedaulatan Rakyat	
Hubungannya Dengan Perjuangan Diplomasi.	61
1. Gagalnya Perundingan.....	62
2. Menuju Penyerahan Kedaulatan.....	68

C. Peran Kedaulatan Rakyat	
Hubungannya Dengan Perjuangan Bersenjata.	75
1. Agresi Militer Belanda	
Pelanggaran Atas Persetujuan.....	76
2. Siasat Gerilya Republik	
Menghadapi Agresi Belanda.....	78
BAB V	
KESIMPULAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR INFORMAN.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Dari penulisan skripsi berjudul "Peranan Surat Kabar **Kedaulatan Rakyat** di Yogyakarta Sebagai Sumber Sejarah Masa Menegakkan Kedaulatan (1945-1949)", permasalahan-permasalahan yang muncul pertama, tentang situasi kota Yogyakarta dari proklamasi sampai pengakuan kedaulatan ; kedua, tentang kondisi **Kedaulatan Rakyat** dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Dan ketiga, tentang peranan surat kabar **Kedaulatan Rakyat** di Yogyakarta dalam menegakkan kedaulatan dilihat dari isi berita yang disuguhkan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang peran yang telah ditunjukkan oleh surat kabar daerah (KR) dalam menegakkan kedaulatan.

Berdasar pada sumber-sumber yang diperoleh berupa buku-buku, surat kabar (KR) tahun 1945-1949 dan informan, penulis membahas permasalahan dengan menggunakan metode historis. Dalam arti penulisan skripsi ini didasarkan pada sudut pandang sejarahnya. Dan dari hasil penelitian, penulis membahasnya dalam bab-bab, yang terdiri dari lima bab, sebagai laporan akhir (skripsi).

Dilatar belakangi oleh situasi revolusi, di Yogyakarta lahir surat kabar tertua terhitung sejak Indonesia merdeka. Lahir dengan nama **Kedaulatan Rakyat**, sejalan dengan aspirasi perjuangan rakyat. Sesuai dengan jiwa nasionalis, idealis pemimpinnya serta fungsinya **Kedaulatan Rakyat** menjadi surat kabar republikan yang tidak mau bekerjasama dengan penjajah. Dengan dwi fungsi peran wartawannya, **Kedaulatan Rakyat** telah melibatkan wartawan-wartawannya sebagai pejuang garis depan.

Dari berita-beritanya, sejak terbit pertama kali tahun 1945, **Kedaulatan Rakyat** telah memuat berita sekitar perjuangan rakyat. Dengan dukungan pemimpin-pemimpin kharismatik, seperti Sri Sultan HB IX dan Sri Pakualam VII, **Kedaulatan Rakyat** menjadi surat kabar nasionalis.

Berita-berita sekitar perjuangan, pengumuman dari Panglima Besar TNI, amanat-amanat dan lain-lain, selalu menjadi berita yang ditunggu-tunggu. Sehingga sebagai sumber informasi secara tidak langsung memberi pengaruh.

Sebagai sarana perjuangan, **Kedaulatan Rakyat** telah menempatkan diri secara utuh. Dengan menyediakan tiap kolomnya untuk kepentingan perjuangan. Sebagai sarana pendidikan, surat kabar ini mampu membangkitkan rasa cinta tanah air yang ditimbulkan dari beritanya. Slogan-slogan seperti "merdeka atau mati" dan lain sebagainya, tidak hanya membangkitkan semangat juang rakyat melawan penjajah tapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan untuk selanjutnya mempertahankan apa yang telah dimilikinya.

Adapun usaha yang dilakukan dengan melalui perundingan atau diplomasi dan peperangan. Peperangan yang terjadi antara tahun 1945-1949 dan dikenal dengan perang kemerdekaan I, II menjadi bukti perjuangan perlawanan rakyat. Dan persetujuan Linggajati yang diratifikasi tanggal 25 Maret

1947 dan persetujuan Renville yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1948, maupun KMB menjadi bukti perjuangan damai pihak Indonesia meskipun tidak pernah diuntungkan.

Disamping rasa cinta tanah air, sebagai bacaan, surat kabar **Kedaulatan Rakyat** telah memberikan wawasan lebih luas. Sebagai bekas jajahan Belanda, kurang lebih 3,5 abad menyadarkan rakyat untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia sehingga kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari berita-berita **Kedaulatan Rakyat**.

Oleh karena itu, surat kabar **Kedaulatan Rakyat** semasa revolusi merupakan surat kabar republik yang mendukung perjuangan bangsa sepenuhnya. Tidak terbatas pada berita yang dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat, para wartawan-wartawannya terjun langsung dalam kancah perjuangan.

Hal penting dari berita-berita **Kedaulatan Rakyat**, yaitu peran serta rakyat sendiri yang dengan gigih merebut kembali kedaulatan Republik Indonesia. Dan usaha tersebut terealisasi pada tanggal 27 Desember 1949 dengan ditandatanganinya pengakuan kedaulatan di Amsterdam dan di Indonesia. Dengan demikian kedaulatan Indonesia kembali pada bangsa Indonesia. Dan sejak itu juga kedudukan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan kedaulatan Indonesia mendapatkan pengakuan dari Belanda maupun bangsa lain.

Dapat dikatakan perjuangan rakyat Yogyakarta khususnya perjuangan rakyat semesta telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pekerjaan. **Kedaulatan Rakyat** sebagai surat kabar daerah menjadi surat kabar nasional yang ikut andil dalam perjuangan, penyambung komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga tepatlah jika dikatakan antara **Kedaulatan Rakyat** dengan perjalanan perjuangan bangsa antara tahun 1945-1949 tidak dapat dipisahkan, satu dengan yang lain saling mendukung.

Dengan kata lain surat kabar **Kedaulatan Rakyat** dalam perkembangannya berperan dari zaman ke zaman.

ABSTRACT

In the thesis entitled "**Peranan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta Sebagai Sumber Sejarah masa Mene-gakkan Kedaulatan (1945-1949)**", there were problem which rose. The first problem was about the circumstances that existed in Yogyakarta from the proclamation of Indonesian independence until the acknowledgement of Indonesian sovereignty. The second problem was about the condition of **Kedaulatan Rakyat** from 1945 to 1949. The third problem was about the role of the newspaper from the point of view of the news' content.

This research was aimed to verify roles that had been shown by a regional newspaper (KR) in upholding the sovereignty of Indonesia.

Based on the resources of this research, that were related literature, newspaper (KR) from 1945 to 1949, and some informants, the writer discussed the problems with historic method. It means that the thesis writing was based on history point of view. The results of the re-search were discussed in five chapters which were written as a final report (thesis).

Brought out within revolution settings in Yogyakarta, **Kedaulatan Rakyat** was considered as the oldest newspaper in the independent Indonesia. It represented people's desire for struggle. According to its function, nation-alism, and its leaders' idealism, **Kedaulatan Rakyat** became a newspaper of the republic which did not allied with the colonists. With the two-functions of its journalists, **Kedaulatan Rakyat** had involved them at frontline of the struggle.

Kedaulatan Rakyat had contained news about people's struggle since published for the first time in September 1945. Supported by some influential leaders such as Sri Sultan Hamengku Buwono IX and Sri Paku Alam VIII, **Kedaulatan Rakyat** became a nationalistic newspaper.

The war, the announcement of the TNI's Commander-in-Chief and other instructions, had always been the expected news. Therefore, through its information **Kedaulatan rakyat** was able to become an influential newspaper.

As a medium of the struggle, **Kedaulatan Rakyat** existed well by providing its columns for the sake of the war. As a media of education, it was also capable in encouraging the feeling of nationalism. Slogans like "liberty or death", etc., could either raise people's spirit to struggle, evoke the sense of possessing or main-taining whatever they had. All of these were conducted through some negotiation or diplomacy if possible, and even war if otherwise.

The war of independence that happened from 1945 to 1949 consisted of the first and second military aggression. They had become the evidence of the people struggle

to defed. The Treaty of Linggajati which was ratified in March 25, 1947. The Treaty of Renville which was signed in January 17, 1948. The KMB agreement had become the evidence of peaceful struggle of Indonesia although it had never been advantageous.

Besides evoking people's nationalism, **Kedaulatan Rakyat** had always given extensive horizon to the people. After being colonized by the Dutch, Indonesian people realized that they had to fight for the sovereignty of Indonesia and to take it back to the Indonesian government. In this case, the news of **Kedaulatan Rakyat** had given much contribution.

Therefore, in the revolution **Kedaulatan Rakyat** had been the Republic an time of, supporting the struggle of Indonesian people. Instead of reporting the news only, **Kedaulatan Rakyat's** to involved directly in the battlefield.

What was important in **Kedaulatan Rakyat's** news was the role of the Indonesian people who strongly won back the sovereignty of the Republic of Indonesia. It happened in Desember 27, 1949 by the signing of sovereignty acknowledgement in Amsterdam and in Indonesia. Indonesia had got the same status as other sovereign countries' and the sovereignty of Indonesia has been acknowledged by the Dutch and other countries ever since.

It cannot be denied that the struggle of the Yogyakartaese people in particular and the people of the whole regions in general involved all groups and occupations. **Kedaulatan Rakyat** as a regional newspaper had took part in the struggle, that communicated Indonesian government and its people. There was an inseparable relationship between **Kedaulatan Rakyat** and the course of Indonesian struggle from 1945 to 1949. They supported each other.

In other words, **Kedaulatan Rakyat** newspaper and its progress have always had important role from time to time.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta sebagai daerah istimewa mempunyai banyak predikat yang disandangnya. Salah satu predikatnya adalah kota perjuangan. Dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai tahun 1949 telah banyak peristiwa yang terjadi di Yogyakarta menyangkut keberadaan negara Indonesia. Secara historis mengingatkan dan menunjukkan adanya pengorbanan serta perjuangan rakyat Yogyakarta di bawah pimpinan seorang Sultan (Sri Sultan Hamengku Buwono IX).

Perlawanan rakyat Yogyakarta merupakan perjuangan rakyat semesta, yaitu gerakan ketahanan dan pertahanan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali¹⁾ Dalam arti setiap orang tanpa pandang pria atau wanita, tua atau muda, berkedudukan atau rakyat biasa, dari semua lapisan pekerjaan.

Salah satu dari sekian banyak yang ikut andil dalam perjuangan adalah pers. Pers pada perjuangan menegakkan kedaulatan mempunyai peran ganda, di satu sisi sebagai sarana perjuangan, di sisi lain sebagai pelaku perjuangan. Sehingga tidak disangsikan lagi bahwa antara pers dengan

1) Yogyakarta Benteng Proklamasi, Badan Musyawarah MUSEA Daerah Istimewa Yogyakarta, 1985, hlm. 1.

perjuangan rakyat periode 1945-1949 memiliki keterkaitan, berhubungan satu dengan yang lain.

Keberadaan pers di awal kemerdekaan tidak kalah penting dengan senapan dan bambu runcing. Perjuangan rakyat tidak hanya dengan kekerasan (bersenjata) tetapi juga dengan tulisan. Apalagi dalam tahun 1945-1949 hampir setiap kejadian menjadi hal penting yang selalu diikuti perkembangannya. Selain itu berita-berita yang dimuat seringkali menjadi senjata yang tajam bagi perjuangan.

Perlu diketahui, bahwa pers dalam penulisan inilah adalah media massa cetak terutama surat kabar yang memuat atau menyiarkan hasil jurnalistik. Secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi menyiarkan informasi

Fungsi ini menjadi fungsi yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal ; mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain. apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain dan sebagainya

2. Fungsi mendidik

Sebagai sarana pendidikan massa (mass education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi ini dapat secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau bergambar

juga mengandung aspek pendidikan

3. Fungsi menghibur

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel yang berbobot. Adapun bentuknya dapat berupa cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga bersifat yang mengandung minat insani (human interest) dan kadang-kadang tajuk rencana

4. Fungsi mempengaruhi

Fungsi ini memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari pers secara implisit terdapat pada berita, sedangkan secara eksplisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.²⁾

Atau secara garis besar pers mempunyai dua fungsi, yaitu :

a. Fungsi pendidikan

Yang dimaksud dengan fungsi pendidikan dari pers, adalah sebagai sarana yang memuat tulisan-tulisan berisi pengetahuan, sehingga pembaca bertambah pengetahuannya. Disamping berpengaruh juga bagi kemajuan pendidikan. Kemajuan pendidikan dalam arti semakin banyaknya anggota masyarakat yang dapat membaca.³⁾ Karena semakin banyak

2) Oneng Uchajana Effendi, Dinamika komunikasi, Bandung : Remadja Karya, t.th., hlm. 94-95.

3) A. Hamzah dkk., Delik-Delik Pers Di Indonesia, Jakarta : Media Sarana Press, 1987, hlm. 10.

masyarakat yang dapat membaca, maka kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat semakin bertambah dan keadaan itu sangat mendukung pada periode 1945-1949 dalam menegakkan kedaulatan.

b. Fungsi perjuangan

Yang dimaksud fungsi perjuangan dari pers adalah pers bertindak sebagai sarana untuk mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah.⁴⁾ Disamping mengobarkan semangat juang, pers dalam menegakkan kedaulatan memberikan informasi penting bagi masyarakat terutama bagi perkembangan perjuangan bangsa. Dengan topik-topik berita yang sering muncul pada halaman pertama adalah berita-berita yang ada kaitannya dengan perundingan-perundingan Belanda, keinginan-keinginan pemerintah serta hubungan internasional Indonesia yang digambarkan lebih tajam.⁵⁾

Dari fungsi-fungsi tersebut, fungsi pers masa perang kemerdekaan tampak nyata sekali, dimana sebagai sumber informasi bagi daerah sangat penting terutama tentang keadaan secara nasional maupun di daerah sendiri.⁶⁾

Sehingga secara langsung maupun tidak langsung berita yang disajikan mampu mempengaruhi pembacanya dalam bersi-

4) Bambang Sadono, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 45.

5) Yoga Benteng Proklamasi, op.cit., hlm. 220.

6) Wawancara penulis dengan Romo Dick Hartoko, tgl. 28 Juni 1995, di Kotabaru, Jln. Abu Bakar Ali no. 14 Yogyakarta.

kap dan bertindak terhadap ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Secara langsung maka pengaruh pers dapat diukur melalui nama baiknya serta status sosial yang dinikmati oleh suatu surat kabar.⁷⁾ Secara tidak langsung maka, pengaruh pers ditimbulkan oleh tokoh-tokoh pemimpin lokal maupun pusat. Melalui tokoh-tokoh pemimpin, pers mempengaruhi masyarakat luas, di mana sebelumnya pers mempengaruhi tokoh-tokoh pemimpin. Dapat dikatakan pers pada waktu itu digunakan untuk memberi informasi kepada rakyat mengenai apa yang pihak penguasa pikirkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang harus didukung oleh rakyat.⁸⁾

Seperti halnya surat kabar yang terbit pada masa revolusi, surat kabar di Yogyakarta tidak ketinggalan dalam perjuangan. Satu diantaranya adalah **Kedaulatan Rakyat** yang sejak awal berdirinya ikut berpartisipasi dengan menampilkan anjuran berjihad bernafaskan islam, sehingga mampu membakar semangat pembacanya. Dengan motto **Suara Hati Nurani Rakyat, Kedaulatan Rakyat** berusaha memenuhi keinginan pembacanya yang selalu menginginkan informasi baru sekitar keadaan Indonesia di seluruh bidang.

Perkembangan selanjutnya, **Kedaulatan Rakyat** ternyata

7) Phil. Astrid S. Susanto, Komunikasi Kontemporer, tt. : Binacipta, 1977, hlm. 67.

8) Onong Uchjana Effendi, op.cit., hlm. 91.

menjadi surat kabar yang mendapat tempat di hati pembacanya. Dalam perkembangannya dengan berita-berita regional maupun nasional **Kedaulatan Rakyat** sebagai surat kabar daerah mampu berkembang dan bertahan sampai sekarang.

Dilihat dari fungsinya maka pers pada masa perang kemerdekaan mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan. Karena dari pers dapat terjadi komunikasi antara pemimpin dengan rakyat. Meskipun posisinya di dalam masyarakat tergantung pada sifat pers, mempunyai kontak langsung atau tidak dengan surat kabar daerah.⁹⁾ Surat kabar yang mempunyai kontak langsung dengan masyarakat (pemikiran masyarakat) akan lebih banyak mendapat peluang untuk diterima oleh masyarakat, dan kedudukannya seperti halnya fungsi pers pada masanya. Sedangkan sebagai lembaga sosial, posisi pers dipengaruhi oleh adanya hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pers sendiri. Dalam hubungan pers, pemerintah dan masyarakat itulah posisi pers dapat dilihat jelas.¹⁰⁾

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang masalah dan banyaknya surat kabar yang terbit pada tahun-tahun setelah Indonesia

⁹⁾Wawancara penulis dengan Fomo Dick Hartoko, tgl. 28 Juni 1995, di kotabaru, jln. Abu Bakar Ali no. 64 Yogyakarta : lihat juga Bambang Sadono, op.cit., hlm. 49.

¹⁰⁾Bambang Sadono, op.cit., hlm. 26

merdeka, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi Yogyakarta dari Proklamasi sampai pengakuan kedaulatan ?

Dalam permasalahan ini termasuk di dalamnya tentang bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat Yogyakarta setelah mengetahui bahwa Indonesia merdeka dengan tersebarluasnya berita proklamasi, serta tindak lanjut terhadap berita tersebut dan tentang bagaimana Yogyakarta menghadapi Agresi Militer Belanda.

2. Bagaimana kondisi **Kedaulatan Rakyat** dari tahun 1945 sampai tahun 1949 ?

Permasalahan kedua ini termasuk di dalamnya tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari didirikannya atau diterbitkannya harian **Kedaulatan Rakyat**, serta sejarah berdirinya. Di samping itu menyangkut juga permasalahan tentang keorganisasian **Kedaulatan Rakyat** dari tahun 1945-1949 serta bagaimana hubungannya dengan pemerintah pada waktu itu.

3. Bagaimana peranan **Kedaulatan Rakyat** ditinjau dari isi **Kedaulatan Rakyat** dalam menegakkan kedaulatan ?

Dalam permasalahan ini menyangkut juga soal-soal sekitar peran **Kedaulatan Rakyat** hubungannya dengan perjuangan bersenjata, hubungannya dengan perjuangan diplomasi serta hubungannya dengan fungsi pers periode 1945-1949.

C. Ruang Lingkup

Dalam perjuangan menegakkan kedaulatan keikutsertaan pers (surat kabar) tidak terbatas pada tulisan tapi juga secara langsung orang-orang dibalik tulisan tersebut terjun dalam kancah perjuangan fisik. Keikutsertaan **Kedaulatan Rakyat** menegakkan kedaulatan Indonesia, dalam skripsi yang berjudul "Peranan Surat Kabar **Kedaulatan Rakyat** Di Yogyakarta Dalam Menegakkan Kedaulatan" dalam penulisannya akan dibatasi berdasar batasan waktu dan tempat.

1. Lingkup Spasial

Kedaulatan Rakyat dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1945-1949 bertempat di Yogyakarta dimana surat kabar itu lahir. Seperti halnya kota-kota lain, Yogyakarta masa perang kemerdekaan memegang peranan penting sebagai ibukota Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Yogyakarta memiliki surat kabar yang lahir dan berkembang dalam situasi revolusi. **Kedaulatan Rakyat** sebagai salah satu surat kabar yang terbit pada waktu itu, telah menjadi harian terkemuka di pusat pemerintahan ibukota Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, lebih pada penulisan sejarah lokal, sehingga mengacu pada tempat terbatas tanpa mempertanyakan batasan secara administratif atau kultural. Pengertian lokal itu sendiri tidak berbe-

lit-belit, hanyalah "tempat, ruang".¹¹⁾

Adapun penulisan sejarah lokal memberi arti yang besar bagi penulisan sejarah nasional, karena sejarah lokal pada dasarnya merupakan sumber kelengkapan bagi penulisan sejarah nasional. Dapat dikatakan bahwa sejarah lokal tidak dapat dipelajari tanpa dihubungkan dengan sejarah nasional.¹²⁾ Begitu juga halnya dengan Yogyakarta yang telah melahirkan harian **Kedaulatan Rakyat** sebagai sarana penting dalam perjuangan.

Dalam rangkaian penulisan ini akan diungkapkan tentang keikutsertaan atau peranan surat kabar **Kedaulatan Rakyat**, tujuan dan sejarah berdirinya, keorganisasiannya, dan hubungannya dengan pemerintah daerah Yogyakarta. Di samping situasi Yogyakarta, reaksi serta tindak lanjut masyarakat Yogyakarta terhadap proklamasi.

2. Lingkup Temporal

Tahun 1945-1949 merupakan periode penting dan menentukan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Suatu periode saat Yogyakarta mengemban tugas sebagai ibukota negara yang baru saja merdeka. Dan melahirkan banyak predikat bagi Yogyakarta, salah satunya sebagai kota perjuangan. Karena ikut sertanya semua lapisan masyarakat

11) Taufik Abdullah (ed.), Sejarah Lokal Di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 15.

12) Sartono Kartodirdjo, Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta : Gramedia, 1982, hlm. 35.

Yogyakarta dalam gerak revolusi.

Bulan September 1945, tepatnya tanggal 27 merupakan sejarah baru bagi perkembangan surat kabar di Yogyakarta. Harian **Kedaulatan Rakyat** lahir dalam kancah revolusi. Mengingat **Kedaulatan Rakyat** dilahirkan oleh revolusi serta dalam suasana perjuangan rakyat yang ingin bebas dari penindasan bangsa lain, bebas dari kebodohan, ingin sejajar dengan bangsa lain, **Kedaulatan Rakyat** berusaha ikut serta ambil bagian dalam revolusi itu.

Lingkup temporal atau batasan waktu dalam penulisan ini dimulai dengan tersebarluasnya berita proklamasi pada bulan Agustus 1945 sampai tahun 1949 saat pengakuan kedaulatan. Dalam periode 1945-1949 itu juga, **Kedaulatan Rakyat** menunjukkan perannya sejalan dengan revolusi bangsa.

D. Pemilihan Sumber

Berdasar sumber-sumber yang didapat, dapat digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh langsung dari data-data pertama atau sering dikatakan sebagai sumber asli. Sumber data ini diperoleh dengan cara wawancara dengan orang-orang yang dipandang mampu memberi data berkaitan dengan topik penulisan. Untuk itu metode wawancara merupakan cara tepat untuk memperoleh bahan-bahan dari sumber manusia sehubungan dengan obyek penulisan. Metode wawancara atau metode interviuw, mencakup cara yang dipergunakan jika seseorang,

untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.¹³⁾ Sumber lain diperoleh dari data-data asli surat kabar serta buku-buku yang langsung memberikan data-data berkaitan dengan penulisan.

Untuk sumber sekunder, data diperoleh dari sumber-sumber yang merupakan penggunaan sumber lain. Jadi sudah merupakan sumber kedua. Buku-buku yang digunakan terutama tentang pers, tentang **Kedaulatan Rakyat**, tentang sejarah Yogyakarta, dan dokumen terutama surat kabar serta gambar yang berkaitan.

Disebut sumber primer atau sumber sekunder ditinjau dari kebutuhan penyelidikan, sehingga buku yang sama dapat dikatakan sebagai sumber primer maupun sumber sekunder. Untuk menentukan keaslian data dan meneliti kebenaran isi data sehingga dapat dipercaya (valid) digunakan cara yang disebut sebagai kritik intern (keaslian) dan kritik intern (kebenaran isi).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :
pertama, memperoleh gambaran keadaan daerah Yogyakarta sejak dari diterimanya berita proklamasi pada tanggal 17

¹³⁾ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : P.T. Gramedia, 1977, hlm. 162.

Agustus 1945 sampai diakuinya kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. *Kedua*, agar dapat menjelaskan perjuangan atau keikutsertaan pers dalam hal ini surat kabar di Yogyakarta, yaitu **Harian Kedaulatan Rakyat**. *Ketiga*, dapat menunjukkan bahwa perjuangan tidak terbatas dilakukan dengan fisik saja tetapi dapat dilakukan juga dengan menggunakan tulisan (melalui surat kabar).

F. Manfaat Penelitian

Adapun dari penulisan skripsi dengan judul "Peranan Surat Kabar **Kedaulatan Rakyat** Di Yogyakarta Sebagai Sumber Sejarah Masa Menegakkan Kedaulatan 1945-1949", akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

Pertama, penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tanda perjuangan surat kabar **Kedaulatan Rakyat** khususnya dan pers daerah pada umumnya, sehingga dapat membuka wawasan tentang pers sebagai pelaku perjuangan. *Kedua*, dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi generasi-generasi selanjutnya sehingga tidak lupa pada sejarah perjuangan bangsanya.

G. Garis Besar Isi Skripsi

Secara garis besar penulisan skripsi dengan judul "Peranan Surat Kabar **Kedaulatan Rakyat** Di Yogyakarta Sebagai Sumber Penulisan Sejarah Masa Menegakkan Kedaulatan

1945-1949", akan dibahas dalam beberapa bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian penulisan dan untuk selanjutnya pada Bab II akan diuraikan tentang situasi Yogyakarta dari Proklamasi sampai pengakuan kedaulatan (27 Desember 1949). Meliputi reaksi rakyat Yogyakarta serta tindak lanjut terhadap berita proklamasi. Dengan tersebarluasnya berita proklamasi keseluruh tanah air melalui surat kabar setempat maka usaha Jepang dalam hal ini Gunseikanbu mengalami kegagalan. Luapan kegembiraan tidak terbendung lagi. Pemimpin pusat maupun daerah segera mengambil tindakan untuk mencegah tindakan-tindakan liar karena perubahan yang terjadi.

Keluarnya Amanat 5 September 1945 telah meyakinkan rakyat akan kebenaran berita proklamasi. Sekaligus telah menunjukkan sikap tegas pemimpin Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, dalam menghadapi proklamasi kemerdekaan. Sebagai tindak lanjut, pengibaran bendera Merah Putih semakin diramaikan, pekik "merdeka" terdengar dimana-mana.

Bukan tanpa sadar jika tindakan-tindakan spontan terjadi. Dikeluarnya maklumat 5 September 1945, rakyat seperti mendapat komando untuk bergerak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Insiden Bendera di Cokan Kantai pada tanggal 21 September 1945 menjadi puncak tindakan rakyat yang melibatkan tokoh pendiri surat kabar **Kedaulatan Rakyat**, Samawi.

Adanya instruksi dari pusat tentang pembentukan KNI-KNI Daerah, maka satu minggu setelah proklamasi, kira-kira pada akhir Agustus 1945 dibentuklah KNID Yogyakarta.¹⁴⁾ Maka pada tanggal 18 Mei 1946 dikeluarkanlah oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam bersama dengan Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta, Maklumat no. 18 tahun 1946 yang mengatur tentang pembentukan DPR-DPR Daerah seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵⁾

Kedatangan kesatuan Belanda bersama NICA-nya telah merusak kegembiraan. Dipimpin oleh Ch. O. van der Plas yang juga menjadi wakil mutlak dari van Mook.¹⁶⁾ Bertujuan mendapatkan kekuasaannya kembali seperti sebelum PD II atau dengan kata lain akan menjajah kembali tanah air.

Kejadian dan situasi yang semakin genting, menyebabkan ibukota pemerintah Republik Indonesia untuk sementara dipindahkan ke Yogyakarta karena dianggap lebih aman. Diratifikasinya persetujuan Linggajati tidak meredakan pertentangan. Penyerangan yang dilancarkan Belanda dari

14) Tashedi dkk, Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Di DiY. Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1986-1987, hlm. 157.

15) Soedarisman Foerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984, hlm. 35.

16) C.S.T Kansil dan Julianto, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta : Erlangga, 1993, hlm. 42.

semua medan baik darat, laut dan udara telah menjadi bukti nyata kelicikan pihak Belanda. Dibeberapa tempat terjadi baku tembak dengan tentara yang sebagian besar adalah serdadu-serdadu Belanda sendiri.¹⁷⁾ Atas inisiatif dari pemerintah India dan Australia, masalah Indonesia resmi menjadi pembicaraan dalam Dewan Keamanan. Untuk mengawasi gencatan senjata dibentuk KTN (Komisi Tiga Negara).

Gagalnya perundingan Renville, seperti perundingan sebelumnya tidak membawa hasil, sehingga segala macam perundingan adalah sekedar mengulur waktu saja.

Agresi Militer Belanda II. Pada tanggal 18 Desember 1948 Yogyakarta diserang. Tindakan-tindakan penyelamatan segera diambil oleh para pemimpin setelah bersidang. Dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disebarakan oleh wartawan melalui radio dan surat kabar, semangat rakyat semakin bergelora. Usaha menghalangi kembalinya Belanda ke Indonesia berhasil, sementara Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia. Keganasan tentara kerajaan Belanda mulai berkurang, ketika perkembangan politik Internasional ada tandatandanya condong kearah R.I terutama sesudah ada rencana bakal dilangsungkannya Konperensi Meja Bundar.¹⁸⁾

Dalam Bab III. akan diuraikan tentang sejarah berdiri-

17) Purnawan Tjondronegoro, Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku. Jakarta : C.V. Nugraha, 1980, hlm. 35.

18) Darmosugito, Kota Yogyakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756-4 Oktober 1956. Yogyakarta : Jawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1955. hlm.

nya **Kedaulatan Rakyat**. **Kedaulatan Rakyat** merupakan nama surat kabar yang diambil dari semboyan perjuangan rakyat.¹⁹⁾ Resmi terbit pada tanggal 27 September 1945. Perintis pendirinya adalah H. Samawi (1913-1984) dan M. Wonohito (1912-1984).²⁰⁾ Dalam sejarahnya, **Kedaulatan Rakyat** merupakan penjelmaan dari surat kabar **Sinar Matahari** milik pemerintah Jepang yang berhasil diambil alih oleh para pemuda. Selanjutnya digunakan untuk menyebarkan berita-berita, pidato-pidato, amanat pemimpin, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan tindakan rakyat dalam menghadapi ancaman dan tantangan terhadap negara.

Dalam keorganisasian, **Kedaulatan Rakyat** mengalami beberapa kali pergantian formasi kepengurusan. Di mana pengurus-pengurusnya juga merupakan pejuang pada masanya. Sementara itu dilihat dari perkembangannya, dapat dikatakan cukup pesat. Sebagai surat kabar daerah terbukti mendapat dukungan dan mempunyai hubungan dengan pemerintah cukup baik. Dibuktikan dengan pemberian nama surat kabar yang dimusyawarahkan dan dilakukan oleh bagian penerangan sendiri.

Dalam Bab IV, penulis mencoba untuk mengkaji peranan

19) W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1970, hlm. 1031.

20) Kurniawan Junaidhie, Ensiklopedi Pers Indonesia. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 127.

surat kabar **Kedaulatan Rakyat** dilihat dari isi berita kaitannya dengan fungsi surat kabar sebagai sumber sejarah perjuangan. Dalam perkembangannya **Kedaulatan Rakyat** sebagai surat kabar perjuangan banyak memuat berita-berita lokal (regional).²¹⁾ Dari sini diharapkan dapat diperoleh bukti keikutsertaan atau peran surat kabar **Kedaulatan Rakyat** dalam menegakkan kedaulatan.

Dalam **Kedaulatan Rakyat** tanggal 7 Juni 1946 dimuat berita yang pada dasarnya mengajak atau menganjurkan agar rakyat tetap bersatu untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin berkuasa kembali. Dikatakan dalam surat kabar tersebut sebagai berikut :

SEDJAK kemerdekaan diproklamirkan semendjak itoe kita tetap mendjadi rakjat jang berdaulat kesatoean Negara Repoeblik Indonesia jang wadjib kita pertahankan dari serangan pendjadjah Apa jang dimaksoedkan tentoe tidak lebih dari maksoed kita akan didjadikan djadjahan Belanda.²²⁾

Dari judul berita tersebut telah dapat diketahui apa pengaruhnya bagi pembaca. Tulisan-tulisan serupa sangat banyak dimuat oleh "**Kedaulatan Rakyat**" dalam periode 1945-1949. Seperti tertulis juga dalam surat kabar tanggal 30 Mei 1946, "WASPADALAH BERKENAAN DENGAN TIPOE MOESLIHAT MEMETJAH BELAH", yang memberi peringatan atas bahaya memecah belah Belanda untuk melemahkan kekuatan mencerai

21) Kritis Mengupas Surat Kabar. Djakarta : Sekretariat Nasional K.M., C.L.C. 1970. hlm. 77.

22) Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Juni 1946.

beraikan persatuan. Selanjutnya dalam tanggal yang sama dimuat berita dengan judul "SAJA TIDAK KOEATIR GERTAKAN BELANDA", tanggal 16 September 1946 tertulis "Semangat perdjoeangan haroes tetap menjala seperti permoelaan petjah revoloesi".

Dalam berita tanggal 2 Nopember 1946 ditulis berita "AKOEILAH SEGERA REPOEBLIK INDONESIA", tanggal 29 Mei 1946 ditulis berita dengan judul "KEDALAM MAOEPOEN KELOEAR KITA TETAP SATOE", dan masih banyak berita lain yang pada dasarnya tanpa disengaja telah menimbulkan reaksi rakyat terhadap situasi yang sedang dihadapi. Berita-berita tersebut kiranya cukup jelas bahwa surat kabar dengan gagasan-gagasan dan perkembangannya yang sedemikian jauh akhirnya berpengaruh, lebih-lebih surat kabar membawakan segala sesuatu yang terjadi di dunia setiap hari.²³⁾

²³⁾Robert Peerboom, Surat Kabar, Bandung : Alumni, 1970, hlm. 75.

EAB II

YOGYAKARTA DARI PROKLAMASI
SAMPAI PENGAKUAN KEDAULATAN

A. Reaksi Terhadap Proklamasi

Penyerahan Belanda tanpa syarat oleh Letnan Jendral H. ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentera ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jendral Hithosi Imamura terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati (Jawa Barat).²⁴⁾ Peristiwa tersebut menunjukkan berakhirnya kekuasaan Belanda, sekaligus menandai dimulainya penjajahan Jepang atas Indonesia.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang menduduki Yogyakarta. Dengan motto 3-nya Jepang mulai menanamkan pengaruhnya yang diterima dengan senang hati dan rasa bangga. Perubahan-perubahan segera dilakukan oleh pemerintah pendudukan yang baru. Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai raja Yogyakarta tetap memegang tampuk pimpinan. Dengan daerah kekuasaan meliputi Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, seperti pada jaman pendudukan Belanda. Digunakannya sistim indoktrinasi, ajaran kejiwaan dan semangat Bushido, Bala-

²⁴⁾ Marwati Djened Foesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka, 1992, hlm. 5 ; lihat juga Ahmaddani & Martha, Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, Jakarta : Kurnia Esa, 1985, hlm. 162.

tentara Jepang mampu merombak cara berpikir dan sikap mental rakyat yang lamban menjadi dinamis semangat.²⁵⁾

Rakyat dan kaum pergerakan tambah yakin kepada pihak Jepang yang datang dengan mengaku sebagai "Saudara Tua".²⁶⁾ Kebijakan-kebijaksanaan yang diterapkan untuk mendapatkan keuntungan ternyata juga memberi keuntungan bagi rakyat. Dengan sikap agak lunak dan cara membiarkan bendera Merah Putih dikibarkan, Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan, secara langsung menanamkan rasa kebangsaan meskipun kesengsaraan yang ditimbulkan oleh penjajahan Jepang lebih tinggi.

Tidak lebih baik dari penjajahan Belanda, sikap lunak yang diperlihatkan Jepang tidak berlangsung lama, sedangkan sikap asli terhadap Indonesia terlihat. Tenaga rakyat dikuras untuk mendapatkan bahan makanan diikuti dengan pemerintahan militer, akibatnya rasa tidak suka rakyat semakin terpupuk.

Pada pertengahan tahun 1942 pasukan Jepang tertahan di Midway dan Guadalcanal oleh pasukan A.S. Memasuki tahun 1943, A.S. mengambil giliran menyerang.²⁷⁾ Dalam keadaan terdesak, Perdana Menteri Koiso, Jepang memberi janji

25)Yogya Benteng Proklamasi. op.cit., hlm. 18.

26)Ibid ; lihat Marwati Djoened Poesponegoro, op.cit., hlm. 27.

27)R. Hardjono, S.J., Pedoman Binkas Sejarah Jepang. Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma, t.th. hlm. 23.

kemerdekaan pada hari kemudian kepada Indonesia, dengan harapan kepercayaan pada Jepang dapat dipertahankan.

Dalam keadaan terjepit pemerintah Jepang masih sempat mengelabui rakyat Indonesia, sehingga rakyat mengira bahwa Jepang masih utuh dan kuat. Kenyataannya pulau-pulau Jepang sendiri sudah dikuasai dan dijatuhibom atom oleh pesawat terbang Amerika. Dua bom atom mengharuskan Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu setelah dijatuhkan di dua kota di Jepang, di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945).

Jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki telah mempercepat penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu yang resmi diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani syarat-syarat penyerahan di atas geladak kapal "Missouri", di Teluk Tokyo.²⁸⁾ Di bawah pengawasan Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu Jendral MacArthur.

Kekalahan Jepang dan keterlambatan pemerintah peralihan tiba di Indonesia, menjadi kesempatan yang tidak disia-siakan oleh rakyat Indonesia untuk menyatakan dengan segera kemerdekaannya. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 kurang lebih satu minggu dari tanggal yang dijanjikan Jepang, Proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

28) *Ibid.*, hlm. 24.

Berita Proklamasi segera dapat disebarluaskan. meskipun secara sembunyi-sembunyi dan dari mulut ke mulut. Berita tersebut diterima juga di Yogyakarta melalui Kantor Berita Domei cabang Yogyakarta. Pada waktu itu menempati bagian atas Perpustakaan Negara di jln. Malioboro yang sekarang. Adapun bunyi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut adalah :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 17 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno / Hatta.²⁹⁾

Luapan kegembiraan terlihat dimana-mana, pada hari itu juga tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Yogyakarta mengungkapkan kegembiraannya. Dengan mengendarai sepeda, tokoh Taman Siswa yang juga tokoh pergerakan, Ki Hajar Dewantoro, memimpin arak-arakan. Tetapi suasana kegembiraan belum dapat menutupi keragu-raguan rakyat, karena kenyataan menunjukkan Jepang masih menguasai pusat perkotaan, kantor pemerintahan, perusahaan-perusahaan bahkan bendera Hino Maru masih berkibar.

²⁹⁾Harwati Djoened Foesponegoro dan Nugroho Notokusanto, op.cit., hlm. 91.

Secara umum rakyat Yogyakarta, seperti halnya di kota-kota lain, menyambut berita proklamasi dengan gembira. Usaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah telah terwujud, meskipun belum berarti lepas dari bahaya lain yang mengancam keberadaan negara Indonesia yang baru saja merdeka.

Rakyat mulai bergerak, dengan panji Merah Putih dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan mengungkapkan rasa gembira, pernyataan bebas merdeka. Menunjukkan kemerdekaan yang diproklamirkan di Jakarta dan disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air diterima seutuhnya oleh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Setelah bertahun-tahun berada dalam cengkeraman, tindasan dan siksaan penjajah yang tak kenal belas kasihan.

Suasana semakin semarak dengan berkibarnya bendera Merah Putih di rumah-rumah penduduk yang dilengkapi dengan hiburan (keramaian). Dimana-mana rakyat segera menanggapi apa arti dan maksud kemerdekaan itu, tanpa meninggalkan keziapsiagaannya, karena Indonesia belum kokoh sepenuhnya. Pada umumnya gerakan rakyat pertama-tama bertujuan hendak mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.³⁰⁾

30) Tashedi dkk, op.cit., hlm. 75.

Rakyat Yogyakarta tidak beda dengan di kota-kota lainnya, bersiap memasuki alam baru alam kemerdekaan. Penyesuaian diri terhadap alam yang baru harus segera dilakukan. Untuk mencegah tindakan-tindakan liar (tak terarah) para pemimpin baik pusat maupun daerah mendampingi gerakan rakyat dalam menindaklanjuti kemerdekaan.

B. Tindak Lanjut Terhadap Proklamasi

Berita Proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah membawa bangsa Indonesia pada alam baru yang sangat berbeda segala sesuatunya. Situasi di mana rakyat Indonesia harus segera berdiri sendiri setelah berabad-abad lamanya di bawah pengaruh bangsa lain. Dan hal itu tidaklah mudah. Atas kesigapan pemimpin di Yogyakarta dalam mengantisipasi situasi, perubahan-perubahan yang terjadi tidak terlalu mengejutkan rakyat dan penyesuaian diri pada kondisi yang baru dapat dilakukan. Hal ini tidak lepas dari usaha Sultan dalam mempersiapkan rakyat untuk menyambut kemerdekaan.

Adapun usaha persiapan yang dilakukan diantaranya dengan menyebarluaskan Pernyataan Koiso lewat radio dan surat kabar. Dimuatnya berita-berita yang memuat tanggapan dan masukan tentang Indonesia merdeka dari tokoh-tokoh nasional maupun dari Yogyakarta, dengan demikian rakyat lebih mudah memahami arti kemerdekaan. Perubahan dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka segera ditindak-

lanjuti.

Tindak lanjut yang dilakukan rakyat terhadap proklamsi kemerdekaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Amanat Pernyataan Pemimpin Yogyakarta

Dikumandangkannya pernyataan kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur no.56, telah mengejutkan sekaligus membingungkan rakyat. Bukan saja karena tiba-tiba, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pihak Jepang masih tampak berkuasa. Bendera Hino Maru masih berkibar, kantor-kantor pemerintah masih diduduki orang-orang Jepang, tentara Jepang masih ada dalam kota dengan senjata lengkap.³¹⁾ Sehingga tidak mengherankan jika rakyat belum menyadari sepenuhnya dengan apa yang terjadi.

Situasi tidak pasti (ragu-ragu) tidak berlangsung lama. Segera setelah yakin terhadap perkembangan dan atas desakan rakyat, Sri Sultan IX dan Sri Paku Alam VIII dengan tegas menyatakan dukungannya pada Republik Indonesia. Maka rakyat sudah tidak perlu ragu-ragu lagi, bahwa baik Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Paku Alaman secara positif memihak pada Republik Indonesia, artinya tidak mengharap-harap lagi datangnya kembali penjajah

31) Soedarisman Poerwokoesoemo, op.cit., hlm.16.



Belanda.³²⁾

Pernyataan dukungan tertanggal 5 September 1945 yang dikeluarkan atas dasar pasal 18 UUD 1945, pada dasarnya merupakan pernyataan kesanggupan Yogyakarta sebagai daerah istimewa menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

"Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan :

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia,
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya,
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.³³⁾

Suatu pernyataan yang tegas dan berani dalam situasi yang membuahkan pemikiran untuk bertindak telah diambil. Pernyataan yang sama disampaikan juga oleh Sri Paduka Paku Alam VIII atas Negeri Paku Alaman.

Ketegasan sikap pemimpin Yogyakarta menindaklanjuti proklamasi ternyata juga merupakan suatu tindakan penyelamatan atas keutuhan persatuan dan tegaknya negara Republik

32)Yogya Benteng Proklamasi, op.cit., hlm. 49 ; lihat P.J. Suwarno, op.cit., hlm. 170 ; lihat G. Moedjanto, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta : Kanisius, 1974, hlm. 68-69.

33)Yogya Benteng Proklamasi, loc.cit

Indonesia. Karena dengan keluarnya Amanat 5 September 1945 mempunyai arti baik Kasultanan maupun Paku Alaman tidak dapat diperbudak (diperalat) dengan Republik Indonesia. Terutama tampak pada pernyataan sebagai daerah istimewa dari Republik Indonesia.

Secara psikologis maka pernyataan kedua tokoh pemimpin telah mendekatkan rakyat dengan pemimpin yang dipercaya secara langsung tanpa penghubung seperti halnya pada masa masih terdapat "pepatih dalem". Perhubungan itu telah menumbuhkan semangat revolusi, semangat berkorban untuk tegaknya Republik Indonesia. Secara tidak langsung merupakan tindakan pertahanan atas keberadaan Negeri Ngayogyakarta sebagai daerah istimewa.

Amanat 5 September 1945 disebut juga "proklamasi kemerdekaan" Yogyakarta dari penjajahan Jepang,³⁴⁾ diikuti oleh keluarnya Amanat bersama. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, tertanggal 30 Oktober 1945. Dalam Amanat kedua tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan penguat yang menunjukkan adanya persatuan sebagai pribadi maupun satu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak itu segala macam maklumat yang dikeluarkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta selalu ditandatangani oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam.³⁵⁾

34) P.J. Suwardo, *op.cit.*, hlm. 171.

35) *Ibid.*

Jika diperhatikan maka tampak jelas ada suatu usaha demokratisasi dalam pemerintahan. Karena dalam amanat itu secara jelas dinyatakan bahwa dalam menentukan arah jalan pemerintahan dan pembentukan undang-undang di Yogyakarta akan disesuaikan dengan keinginan atau kehendak rakyat. Dimana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam hal ini Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam pelaksanaannya bersedia bekerjasama dengan Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai badan legislatif (pembuat undang-undang).

Hal tersebut ditegaskan dalam Amanat tertanggal 30 Oktober 1945, di mana Sri Sultan dan Sri Paku Alam semufakat dengan BPKNID menyatakan :

"Supaja djalannja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerdja tersebut adalah suatu Badan Legislatief (Badan Pembikin Undang-Undang) jang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam Daerah Kami berdua jang sesuai dengan kehendak rakjat".³⁶⁾

Jelaslah bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah memberi arti penting bagi rakyat Yogyakarta yang dengan segera bertindak melanjutkan proklamasi sebagai awal revolusi dalam Negara Republik Indonesia.

2. Pengambilalihan Kekuasaan Dari Tangan Jepang

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 17

³⁶⁾Ibid., hlm. 187.

Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yang dikumandangkan keseluruh dunia dari rumah jln. Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Sejak saat itu revolusi Indonesia dimulai. Teks proklamasi diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Bahktiar Lubis dan Suprpto.³⁷⁾ Dengan demikian maka negara-negara lainpun mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka.³⁸⁾

Sambutan spontan atas Proklamasi terjadi di mana-mana di seluruh pelosok tanah air termasuk di Yogyakarta. Sebagai reaksi yang merupakan tindak lanjut dari rakyat Yogyakarta adalah pernyataan dukungan (Amanat) dari dua tokoh pemimpin Yogyakarta atas dasar kehendak rakyat ditujukan kepada Sukarno-Hatta.

Keluarnya Amanat 5 September 1945 seolah-olah memberi komando pada rakyat untuk bergerak melawan Jepang yang masih belum mau menerima kekalahanannya. Revolusi fisik dimulai setelah secara politis berhasil diproklamasikan. Dapat dikatakan bahwa Amanat 5 September 1945 itu merupakan gerakan terbuka pertama kali terhadap Pemerintah Tentara Jepang di Yogyakarta, yang sekaligus merupakan isyarat atau bahkan komando bagi rakyat Yogyakarta untuk bergerak.³⁹⁾

37)Yogya Benteng Proklamasi, op.cit., hlm. 45.

38)Ibid.

39)P.J. Suwarno, op.cit., hlm. 171.

Kenyataan bahwa Jepang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia telah menimbulkan ketegangan-ketegangan. Ketegangan semakin memuncak melihat Jepang masih menguasai pabrik-pabrik, kantor-kantor pemerintah maupun perusahaan-perusahaan. Apalagi prajurit Jepang yang masih bersenjata lengkap tidak mau menyerahkan senjata dan perlengkapannya kepada pihak Indonesia. Reaksi pihak Jepang yang menunjukkan masih ingin bertahan bahkan masih ingin memerintah seakan-akan masih berkuasa, mendorong rakyat mengambil tindakan kekerasan.

Pada tanggal 21 September 1945 telah terjadi gerakan penurunan bendera Hino Maru di Cokan Kantai (Gedung Agung) dan pengibaran bendera Merah Putih sebagai gantinya. Peristiwa tanpa rencana ini dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat yang diperkuat oleh satu kompi pasukan Polisi Istimewa Yogyakarta bersenjata lengkap. Polisi Istimewa (P.I.) atau Tokubetsu Keisatsu Tai adalah suatu kesatuan yang diorganisir, dipersenjatai dan dilatih seperti militer dan merupakan pasukan pemukul dari kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁰⁾

Meskipun sebelumnya ada delegasi Indonesia yang telah membicarakan tentang pengibaran bendera Merah Putih di Gedung Agung dengan pemimpin Jepang yang berkuasa, ternyata tidak menepati persetujuan. Bahkan Merah Putih diturun-

40. *Yogya Benteng Proklamasi*, op.cit., hlm. 127.

kan diganti dengan Hino Maru. Suatu tindakan yang menyulut kemarahan rakyat dan peristiwa tanggal 21 September terjadi. Dalam peristiwa ini telah melibatkan salah seorang perintis (pendiri) surat kabar **Kedaulatan Rakyat**, Samawi. Dikatakan bahwa :

"Memang pada mulanya Sang Merah Putih sudah berhasil dikibarkan di Gedung Negara atau Gedung Agung. Tapi kemudian diturunkan lagi oleh Jepang diganti Hino Maru. Pemuda-pemuda menyerbu ke Gedung Negara. Pak Samawi dan Sumantoro ikut serta dan datang dari jembatan Sayidan".⁴¹⁾

Kemenangan yang telah mengobarkan semangat rakyat untuk terus melawan serdadu-serdadu Jepang yang masih bercokol di bumi Indonesia.

Akibat kejadian di depan bioskop Ratih, yang hampir menimbulkan pertempuran antara P.I. dengan Hei Tai dari markas Jepang di Pingit, maka semua senjata P.I. Yogyakarta dilucuti. Perlucutan senjata Polisi Istimewa di Yogyakarta didahului oleh ancaman Maklumat Seiko Sikikan tentang larangan memiliki senjata bagi rakyat.⁴²⁾ Suatu ancaman yang tidak menyurutkan perlawanan para pejuang, dengan dibantu para pemuda dan masyarakat sekitarnya, pada tanggal 22 September 1945 P.I. Yogyakarta dapat mempertahankannya. Sebagai puncak dari pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang di Yogyakarta adalah penyerbuan ke tangsi tentara Jepang di Kotabaru.

41) Tesnadi dkk, Sejarah, hlm. 61.

42) P.I. Gumarasa, Sejarah, hlm. 177.

Gerakan besar-besaran terjadi pada tanggal 26 September 1945 dimulai dari kantor pusat Pemerintahan Tentara Jepang (Kooti Zimu Kyoku) di Kotabaru Yogyakarta. Dipimpin oleh Komisaris Polisi R.P. Sudarsono dan melibatkan polisi, bagian keamanan, pegawai-pegawai Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan di kantor-kantor yang dipimpin oleh orang Jepang, pemuda, dan rakyat disekitar tempat kejadian.⁴³⁾ Karena usaha damai tidak berhasil, cara kekerasan diambil. Adapun pabrik dan perusahaan yang telah dapat diambilalih Republik dan yang dilaporkan kepada Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah sebagai berikut : pusat Nanyo Kahatsu Yogyakarta dan cabang-cabangnya, Jawatan Kehutanan, Daiken Sangyo, Pabrik Gula Tanjungtirta, Padokan Beran, Cebongan Gondang Lipura, Plered, Gesikan Rewulu, Medari, Pundong, Sewugalur, dan pabrik Salakan.⁴⁴⁾ Dan pada tanggal 27 September 1945 seluruh kekuasaan Pemerintahan telah berhasil diambil alih Pemerintah Republik Indonesia.

Satu hal penting adalah terbitnya harian baru dengan nama **Kedaulatan Rakyat**, pada tanggal 27 September 1945. harian yang diterbitkan oleh perusahaan harian **Sinar Matahari** milik Jepang yang berhasil diambil alih. Dengan

⁴³⁾ Ibid.

⁴⁴⁾ Kedaulatan Rakyat, 1945, 27 Agustus 1995 & Pinat P.O. Suwono, Op.cit., hlm. 173; Furnawan Tjandronegoro, Op.cit., hlm. 22.

terbitnya harian **Kedaulatan Rakyat**, maka penyampaian kabar berita, pengumuman ke tangan rakyat akan lebih mudah dilakukan.⁴⁵⁾

Gerakan puncak pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945. Penyerbuan ke Tangsi Kido Butai di Kotabaru didahului oleh perundingan antara utusan Indonesia yang terdiri dari Moh. Saleh, R.P. Sudarsono, Bardosono, dan Sunjoto semuanya dari EKR dengan pimpinan tentara di Kido Butai yang terdiri dari Butaico (Dan Ton) Mayor Otsuko, Kem Pei Taico (Komandan Kem Pei Tai) Sasaki, Kapten Ito dan Cianbuco bertempat di rumah Butaico Kotabaru Yogyakarta.⁴⁶⁾ Perundingan berakhir dengan jalan buntu, akibatnya pertempuran tidak dapat dihindari lagi, dan pada tanggal 27 Oktober 1945 pihak Jepang menyerah. Keberhasilan penyerbuan ke tangsi Jepang dan perampasan senjata-senjata Jepang di Kotabaru, memberi keuntungan TKR Yogyakarta yang semula mempunyai senjata terbatas menjadi kuat persenjataannya sehingga memberi kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi musuh-musuh dari negara selanjutnya.⁴⁷⁾

45)Furnawan Tjondronegoro, loc.cit.

46)Yogya Berbangsa Proklamasi, loc.cit.

47)Ibid., nlm. 56. Dalam **Kedaulatan Rakyat** tanggal 5 Oktober 1947 dua hari sebelum peringatan 2 tahun pertempuran Kotabaru digambarkan bagaimana kemenangan itu, seperti tertulis sebagai berikut, "Dengar, dengar, Adu itu? Sorak-rasa, gegar gempita! Sang Merah Putih berkibar naik, berkibar dengan riangnya di atas gedung Markas. Menang !!!

3. Pembentukan Pasukan Keamanan

Sejalan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, untuk menampung semangat rakyat yang ingin ikut serta membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia dibentuklah pasukan-pasukan keamanan.

Berdasar hasil sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang ditetapkan sebagai bagian dari BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). BPKKP ini merupakan organisasi pemelihara keselamatan rakyat. Sebagai anggota BKR adalah bekas PETA, Heiho, Keisatsutai. Seinendan, Keibodan, dan lain-lain. Selain untuk menampung semangat rakyat, BKR dibentuk untuk mencegah bangkitnya permusuhan, baik antar kekuatan di dalam negeri terlebih lagi kekuatan asing yang ada pada waktu itu.

Dalam waktu yang tidak lama terbentuklah BKR di Jawa Tengah dengan R.P. Sudarsono sebagai pimpinan BKR Yogyakarta. Di samping tergabung dalam BKR, para pemuda umumnya membentuk (masuk) kelompok-kelompok politik kelasykaran lainnya. Di daerah Yogyakarta selain BKR, terbentuk juga kelasykaran lain seperti Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI) dipimpin H. Mastur, Daim dan Tunggono, kemudian Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) dipimpin oleh Surojo, Sujitno dan lain-lain.

Sejak dikeluarkannya Maklumat No. 5/1945 tanggal 26 Oktober, pembentukan LR (Lasykar Rakyat) di kabupaten,

kapanewon dan desa-desa terus digalakkan.⁴⁸⁾ Berkaitan dengan Maklumat tersebut para pemimpin Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 1945 mengeluarkan Maklumat No. 8. Maklumat tersebut (No. 8 tahun 1945) berisi tentang perubahan keanggotaan Lasykar Rakyat.

Dalam perkembangannya, kesatuan-kesatuan yang terbentuk, bersatu dan siap membantu TKR yang diorganisir oleh Urip Sumoharjo. Dan untuk menghindari konflik-konflik serta pertumbuhan kesatuan bersenjata di luar TKR, dikeluarkan Maklumat tanggal 6 Desember 1945 yang disahkan oleh KSU Letjen. Urip Sumoharjo. Kebijakan selanjutnya, TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dibentuk berdasar pada Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 diubah menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada tanggal 1 Juni 1946. Pada tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat diganti namanya menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia).⁴⁹⁾ Selanjutnya diganti menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) berdasar penetapan Presiden tanggal 5 Mei 1947.

4. Pembentukan KNI Daerah Yogyakarta

Sehari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan rapat dibawah pimpinan Ir. Sukarno di Gedung Kesenian

⁴⁸⁾ P.J. Suwardo, *op.cit.*, hlm. 103.

⁴⁹⁾ Soedjo Santoso Pratiomo, *op.cit.*, hlm. 62.

Jakarta.⁵⁰⁾ Dari rapat tersebut dihasilkan tiga keputusan sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terpilihnya Ir.Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dan untuk sementara pekerjaan Presiden dibantu Komite Nasional Indonesia.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat PPKI berikutnya dihasilkan keputusan tentang penetapan hal kementerian (12 departemen) dan pembagian wilayah RI (8 propinsi). Sedangkan pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno menyerukan pidatonya lewat radio yang pada dasarnya merupakan pembentukan KNI, PNI, dan BKR di daerah. Setelah KNIP terbentuk, di Yogyakarta segera dibentuk juga.

Hanya satu hari setelah Maklumat pembentukan KNI yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 1945, rakyat di Yogyakarta sudah mendirikan KNI Daerah (KNID).⁵¹⁾ Pada mulanya anggota KNID Yogyakarta berjumlah 32 orang, dan meningkat menjadi 83 orang.

Tujuan dibentuknya KNI adalah untuk membantu menjalankan pemerintahan daerah setempat. Di Kasultanan dan Paku Alaman KNI dibentuk dengan tugas membantu menjalankan pemerintahan di Yogyakarta. Meskipun tugas KNI Daerah tersebut pada awalnya lebih merupakan badan perjuangan.

⁵⁰⁾ Soedjatmodjo, *op.cit.*, hlm. 53.

⁵¹⁾ Soedjatmodjo, *op.cit.*, hlm. 53.

Terbukti dengan berdirinya BKR hingga menjadi TNI, juga sebagai wakil rakyat KNI-lah yang menggerakkan pemuda-pemuda kita untuk merebut senjata dari tangan penjajah Jepang di Kido Butai Kotabaru, sehingga mengakibatkan pertempuran Kotabaru (7 Oktober 1945).⁵²⁾

Dibentuknya KNI Daerah berarti juga mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan selain mempunyai arti bahwa sejak terbentuknya KNID itu segala macam Maklumat atau Peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur rakyat seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya salah satu wilayah dari Paku Alaman atau Kasultanan. Karena antara Kasultanan dan Paku Alaman telah dipersatukan oleh adanya kesadaran kedua pemimpin Yogyakarta atas kesanggupannya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sehubungan dengan adanya Maklumat Wakil Presiden No. X tentang pemberian kekuasaan legislatif pada KNI dan setelah terbentuknya KNI Daerah Yogyakarta, maka pada tanggal 30 Oktober 1945, Sri Sultan dan Sri Paku Alam mengeluarkan Amanat. Dalam Amanat tersebut dinyatakan BPKNIP Daerah Yogyakarta yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat, dinyatakan sebagai badan legislatif atau badan pembuat Undang-Undang untuk mengatur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama rakyat.⁵³⁾

⁵²⁾Soedarman Perwokoesoko. *op.cit.*, hlm. 49.

⁵³⁾Taahedi URI. *op.cit.*, hlm. 47 ; lihat juga E. Mardianto. *op.cit.*, hlm. 40-41 ; F.J. Suwarno. *op.cit.*, hlm. 110-111.

Dikeluarkannya Maklumat No. 18 tahun 1946 tentang pembentukan DPR Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 1946 oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam dengan KNI Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan adanya penghapusan KNID-KNID di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian dibentuk DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sesuai dengan bunyi Maklumat No. 18 tahun 1946, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan terbentuknya Dewan-Dewan Perwakilan, seluruh susunan Komite Nasional Indonesia di Daerah Yogyakarta dihapuskan dan pekerjaannya yang selarasnya dengan pekerjaan Dewan Perwakilan dilanjutkan oleh Dewan Perwakilan yang bersangkutan.⁵⁴⁾

C. Yogyakarta Menghadapi Agresi Militer Belanda

1. Agresi Militer Belanda I

Ditandatangani persetujuan Linggajati dan penghentian tembak menembak, memberi kesempatan pada Belanda untuk melakukan tekanan terhadap Republik secara politik maupun militer. Melalui pembentukan negara-negara boneka dan perang nota, pihak Belanda mencari kesempatan untuk melakukan agresinya. Pada tanggal 21 Juli 1947 serangan dimulai dari seluruh pertahanan Republik di Jawa dan Sumatera dengan tujuan penghancuran RI.

Kota Yogyakarta menjadi sasaran utama untuk dihancurkan. Empat buah pesawat pemburu Belanda dari Semarang menyerang lapangan terbang Maguwo. Menghadapi Agresi

⁵⁴⁾ Ibid.

Belanda. Pemerintah RI mempersiapkan rencana dibidang militer yaitu pertahanan total berintikan TNI. penyatuan TRI dan lasykar-lasykar menjadi TNI, dan pertahanan dengan sistim werkreise dilengkapi dengan taktik gerilya. Melalui corong RRI pidato Panglima Besar Sudirman menyerukan perintah menyatakan bahwa seluruh rakyat wajib berjuang bersatu mempertahankan nusa dan bangsa.

Ikut campur PBE menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Agustus 1945 dan kembali Panglima Besar mengeluarkan perintah. Adapun isi perintah tersebut adalah : 1. Pasukan kita harus tetap tinggal ditempat masing-masing, 2. Jangan lengah tetap awas, hati-hati dan waspada, 3. Perintah dan istruksi lainnya menyusul.⁵⁵⁾ Untuk selanjutnya Yogyakarta dijadikan daerah militer di bawah pimpinan Letnan Jendral Urip Sumoharjo dan kemudian kepemimpinan dipegang sendiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Akhirnya gerak laju Belanda dapat ditahan sebatas di kota-kota saja.

2. Agresi Belanda II

Atas usul India dan Australia, masalah Indonesia resmi menjadi pembicaraan dalam Dewan Keamanan. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Agresi Militer Belanda I selesai secara teori, karena kenyataan menunjukkan bahwa Belanda terus berusaha meluaskan wilayahnya. Sementara itu Dewan

⁵⁵⁾ Hubadilatan Galvat, tanggal 27 Juni 1995.

Keamanan PBB mengadakan sidang-sidangnya untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda sebagai kelanjutan penghentian tembak menembak.

Terbentuknya Komisi Jasa Baik yang dikenal dengan sebutan KTN (Komisi Tiga Negara) dengan anggota Belgia, Australia dan Amerika Serikat membawa kedua belah pihak pada usaha perundingan kembali. Pada tanggal 17 Januari 1948 tercapai persetujuan yang dikenal dengan persetujuan Renville yang menempatkan Republik pada posisi semakin sulit dengan terciptanya "garis van Mook".

Kabar pertama pembatalan persetujuan Renville di Yogya berupa serbuan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 jam 5.30 pagi itu.⁵⁶⁾ Seperti halnya persetujuan Linggajati, maka perjanjian Renville bagi Belanda hanya sekedar mengulur waktu.

Tersiarinya kabar rencana Presiden Sukarno ke India. diketahuinya rencana latihan perang TNI dan situasi reses Dewan Keamanan PBB, menjadi pertimbangan bagi Belanda memasuki kota Yogyakarta. Yogyakarta berhasil diduduki dan sebagian pemimpin berhasil ditawan. Bukan berarti RI hancur, karena Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi, Sudarsono dan Mr. Maramis di New Dehli telah dihubungi untuk membentuk pemerintah pelarian.

Seperti halnya Agresi Militer Belanda I, Agresi Mili-

⁵⁶⁾ B. Moedjanto, Indonesia Otak Karet Jilid 2, Yogyakarta : Kanisius, 1988, hlm. 14.

ter Belanda II juga mendapat reaksi internasional. Akhirnya Belanda harus menghadapi perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresinya.

3. Pengakuan Kedaulatan

Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 ke dua delegasi mencapai kesepakatan, yang dikenal dengan persetujuan Roem-Royen. Ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, yang pada dasarnya menjadi pembuka tercapainya penyelesaian masalah Indonesia-Belanda. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Roem-Royen perundingan diadakan kembali antara RI, BFO dan Belanda di bawah pengawasan komisi PBB pada tanggal 22 Juni 1949. Adapun hasil perundingan berisi tentang penghentian permusuhan dan pelaksanaan KMB.

Selanjutnya tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta, dan tanggal 30 Juli-22 Agustus 1949 di Jakarta dilangsungkan Konferensi Antar Indonesia. Menghasilkan persetujuan berkenaan dengan bentuk dan hal-hal tentang ketatanegaraan Indonesia Serikat. Serta dibentuknya Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, sebelum dan sesudah KMB.

KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 Nopember 1949. KMB diharapkan menjadi perundingan terakhir bagi kedua belah pihak. Maka merupakan acara pokok KMB itu adalah pengakuan kedaulatan bagi Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda secara sungguh-sungguh. penuh dan tidak

bersyarat.⁵⁷⁾ Ketentuan paling penting dari persetujuan KMB ialah Piagam Penyerahan Kedaulatan, yang oleh Indonesia diartikan Pengakuan Kedaulatan. Karena kedaulatan sudah kita rebut pada tanggal 17 Agustus 1945, bahkan dengan pengorbanan besar.⁵⁸⁾

Ahkirnya pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS dipimpin oleh P.M. Moh. Hatta ke Nederland untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan. Sementara Ratu Juliana, P.M. Dr. Willem Drees, Mr. E.M.J.A Sassen dan Drs. Moh. Hatta, delegasi RIS, menandatangani naskah pengakuan kedaulatan di Nederland. Di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink melakukan hal yang sama pada naskah pengakuan kedaulatan. Secara resmi Belanda mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Irian Barat serta resmi pula perang kemerdekaan Indonesia berakhir.

⁵⁷⁾ Teseo di k. op.cit., hlm. 113.

⁵⁸⁾ Masyanto, op.cit., hlm. 57. ; lihat juga Indonesian Embassy, London 12 Desember 1947.

BAB III
KONDISI KEDAULATAN RAKYAT
DARI TAHUN 1945 SAMPAI TAHUN 1949

A. Sejarah Berdirinya Kedaulatan Rakyat

Berakhkirnya kekuasaan tentara Jepang atas Indonesia ditandai dengan penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Kekalahan Jepang tidak diikuti dengan pengakuan pihak Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Dengan masih bersenjata lengkap tentara Jepang menguasai kota, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik. Sikap keras kepala, angkuh, sombong dan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati dilakukan pihak Jepang, menimbulkan kemarahan rakyat.⁵⁹⁾ Tidak dapat dicegah lagi rakyat secara serentak mendatangi tempat-tempat yang masih dikuasai Jepang, melakukan tindakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata.

Aksi serentak untuk mengambilalih kekuasaan dari tangan Jepang berlangsung pada tanggal 26 September 1945 mulai pukul 10.00.⁶⁰⁾ Salah satu yang berhasil diambil

⁵⁹⁾Teahadi Ikk. op.cit, h. 210, 211.

⁶⁰⁾Kedaulatan Rakyat, tanggal 17 Agustus 1945.

alih adalah percetakan harian **Sinar Matahari** milik Jepang, yang digunakan sebagai alat propaganda. Setelah dapat diambil alih, Jepang menghentikan penerbitan sehingga masyarakat Yogyakarta tidak dapat membaca berita sekitar proklamasi. Sementara itu para pejuang, termasuk Samawi dan rekan-rekannya, berhasil menyegel percetakan tersebut sehingga terhindar dari usaha manipulasi informasi dan situasi oleh pihak Jepang. Karena mereka ikut bekerja pada harian **Sinar Matahari** yang diterbitkan oleh Sendenbu (barisan propaganda Jepang) di Yogyakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Gondhojuwono.

Sebelum menjadi harian **Sinar Matahari** telah terbit dengan nama **Sedya Tama** yang berbahasa Jawa. Pada jaman kolonial, **Sedya Tama** merupakan satu-satunya hiburan dan harapan bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.⁶¹⁾ Dengan terusirnya Belanda dan bercokolnya Jepang di Indonesia, surat kabar **Sedya Tama** dihentikan penerbitannya oleh Jepang dijadikan surat kabar **Sinar Matahari**.

Dalam situasi genting, **Sinar Matahari** dimotori oleh para pejuang pers seperti Soemantoro, Bramono, Moeljono, Samawi dan rekan-rekannya dari Taman Siswa meneruskan penerbitannya.⁶²⁾ Segala persiapan penerbitan segera dilakukan dan pada tanggal 27 September 1945 terbitlah

⁶¹ Kedeaulatan Rakyat, tanggal 3 September 1995.

⁶² Kedeaulatan Rakyat, tanggal 27 Juli 1995.

surat kabar baru. Berita-berita perjuangan bangsa mewarnai setiap halaman surat kabar tersebut. Namun satu yang belum ada yakni nama surat kabar itu.⁶³⁾

Atas kesepakatan bersama, dua redaktur sekaligus wartawan yaitu Samawi dan Soemantoro, menghadap MR. Soedarisman Poerwokoesoemo ketua KNI DIY di bekas rumah kediaman Chokan Kakka (semacam gubernur Jepang), yang menjadi istana Presiden RI pada masa ibukota RI berada di Yogyakarta. Tujuan mereka tidak lain untuk membahas soal nama surat kabar baru itu.

Selaras dengan aspirasi perjuangan rakyat pada waktu itu, ketua KNI Yogyakarta Poerwokoesoemo memberikan nama **KEDAULATAN RAKYAT**. Terbitnya **Kedaulatan Rakyat**, pada tanggal 27 September 1945 disambut gembira oleh masyarakat.⁶⁴⁾ Sejak saat itu baik maklumat, amanat para pemimpin menjadi berita yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat.

Pengekangan demi pengekangan terhadap pers Indonesia baik pada masa pendudukan Belanda atau pendudukan Jepang justru memberi dorongan bagi perjuangan bangsa dan pertumbuhan pers Indonesia setelah merdeka.

Surat kabar sebagai salah satu media massa mempunyai peranan penting dalam kedudukannya ditengah-tengah masya-

⁶³⁾ Ibid.

⁶⁴⁾ Kedaulatan Rakyat, tanggal 27 Agustus 1945; lihat Mr. Soemanah, Beberapa Soal Sejarah Pers dan Journalistik, Jakarta : Balai Pustaka, 1972, hlm. 22-23.

rakat, apalagi pada masa perang kemerdekaan. Meskipun merupakan media paling murah, dapat dikatakan masih langka dan baru kalangan tertentu saja yang mengenalnya. Sementara alat komunikasi sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi revolusi, yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pengumuman-pengumuman serta perkembangan situasi yang dihadapi.

Sesuai dengan situasi revolusi, keberadaan **Kedaulatan Rakyat** tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan bangsa. Di samping sebagai lembaga sosial, pers mempunyai fungsi sebagai alat perjuangan. Hal ini berpengaruh pada tujuan berdirinya **Kedaulatan Rakyat**, yang bertujuan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan demi mencapai kehidupan bangsa yang adil dan makmur.

B. Keorganisasian Kedaulatan Rakyat Dari Tahun 1945 Sampai Tahun 1949

Kedaulatan Rakyat berdiri pada tanggal 27 September 1945, menempati gedung di jalan Malioboro 22, kemudian pindah ke jalan Tugu Kidul, yang sekarang menjadi jalan P. Mangkubumi.

1. Kepengurusan Awal

Pada awalnya bentuk perusahaan **Kedaulatan Rakyat** masih bersifat gotong royong, belum berbentuk badan hukum. Sistem yang dipakai oleh penerbitan **Kedaulatan Rakyat**

semacam koperasi.⁶⁵⁾

Disamping belum bersifat komersial, Kedaulatan Rakyat masih mengutamakan sifat perjuangan. Para pengurusnya betul-betul mempunyai idealisme yang tinggi dan menempatkan diri mereka dalam barisan perjuangan, yaitu mengemban idealisme untuk menyampaikan informasi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menggelorakan semangat juang atau revolusi.⁶⁶⁾

Dalam kepengurusannya, Kedaulatan Rakyat mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan (kepengurusan). Di mana orang-orangnya merupakan perintis berdirinya Kedaulatan Rakyat yang telah aktif sebagai wartawan pada harian Sinar Matahari. Sebagai pimpinan awal dipegang oleh Alfonsus Bramono, dengan pimpinan redaksi Sumanoro serta wakil redaksi Samawi.

Dipengaruhi situasi revolusi, kepengurusan Kedaulatan Rakyat mengalami perubahan. Pada tahun 1947, karena para pimpinan Kedaulatan Rakyat lebih aktif dalam peperangan dan sering meninggalkan redaksi, bahkan ada yang kemudian menerbitkan majalah sendiri, maka kekosongan diisi oleh H.

⁶⁵⁾ Wawancara penulis dengan Bapak Soemadi H. Korbuto, tanggal 21 Desember 1975 di Jln. P. Mangkubumi 40-42, Yogyakarta.

⁶⁶⁾ Kedaulatan Rakyat, tanggal 25 September 1945.

Samawi.⁶⁷⁾ Seperti diketahui, Sumanoro mendapat tuduhan terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1947. Untuk selanjutnya pimpinan redaksi diganti oleh M. Wonohito yang sebelumnya adalah wartawan keliling **Kedaulatan Rakyat**.⁶⁸⁾

Sejak tahun 1948 **Kedaulatan Rakyat** dipimpin oleh Dwi Tunggal Samawi-Wonohito, dengan nama samaran Berabe dan Ciptoning.

Dalam perkembangannya **Kedaulatan Rakyat** menerbitkan surat kabar mingguan yang diberi nama **Minggu Pagi**. Pimpinan redaksi dipegang oleh Wonohito, wakil pimpinan redaksi Bambang Sindhu dengan anggota Sudharto, Purbatin Hadi dan M. Nizar.

Pada tahun 1950 tepatnya tanggal 1 Juli 1950, perusahaan **Kedaulatan Rakyat** menjadi PT.

2. Dari Peristiwa Menjadi Berita

Dalam situasi revolusi, setiap detik kejadian mejadi peristiwa bersejarah. 1001 macam peristiwa di berbagai daerah sampai di meja redaksi dan akan menjadi berita untuk disampaikan pada khalayak.

Berbagai peristiwa sampai di redaksi melalui telepon, telegram, radio, juga melalui konferensi pers, wawancara,

⁶⁷⁾Wawancara penulis dengan Bapak Soemadi M. Wonohito, tanggal 21 November 1995, di Jln. P. Mangrove, Hotel Regency, lihat Kedaulatan Rakyat, tanggal 27 September 1995

⁶⁸⁾Kedaulatan Rakyat, tanggal 27 September 1995, lihat Buragilio I.R., Jejak Wartawan Indonesia, Jakarta : Gunung Agung, 1981, hlm. 581.

dan penyaksian. Dengan sumber berita berasal dari polisi, tentara, instansi resmi dan swasta.⁶⁹⁾ Juga berasal dari orang yang melapor ke redaksi atau wartawan-wartawannya yang mencari berita.

Untuk berita-berita dari luar daerah maupun luar negeri, **Kedaulatan Rakyat** mengirimkan wartawan perangnya ke garis depan, setelah kembali ke Yogyakarta baru berita dikirim ke redaksi. Diperoleh juga berita dari Kantor Berita Antara, yang menggunakan semacam telegram. Untuk berita luar negeri, **Kedaulatan Rakyat** memperolehnya dari siaran radio. Dipengaruhi oleh situasi dan alat transportasi yang masih sulit, berita-berita sampai ke meja redaksi seringkali terlambat. Sehingga ketepatan berita dengan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian menjadi terpengaruh.

Setelah berita-berita sampai ke meja redaksi, kemudian diproses menjadi berita yang dapat dibaca oleh seluruh pembacanya. Agar dapat dipahami pembacanya yang berbeda-beda tingkat pengetahuannya, redaksi berusaha menyusun laporan peristiwa sehingga menjadi berita yang mudah dipahami.

Segera setelah tersusun, kemudian di-set dengan mesin atau dengan tangan. Bagian koreksi melakukan pengoreksian,

⁶⁹⁾ Ibid. Dijelaskan bahwa berita diperoleh dari wartawan sendiri, dari radio, telegram Antara, informan-informan, para pemimpin perang kemerdekaan dan lain-lain.

dan setelah di-set kemudian bagian make-up menyusun bentuk halaman. Setelah siap, proses pencetakan dilakukan oleh bagian pencetakan. Sistem cetak yang digunakan adalah sistem cetak tinggi dengan mesin cetak datar. baru pada tahun 1950-an diganti dengan mesin cetak Duplex.⁷⁰⁾ Sistem cetak tinggi yaitu metode pencetakan dengan huruf dan atau gambarnya menonjol lebih tinggi di atas permukaan.⁷¹⁾

Selanjutnya, surat kabar di-pak dan siap disampaikan kepada pembacanya. Tugas tersebut dilakukan setiap hari. Meskipun tugasnya sama yaitu menyampaikan berita, tetapi peristiwa yang disampaikan berbeda.

Dalam menyampaikan berita, **Kedaulatan Rakyat** sempat menghentikan penerbitannya sewaktu Belanda menyerang Yogyakarta (Agresi Militer Belanda II), pada tanggal 28 Desember 1948. Wartawan-wartawannya meninggalkan kota untuk ikut bergerilya sambil membawa mesin cetak-nya yang dapat dibawa. Sambil bergerilya mesin cetak ini digunakan untuk mencetak pamflet yang dapat mengobarkan semangat perjuangan, di samping memberitahukan pada masyarakat

70) Wawancara penulis dengan Bapak Soeman M. Konobito, tanggal 21 November 1995, di Jln. P. Mangkubumi 40-42, Yogyakarta + lihat Kedaulatan Rakyat, tanggal 16 September 1995.

71) Tony A. Rachmadi (ed.), Kamus Istilah Jurnalistik, Jakarta : PPPB Dep. Dik. Bud., 1985, hlm. 11; lihat kurniawan Junaedhie, op.cit., hlm. 75.



bahwa tentara Indonesia masih ada.⁷²⁾ Dengan demikian Kedaulatan Rakyat tetap menghadirkan berita, meskipun dalam bentuk lain seperti Siaran Kilat dan Gerdak, yang sudah tidak dapat ditemukan lagi.

C. Hubungan Kedaulatan Rakyat, Pemerintah dan Masyarakat

Kerjasama antara pers. dengan pemerintah sudah terjadi sejak perjuangan fisik melawan pendudukan Belanda.⁷³⁾ Pers dengan penuh semangat memberi sumbangan pada perjuangan dengan mengobarkan semangat untuk melawan penjajah. Hal ini sesuai dengan fungsi yang melekat pada pers yaitu sebagai sarana perjuangan, sumber informasi maupun sarana pendidikan.

Lebih lanjut sebagai lembaga sosial pers mempunyai hubungan dengan pemerintah dan masyarakat. Dan hubungan antara pers. pemerintah dan masyarakat telah menempatkan kedudukan pers secara lebih jelas, sesuai fungsinya.

Sebagai sarana perjuangan maka Kedaulatan Rakyat dengan berita-berita sekitar pengumuman resmi pemerintah, sekitar perjuangan rakyat dan berita perjuangan lainnya

⁷² Kawan-tara perula dengan Espek Soemadi M. Winchito, tanggal 21 November 1995, di jln. F. Margretha 40-42, Yogyakarta ; Dalam Kedaulatan Rakyat tanggal 3 Agustus 1995 diharikan. "Masin satel profesor diareta di nareetakan kedaulatan Rakyat kemudian diangket dengan larang mengunakan belai 10 daerah nang aruan untuk diareta kembali digunaka untuk mengatake belabara".

⁷³ Soekarno, Espek, 1995.

telah membuktikan adanya hubungan tersebut. Dimana hubungan yang ditunjukkan bersifat positif, dalam arti antara **Kedaulatan Rakyat**, pemerintah dan masyarakat terdapat kerjasama seimbang, masing-masing ada dalam posisinya dan tidak saling menguasai.

Adapun hubungan **Kedaulatan Rakyat** dengan pemerintah setempat (Yogyakarta) dapat dilihat dari pemberian nama surat kabar tersebut, yang langsung diberikan oleh pimpinan KNI Daerah Yogyakarta, KPH. Poerwokoesoemo. Selain menjabat sebagai ketua KNI Daerah Yogyakarta. Poerwokoesoemo juga menjabat sebagai "pencarwara" (bagian penerangan) Kraton Yogyakarta. Di mana Kraton Yogyakarta masih mempunyai kekuatan politisi sehubungan dengan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan Yogyakarta.

Hubungan **Kedaulatan Rakyat** tidak hanya dengan pemerintah daerah. Meskipun hanya surat kabar daerah tetapi karena Yogyakarta pernah menjadi ibukota Republik Indonesia maka **Kedaulatan Rakyat**, dengan sendirinya menjadi surat kabar berscope nasional. Hubungan dengan pemerintah pusat juga menjadi erat. Terbukti sering terjadi tukar pikiran antara pak Samawi dan pak Wonohito dengan presiden Sukarno. atau ketika berlangsung KMB pak Wonohito ditunjuk untuk ikut serta dalam perundingan.

Hubungan yang terjalin antara **Kedaulatan Rakyat** dengan pemerintah menjadi satu kekuatan pendukung perjuangan rakyat. Sedangkan hubungan antara rakyat dengan **Kedaulatan**

Rakyat tidak perlu dipertanyakan lagi, karena **Kedaulatan Rakyat** lahir dari aspirasi perjuangan rakyat dan keberadaannya disediakan untuk perjuangan rakyat. Sebagai bagian dari masyarakat, **Kedaulatan Rakyat** mempunyai tugas mendukung masyarakat lingkungannya. Dukungan yang dimaksudkan adalah dengan memberi informasi-informasinya.

Interaksinya dengan masyarakat di mana surat kabar tersebut ada (terbit) telah ditunjukkan dalam hubungannya masyarakat sebagai pembaca dan sebagai sumber berita serta rekan dalam proses terbentuknya berita. Sehingga hubungan antara pers, masyarakat dan pemerintah menjadi penting bagi perjuangan.

Tidak disangsikan lagi, **Kedaulatan Rakyat** bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah mempunyai peran penting pada masa perjuangan menegakkan kedaulatan. Untuk itu pada bab berikutnya yaitu bab IV akan dibahas tentang peranan **Kedaulatan Rakyat** sebagai sumber sejarah dilihat dari isi berita yang ditampilkan pada masa perjuangan.

BAB IV

PERANAN KEDAULATAN RAKYAT SEBAGAI SUMBER SEJARAH

DITINJAU DARI ISI KEDAULATAN RAKYAT

A. Peran Kedaulatan Rakyat Hubungannya Dengan Fungsi Pers

Dalam bab I telah dijelaskan tentang fungsi pers. Dari fungsi itu disebutkan, pers berfungsi sebagai sumber informasi, sarana pendidikan, alat mempengaruhi serta sebagai sarana hiburan. Sehubungan dengan peranan surat kabar **Kedaulatan Rakyat**, dilihat dari isi beritanya, penulis mencoba menunjukkan fungsi pers (surat kabar) dengan mengkhususkan fungsinya dalam dua fungsi. *Pertama*, fungsi pers sebagai sarana atau alat perjuangan. *Kedua*, fungsi pers sebagai sarana pendidikan.

1. Fungsi Perjuangan

Yang dimaksud dengan fungsi perjuangan dalam penulisan ini adalah pers sebagai sarana mengobarkan perjuangan untuk melawan penjajah. Pada masa perang kemerdekaan antara tahun 1945-1949, fungsi ini dapat dikatakan sangat dominan. Dilihat dari isi berita, surat kabar harian **Kedaulatan Rakyat** selalu menampilkan berita-berita sekitar perjuangan rakyat, amanat-amanat, pengumuman-pengumuman resmi, opini, serta seruan-seruan para pemimpin yang pada dasarnya secara langsung atau tidak langsung dapat memberi dorongan semangat rakyat pembacanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Demikian juga dengan berita-berita perkembangan situasi sekitar penyelesaian masalah atau perselisihan Indonesia-Belanda serta aksi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Disamping dukungan pihak luar (luar negeri) yang membuat posisi Indonesia sebagai negara merdeka makin kuat.

Selain lewat berita, fungsi perjuangan juga ditunjukkan dengan dimuatnya setiap peristiwa dalam surat kabar **Kedaulatan Rakyat**. Karena dengan dimuatnya berita-berita dalam tiap halaman, telah menunjukkan bahwa memang disediakan untuk menyampaikan berita kepada khalayak. Sehingga jika berita itu berupa pengumuman, amanat atau hal lain berkenaan dengan situasi perjuangan pada waktu itu akan dengan cepat tersebar dan cepat mendapat respon dari masyarakat.

Jadi fungsi perjuangan pers tidak terlepas dari fungsi pers sebagai alat mempengaruhi. Karena seperti diketahui bahwa berita dapat sampai atau dibaca oleh khalayak karena dimuat oleh surat kabar. Selanjutnya dibaca, berarti orang yang membaca mendapat informasi, dari informasi tersebut pembaca akan mendapat pengaruh dan untuk selanjutnya akan segera dapat menentukan sikap. Menjadi jelas jika surat kabar berfungsi sebagai sarana pengobar semangat perjuangan.

Dari fungsi perjuangan ini, **Kedaulatan Rakyat** yang

sebagai sarana perjuangan. Dimuatnya berita-berita, baik amanat, pengumuman dan sebagainya, menunjukkan peran sertanya dalam menegakkan kedaulatan. Meskipun kedudukannya hanya sebagai surat kabar daerah, kenyataannya harus menempatkan diri sebagai surat kabar nasional sehubungan dengan kedudukan Yogyakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia.

Dipengaruhi jiwa nasionalis wartawannya, **Kedaulatan Rakyat** tampil sebagai surat kabar perjuangan dengan peran ganda. Sebagai surat kabar perjuangan harus menghadapi kolonialisme Belanda dengan propaganda mereka tanpa kompromi. Sebagai surat kabar harus tetap bertindak sebagai wadah produk jurnalistik.

Dari berita-berita yang dimuat pada tahun 1945 sampai tahun 1949, peran perjuangan **Kedaulatan Rakyat** tidak diragukan lagi. Diantara berita-berita yang dimuat, berjudul "PERDJOEANG HABIS-HABISAN MENGOESIR PENDJADJAH", tertulis sebagai berikut :

Sedjak kemerdekaan diproklamirkan, semendjak itoe poela tetap mendjadi rakjat jang berdaulat kesatoean Negara Repoeblik Indonesia jang wadjib kita pertahankan dari serangan pendjadjah. Kini datang berita bahwa Djakarta, Bandoeng, Semarang, Soerabaja oleh Serikat diserahkan kepada Belanda. Apa jang dimaksoedkan tentoe tidak lebih dari maksoed kita akan didjadikan djadjahan Belanda, akan didjadjah, akan ditindas hidoep-hidoep, hadapi perdjoeangan habis-habisan mengoesir pendjadjah.⁷⁴⁾

⁷⁴⁾ Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Juni 1948.

Suatu seruan dari pemimpin besar Muhammadiyah sebagai anjuran untuk mempertahankan kemerdekaan yang menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan bangsa. Untuk itu persatuan harus dipertahankan, karena persatuan merupakan kekuatan untuk melawan penjajah. Dan melalui **Kedaulatan Rakyat**, Pemimpin Besar Muhammadiyah mengajak seluruh masyarakat terus berjuang.

Dari isi berita seperti tersebut di atas, kiranya dapat dijelaskan, meskipun hanya berupa tulisan, pada dasarnya mempunyai kekuatan mempengaruhi pembacanya. Didukung oleh suasana revolusi yang mudah membakar emosi rakyat, berita-berita menjadi senjata tajam untuk menghadapi penjajah.

"WASPADALAH BERKENAAN DENGAN TIPOE MOESLIHAT MEMETJAH BELAH", tulisan Tjiptoning, nama samaran Wonohito salah satu perintis **Kedaulatan Rakyat**, dimuat dalam surat kabar tanggal 30 Mei 1946. Seperti halnya seruan PB. Muhammadiyah, dari tulisan Tjiptoning juga mengingatkan untuk selalu mewaspadaai taktik yang terbukti mampu memecah-mecah rakyat Indonesia, sehingga kesatuan persatuan negara Republik Indonesia yang masih muda dapat dikacaukan.

Bukti lain peranan **Kedaulatan Rakyat** sesuai fungsi pers dapat dilihat dengan dicantumkan slogan-slogan atau seruan-seruan di setiap sudut atas halaman pertama, tulisan-tulisan seperti ; **MERDEKA ATAU MATI, SIAP DAN WASPADA, SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA, USIR PENJAHAT**

PERANG, HANCURKAN MUSUH, BELANDA KEJAM DAN BIADAB, sangat jelas akan mempengaruhi semangat perjuangan. Dalam situasi revolusi kata-kata semacam itu menjadi pengobar semangat, memuaskan nafsu heroisme rakyat. Sementara akibat-akibat lain tidak diperhatikan, karena sentimen lebih mendominasi daripada pikiran.

2. Fungsi Pendidikan

Seperti telah dijelaskan dalam bab I tentang fungsi pendidikan, maka dapat membaca bagi rakyat Indonesia, berarti satu langkah maju untuk mencegah menjadi bangsa terjajah lagi. Karena semakin banyak rakyat yang dapat membaca akan semakin mudah bagi rakyat untuk mengetahui perkembangan situasi yang terjadi. Lebih mudah juga bagi para pemimpin atau tokoh pejuang untuk menyebarluaskan amanat-amanatnya, pengumuman-pengumuman dan lain sebagainya berkaitan dengan perjuangan menegakkan kedaulatan. Sehingga rakyat semakin mantap bertindak dan bersikap.

Berdasar isi berita, **Kedaulatan Rakyat** yang terbit periode 1945-1949, 90% berbicara sekitar revolusi. Baik yang terjadi di Yogyakarta maupun luar Yogyakarta, dengan sedikit kolom disediakan untuk iklan, berita lelayu. Di mana iklan-iklan pada jaman Perang Kemerdekaan berisi pengumuman atau seruan pimpinan tentara, komandan front atau laskar.

Sehubungan dengan situasi revolusi, rakyat berjuang sepenuhnya untuk tetap tegaknya kedaulatan Indonesia, maka

fungsi pendidikan yang dimaksud tidak terlepas dengan hal-hal sekitar perjuangan rakyat dan situasi revolusi. Dengan kata lain pengetahuan yang dimaksud tidak lain segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Jadi fungsi pendidikan yang ditunjukkan oleh surat kabar **Kedaulatan Rakyat** tidak terlepas dari fungsinya sebagai sarana perjuangan. Dengan adanya surat kabar yang terbit, maka pengumuman-pengumuman, informasi dapat lebih mudah disampaikan. Melalui berita-berita tersebut mendorong untuk mengetahui isi berita yang dimuat. Keinginan itu mendorong orang untuk bisa membaca, sehingga dengan semakin banyak yang dapat membaca semakin mudah untuk diatur atau dikoordinir. Akhirnya arah serta tujuan perjuangan lebih jelas.

Sementara itu, lewat membaca, terutama berita-berita surat kabar tahun 1945-1949 mampu membangkitkan semangat atau rasa kebangsaan pembacanya, dalam hal ini rakyat. Karena berita-berita yang dimuat surat kabar **Kedaulatan Rakyat** seluruhnya merupakan berita-berita perjuangan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah membangkitkan semangat kebangsaan atau rasa cinta tanah air. Dengan demikian fungsi pendidikan dari surat kabar, seperti halnya **Kedaulatan Rakyat**, ditunjukkan melalui berita-beritanya.

Termasuk dalam fungsi pendidikan adalah fungsi surat kabar dalam membentuk pendapat umum. Pendapat umum yang dimaksud adalah suatu pertimbangan yang bersifat umum dari sejumlah orang tentang suatu aspek tertentu dari kehidupan.⁷⁵⁾ Pendapat umum, dapat terbentuk setelah orang membaca surat kabar (Kedaulatan Rakyat) sebagai salah satu media yang diyakini mampu menciptakan pendapat umum. Selain media lainnya seperti siaran radio, diskusi, percakapan sesama manusia dan lain-lain.

Masa revolusi, peranan surat kabar sangatlah kuat dan berpengaruh dalam membentuk pendapat umum. Dan dalam pembentukan pendapat umum ini dapat dilihat dari hubungan surat kabar dengan pembacanya, siapa yang menulis dalam surat kabar tersebut termasuk posisi serta kedudukannya dalam masyarakat dan lain-lain. Hal tersebut biasanya terdapat dalam tajuk rencana, artikel, surat pembaca, pojok atau gambar-gambar dan lain-lain.

Sebagai contoh, dalam surat kabar **Kedaulatan Rakyat** tanggal 7-10-1946. Dimuat pidato Panglima Besar Sudirman, yang pada dasarnya menyerukan untuk mempersatukan semua kekuatan yang ada menjadi satu kekuatan. Dengan tujuan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia juga mempunyai satu kekuatan tangguh. Di samping menyatukan kekuatan

75) T. Alwadi, ed., Sunda Pandoel, Catatan Perlintasan dan Perlempasan Sistem Periklanan Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka Simpati, 1995, hlm. 157.

untuk menghadapi ancaman.

Dari contoh tersebut dapatlah dimengerti bagaimana **Kedaulatan Rakyat** mampu membentuk pendapat umum. Dengan amanat dari PB. Sudirman sebagai tokoh besar semasa revolusi, apa yang dikatakan akan mendapat perhatian dan selanjutnya dilakukan. Karena nama PB. Sudirman pada masanya merupakan tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan penting sebagai pemimpin tertinggi TNI.

Jadi surat kabar **Kedaulatan Rakyat** sebagai media massa yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan revolusi, berperan juga dalam membentuk pendapat umum.

Dari fungsi-fungsi tersebut diatas kiranya fungsi ekonomi menjadi fungsi yang menempati prosen terkecil. Karena pada masa revolusi, seperti **Kedaulatan Rakyat** belum bersifat komersial masih mementingkan tujuan utamanya sebagai surat kabar perjuangan. Meskipun iklan-iklan dimuat juga, tetap saja berkaitan dengan perjuangan. Sebab masih sekitar pengumuman atau seruan dari komandan front atau dari pemimpin lainnya. Jadi meskipun bersifat ekonomis, belum menjadi tujuan.

B. Peran Kedaulatan Rakyat Hubungannya Dengan Perjuangan Diplomasi

Dari sejak meletusnya revolusi Indonesia, tidak disangsikan lagi jasa pers (surat kabar) dan sejarah pers di Indonesia adalah sejarah yang memberikan bantuan keseluru-

periode 1945-1949 sifat dan fungsi pers memiliki corak unik. Karena sifatnya membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan demi tegaknya kedaulatan Indonesia. Suatu kenyataan jika usaha tersebut mengharuskan rakyat menempuh dua jalan, yaitu jalan kekerasan dan jalan perundingan (diplomasi).

Cara perundingan, dalam sejarah Indonesia (1945-1949) menjadi salah satu cara yang ditempuh. Meskipun dengan cara ini Indonesia lebih sering dirugikan daripada mendapat keuntungan. Berkali-kali perundingan dilakukan, tiap kali pula perundingan menemui jalan buntu.

1. Gagalnya Perundingan

Segala cara telah dilakukan untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia-Belanda yang dilakukan oleh kedua bangsa maupun dengan bantuan bangsa lain (seperti Inggris).

Perundingan yang ditempuh selalu menemui jalan buntu. sehingga tepat jika dikatakan bahwa perundingan hanya merupakan cara untuk mengulur waktu saja. Dan soal perundingan sebenarnya dapat dipecahkan, jika dilakukan secara jujur. Menjadi sulit karena menyangkut pendirian. Sehingga jika perundingan tidak menguntungkan, bagi Belanda tidak akan mengalami banyak kerugian. Tetapi bagi bangsa Indonesia, karena mempertaruhkan nasib tanah air, maka jika jaya akan jaya selamanya. jika jatuh berarti sulit untuk dapat

bangkit lagi.⁷⁶

Seperti diketahui, yang menjadi persoalan pokok perundingan dan menjadi pertikaian adalah masalah kedaulatan.⁷⁷

Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti Indonesia sebenarnya telah memiliki kedaulatannya. Ditariknya tentara Serikat dari tanah air yang tidak diikuti penarikan tentara Belanda berarti pelanggaran atas kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda.

Berdasar hal tersebut, menjadi jelas jika pertikaian antara Indonesia-Belanda sangat sukar dicari penyelesaiannya. Baik Belanda maupun Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kedaulatan masing-masing. Adapun gagalnya perundingan disebabkan, pertama ; hal pendirian. Pendirian yang dimaksud adalah sikap atau prinsip yang dipegang teguh oleh Belanda soal Indonesia maupun sikap atau prinsip Indonesia atas nasib bangsanya. Dan soal pendirian menjadi penyebab gagalnya perundingan, karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan pendiriannya.

Dalam **Kedaulatan Rakyat** tanggal 7 Nopember 1946 dijelaskan bahwa :

"Semoea kegagalan dari semoea pemitjaraan itoe ialah : pendirian difihak Belanda menghendaki Indonesia tetap dalam linkoengan kerdjaan Belanda, dan pendirian Indonesia

⁷⁶ *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 13 November 1945.

⁷⁷ *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 1 Desember 1945.

tetap menolak dalam lingkongengan keradjaan Belanda".⁷⁸⁾

Jelas bagi kita, jika bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga tetap mempertahankan pendiriannya ntuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan 100% dan menolak pendirian Belanda yang menginginkan Indonesia tetap berada dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Dengan latar belakang penolakan, hubungan Indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda (rijkverband) yang terjalin kurang lebih 350 tahun merupakan hubungan yang tidak menguntungkan. Karena secara kultur, sosial, politik dan ekonomi Indonesia selalu dirugikan. Maupun kepentingan yang tidak terjamin selalu menjadi nomor dua setelah kepentingan Belanda.

Sementara, pihak Belanda tetap berseikeras mempertahankan pendiriannya agar Indonesia tetap berada dalam lingkungan kerajaan Belanda. Hubungan yang telah terjalin selama 350 tahun dengan sekuat tenaga tetap dipertahankan. Dan dasar hubungan itu juga yang menjadi pendirian Belanda dalam setiap perundingan soal Indonesia-Belanda. Dengan kata lain pihak Belanda tidak ingin melepaskan Indonesia.

Dua pendirian yang bertolak belakang, menyebabkan perundingan-perundingan menemui jalan buntu. Masing-masing berpegang teguh pada pendiriannya. Meskipun Belanda mengakui bahwa hubungan yang terjadi mampu membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia, tetapi mereka tidak mau mengakui

⁷⁸⁾ Medanlaten Rakyat, tanggal 7 Desember 1914.

bahwa nasionalisme Indonesia mampu dan cukup kuat untuk membentuk atau mendirikan suatu negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti juga proklamasi Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak diakui oleh Belanda, begitu juga dengan negara kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki sikap atas bangsanya untuk merdeka 100% lepas dari lingkungan kerajaan Belanda. Sehingga menjadi hal yang wajar jika perundingan tidak menemukan jalan keluar dan gagal.

Sebab lain dari gagalnya perundingan penyelesaian masalah Indonesia-Belanda adalah soal syarat perundingan. Syarat perundingan yang dimaksud adalah pikiran sehat, hati jujur dan perasaan kemanusiaan. Seperti dimuat dalam surat kabar **Kedaulatan Rakyat** tanggal 7 Oktober 1946, tertulis sebagai berikut :

"Kewadajiban Komite Djendral Belanda dengan singkat ialah oentoek mendapatkan soeatoe kepoetoesan jang memoeaskan bagi kedoea belah pihak. pihak Indonesia dan pihak Belanda. Kita haroes bekerdjia dengan pikiran jang sehat, hati jang djoedjoer dan perasaan kemanusiaan".⁷⁹

Suatu syarat perundingan sebagaimana dianjurkan Schermerhorn yang jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh kedua belah pihak, maka besar kemungkinan persetujuan yang memuaskan kedua belah pihak akan tercapai.

⁷⁹ -Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Oktober 1946.

Secara nyata syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Belanda. Terbukti, meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak mau mengakui bahkan ingin menguasai kembali Indonesia. Dilancarkan Agresi I tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi II tanggal 19 Desember 1948 menjadi bukti konkrit. Bukti lain dapat dilihat dari perundingan-perundingan antara kedua belah pihak (Indonesia-Belanda) yang selalu menemui jalan buntu dan berjalan tidak seimbang.

Ketidak - seimbangan terlihat dari delegasi-delegasi yang menjadi wakil dalam perundingan. Delegasi-delegasi yang dikirim pihak Belanda merupakan delegasi yang tidak mempunyai kekuasaan penuh (full power). Sementara pihak Indonesia mengirimkan wakilnya dalam perundingan dengan kekuasaan penuh. Sebagai misal, Indonesia diwakili oleh menteri luar negeri yang bertindak juga sebagai perdana menteri dengan kekuasaan penuh. Pihak Belanda mengirimkan komisi - jendral, dimana kedudukannya jelas tidak sama dengan Menteri Luar Negeri, bahkan jauh dibawah kekuasaan penuh Menteri Luar Negeri.

Dapat dikatakan perundingan tidak dilakukan antara negara dengan negara, tapi antara negara dengan sekelompok orang. Dan soal prosedur ini ditentukan sekali oleh soal perundingan atau masalah perundingan, yaitu yang berhadapan dalam perundingan itu negara dengan negara atau tidak.

Bagi Belanda jelas tidak mewakili suatu negara, dengan dasar konstitusi, yaitu Rijkverband-nya mempunyai arti bahwa Belanda tidak pernah mau mengakui Revolusi Indonesia, negara Indonesia bahkan pemerintah Republik defacto.

Dengan alasan-alasan tersebut, dengan sendirinya dasar dan pokok pikiran maupun pendirian Belanda tidak dapat dipertemukan dengan sikap Indonesia. Adapun dasar pokok dan pokok pikiran serta pendirian Indonesia dalam perundingan adalah program pemerintah yang terdiri dari lima pasal. Disebutkan dalam **Kedaulatan Rakyat**, tanggal 8 Oktober 1946 sebagai berikut :

1. Berunding atas pengakoean Negara Repoeblik Indonesia merdeka 100%
2. Mempersiapkan rakyat dan negara disegala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi, dan sosial oentoek mempertahankan Repoeblik Indonesia
3. Mentjapai soesoenan Pemerintah Poesat dan Daerah jang demokratis
4. Beroesaha segiat-giatnja oentoek menjempoernakan proedoejai dan sebagian makan dan pakaian
5. Tentang peroesahaan dan perkeboenan jang penting. hendaknja oleh Pemerintah diambil tindakan seperloenja hingga memenoehi maksoed jang termaktoeb dalam Oendang-Oendang Dasar futsal 33 (hal kesedjahteraan sosial).⁸⁰⁾

Dapat dikatakan kemungkinan perundingan dapat mempertemukan sikap yang bertolak belakang, jika pihak Belanda mau mengirimkan wakil-wakilnya sebagai utusan suatu negara dengan kekuasaan penuh. Disamping kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.

⁸⁰⁾ Kedaulatan Rakyat, tanggal 8 Oktober 1946

2. Menuju Penyerahan Kedaulatan

"Rakyat kita menghadapi peristiwa yang penting dalam sejarahnya : negara Indonesia akan membikin perjanjian yang pertama setara merdeka dengan pihak Belanda".⁸¹⁾

Secara merdeka yang dimaksud adalah perundingan yang dilakukan antara negara dengan negara, yang berdaulat, sederajat. Dengan kata lain kedaulatan Indonesia mulai mendapatkan penghargaan dari Belanda, tidak saja secara defakto tapi juga de jure. Hal ini mempunyai arti memberi harapan kepada kita bangsa Indonesia atas pengakuan kedaulatan sepenuhnya di dalam maupun di luar. Disebutkan dalam **Kedaulatan Rakyat**, tanggal yang sama 4 Oktober 1946 sebagai berikut :

1. Hak perwakilan negara setara aktif dan pasif, jadi hal menempatkan duta di negara lain dan menerima sendiri duta dari negara lain
2. Hak membuat perjanjian internasional
3. Hak mengemukakan perang dan membuat damai (pasal 11 dan 3 UUD).⁸²⁾

Dimana ketiga hal tersebut dapat dilakukan lepas dari perantaraan negara lain bahkan Belanda sekalipun. Dan langkah ini menjadi kemajuan untuk menuju pada pengakuan kedaulatan.

Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan, banyak perundingan menemui jalan buntu. Perundingan Hoge Value di Nederland, pada tanggal 14, 21, 22 dan 24 April 1946 gagal karena pengakuan defakto RI hanya meliputi Jawa, Sumatera

⁸¹⁾ Kedaulatan Rakyat, tanggal 4 Oktober 1946.

⁸²⁾ Ibid

dan Madura. Sehingga jauh dari merdeka 100%.

Perundingan selanjutnya di Linggajati yang sempat menghasilkan persetujuan, dikenal dengan perjanjian Linggajati. Dan diratifikasi pada tanggal 25 Maret 1947, oleh kedua belah pihak, sebagai persetujuan antara negara dengan negara. Meskipun demikian kenyataan menunjukkan Belanda tidak segan-segan melanggar perjanjian dengan alasan yang dibuat-buat.

Meskipun kepentingan Indonesia diperhatikan, tetapi masih terlalu banyak memberi kesempatan pada pihak Belanda untuk menghalangi jalan Indonesia menuju pengakuan kedaulatan. Dalam **Kedaulatan Rakyat** tanggal 11 dan 12 September 1947 dijelaskan, bahwa kemungkinan itu disebabkan oleh tafairan yang berbeda dari pokok-pokok hasil perundingan. Akibatnya Belanda semakin mudah bertindak sewenang-wenang untuk menghancurkan RI. Tindakan menirikan negara-negara kecil dengan otonominya, termasuk aksi militer, nyata-nyata merupakan tindakan pelanggaran atas persetujuan yang telah diratifikasi.

Untuk itu tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk tetap setia pada persetujuan Linggajati. Sebagaimana tertulis dalam surat kabar **Kedaulatan Rakyat**, tanggal 12 Nopember 1947 bahwa, bila rakyat maupun pemerintah Republik Indonesia sendiri sekarang berpendirian harus lepas dan lepas dari Linggajati. Maka pemerintah RI meninggalkan politik Linggajati.

Gagalnya pelaksanaan persetujuan Linggajati dapat dilihat dari dilancarkan Agresi I oleh Belanda, yang secara tidak disadari telah membawa soal Indonesia-Belanda menjadi masalah internasional. Simpati terhadap Indonesia semakin menguatkan posisi Indonesia.

Terbentuknya Komisi Tiga Negara, yang diprakarsai oleh India dan Australia atas usul Amerika (AS) berhasil mempertemukan wakil-wakil Indonesia-Belanda dalam suatu perundingan. Dengan Paul van Zeeland dari Belgia wakil dari Belanda, menteri luar negeri Evatt sebagai ganti Kirby dari Australia mewakili Indonesia dan Frank P. Graham dari Amerika.⁸³⁾ Perundingan dilaksanakannya di atas kapal Renville (AS) yang kemudian menghasilkan persetujuan dan dikenal dengan persetujuan Renville, pada tanggal 8 Desember 1947.

Seperti halnya persetujuan Linggajati, persetujuan Renville dalam pelaksanaannya juga gagal. Dalam surat kabar **Kedaulatan Rakyat** tanggal 29 Oktober 1947 dijelaskan bahwa Belanda akan membentuk pemerintah interim tanpa Indonesia. Dengan alasan, Republik Indonesia tidak melaksanakan persetujuan gencatan senjata dan tidak menerima dasar-dasar persetujuan Renville. Suatu alasan yang dicari-cari dan bertujuan untuk menjatuhkan Republik.

Seperti diketahui, pada awalnya Republik memang meno-

⁸³ *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 8 Oktober 1947.

lak hasil perundingan, tetapi akhirnya menerima dengan pertimbangan persenjataan yang tidak mencukupi (persediaan amunisi menipis), jika terjadi serangan yang lebih hebat dari Belanda berarti korban akan lebih banyak, tidak adanya jaminan dari DK-PBB untuk memberi bantuan, mendorong Republik menerima persetujuan Renville.

Jadi alasan bahwa Republik tidak mentaati persetujuan, hanya merupakan rekaan Belanda, supaya Belanda dapat menekan Republik.

Sebaliknya, Belanda sendiri yang terang-terangan tidak mentaati persetujuan. Dibentuknya negara-negara bagian, termasuk di daerah rampasan Belanda yang merupakan daerah Republik, tanpa persetujuan Republik. Selain bukti tersebut, usaha Belanda mengerahkan pasukannya ke daerah-daerah yang dianggap tidak aman termasuk di daerah Republik adalah suatu pelanggaran atas hasil persetujuan.

Pernyataan Belanda bahwa perundingan tidak mungkin dilanjutkan lagi dengan alasan-alasan tersebut diatas telah membuntukan jalannya perundingan. Usul Belanda menjadikan Republik sebagai negara bagian seperti negara bentukan lainnya yang harus dijawab dalam waktu 18 jam menjadi alasan Belanda untuk segera melepaskan diri dari persetujuan. Dan sejak tanggal 18 Desember 1948 Belanda secara resmi melepaskan diri dari persetujuan Renville. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang ke dua.

Serbuan atas Yogyakarta, telah merobohkan beberapa bangunan penting seperti RRI. Sensor pers dilakukan, dengan tujuan apa yang sebenarnya terjadi tidak akan diketahui oleh dunia luar. Seperti diberitakan Belanda yang menyatakan bahwa Republik tidak berlutut menghadapi serangan pembebasan Belanda. **Kedaulatan Rakyat** sebagai suarat kabarnya Yogyakarta memilih untuk sementara berhenti terbit dan menolak kerjasama dengan Belanda. Wartawan-wartawannya meninggalkan kota untuk bergerilya sambil mengumpulkan informasi.

Dikeluarkannya Resolusi DK-PEB 28 Januari 1948, adanya serangan umum merebut kota Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949 serta desakan AS kepada Belanda untuk menerima Resolusi dan kenyataan Belanda melakukan Agresi ke dua, menjadikan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka semakin kuat.

Perundingan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 1949 dan menghasilkan persetujuan Rum-Royen yang tidak memuaskan RI. Karena RI hanya menguasai Yogyakarta dan penarikan mundur pasukan Belanda dilakukan hanya di Yogyakarta saja, sementara negara-negara bagian bentukan Belanda yang dirampas dari RI tetap diakui, sedangkan RI hanya boleh mewakili sepertiga dari seluruh anggota dalam DPR Federal Sementara. Kenyataan tersebut mengundang rasa tidak puas, yang mendorong PDRI memberi dukungan persetujuan Rum-Royen dengan dasar tentara RI tetap pada kedudu-

kannya. sedangkan tentara Belanda harus ditarik dari daerah-daerah RI. selain Yogyakarta dipulihkan kembali tanpa syarat kedaulatan RI atas wilayahnya diakui seperti pada persetujuan Linggajati. Dengan tindakan tersebut menambah simpati BFO untuk berunding.

Pada tanggal 19-20 Juli di Yogyakarta. dilanjutkan pada tanggal 30 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta. berlangsung Konferensi Antar Indonesia yang dihadiri oleh wakil RI dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg atau Badan Permusyawaratan Federal). Dari keputusan yang diperoleh menyadarkan Belanda pada kekuatan Republik yang tidak mudah dipatahkan apalagi RI semakin kuat di mata dunia.

Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949. KMB (Konferensi Meja Bundar) berhasil memberi keputusan penting tentang penyerahan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949 oleh Belanda pada RIS. Karena kedaulatan sudah dimiliki sejak proklamasi 17 Agustus 1945. maka penyerahan bukanlah istilah tepat. dengan alasan yang sama lebih tepat dikatakan sebagai pengakuan kedaulatan.

Dalam **Kedaulatan Rakyat** tanggal 27 Desember 1949 dijelaskan, bahwa dengan kedaulatan Nederland atas Nederland-Indie diserahkan kepada RIS demikian juga kedaulatan Republik Indonesia, maka yang ada kemudian adalah Republik Indonesia Serikat. Berarti pula, Republik Indonesia kehilangan kedaulatannya yang telah bertahun-tahun diperjuang-

kan. Dalam surat kabar tersebut tertulis pernyataan sebagai berikut :

"RIS belum berarti kemerdekaan jg penuh untuk seluruh tanah air. Pasti tidak seimbang dng tjita2 kita kalau perjuangan kita berhenti dng RIS. Kalau RIS kita djadikan titik terachkir bagi perjuangan kemerdekaan kebangsaan".⁸⁴⁾

Dengan kata lain RIS bukan perjuangan akhir bangsa Indonesia, karena sejak awal perjuangan adalah untuk mencapai kemerdekaan 100% atau kemerdekaan seutuhnya. kedaulatan sepenuhnya bukan kedaulatan yang dikurangi.

"Kemarin pagi djam 10 waktu dinegeri Belanda atau djam 5 sore waktu di Indonesia telah dilangsungkan upatjara penyerahan kedaulatan atas RIS di-istana Amsterdam dinegeri Belanda, dihadiri oleh anggauta2 kabinet Belanda, anggauta2 Eerste dan Tweede Kamer, pembesar2 Belanda dan para tamu dari luar negeri".⁸⁵⁾

Dengan demikian perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan kedaulatan yang telah dirampas tercapai, meskipun bukan akhir dari perjuangan. Karena dengan pengakuan kedaulatan tersebut berarti perjuangan baru telah dihadapi, yaitu perjuangan untuk menunjukkan dengan perbuatan bahwa terleburnya Republik Indonesia dalam RIS tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan.

Maka secara resmi penyerahan kedaulatan dilakukan di Amsterdam-Jakarta, pada tanggal 27 Desember 1949. Drs. Moh. Hatta selaku ketua delegasi yang bermandat penuh menerima penyerahan (pengakuan) kedaulatan dari tangan

⁸⁴⁾ KAWALAJARAN BAHASA, tanggal 27 Desember 1949.

⁸⁵⁾ KAWALAJARAN BAHASA, tanggal 28 Desember 1949.

Raja Belanda di Amsterdam, sementara di Jakarta diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai ketua delegasi RIS yang bertugas menerima pengakuan kedaulatan di Indonesia dari A.H.J Lovink sebagai delegasi Belanda.

Maka sejak itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia. Seperti tersebut dalam pidato Raja Juliana saat penyerahan kedaulatan, sebagai berikut :

"bahwa penyerahan kedaulatan ini adalah suatu kejadian penting, karena mulai hari ini akan berackirlah segala rasa permusuhan, tindakan2 jang berlawanan, dan segala luka dendam jang ada dikedua belah pihak".⁸⁶⁾

Dan segala apa yang telah tercapai oleh Negara Republik Indonesia menjadi bekal untuk mengembangkan hingga sempurna seperti yang dicita-citakan oleh setiap orang rakyat Indonesia.

C. Peran Kedaulatan Rakyat Hubungannya Dengan Perjuangan Bersenjata

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam usaha mempertahankan kemerdekaan untuk menegakkan kedaulatan Negara Republik Indonesia, rakyat Indonesia diharuskan menempuh dua jalan. Yaitu cara perundingan atau diplomasi dan cara kekerasan atau perjuangan fisik (bersenjata).

Telah dijelaskan pula tentang perjuangan lewat jalan perundingan, dimana **Kedaulatan Rakyat** berusaha memberita-

⁸⁶⁾ Ibid.



kan perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya guna menegakkan kedaulatannya. Melalui berita-berita tersebut, rakyat khususnya di Yogyakarta dapat mengikuti perkembangan perjuangan setiap hari.

1. Agresi Militer Belanda Pelanggaran Atas Perjuangan

Dibalik kehendak perdamaian yang dilakukan. pihak militer Belanda terus menerus melakukan usaha memperkuat pasukannya. Kesibukan mengangkut tentara dan macam-macam senjata di tengah-tengah perundingan. menunjukkan bahwa Belanda mempersiapkan kekuatan militernya. Selain menambah anggota tentara didatangkan dari negeri Belanda, pembentukan pasukan-pasukan baru dilakukan juga dengan mengambil penduduk Indonesia melalui bujukan atau paksaan.

Masuknya divisi 7 Desember secara bertahap ke Indonesia menjadi bukti bahwa Belanda tidak pernah menginginkan perdamaian. Dengan 12 buah kapal. diangkut 18000 serdadu dan 4000 serdadu penjaga, yang dilengkapi senjata modern, merupakan kekuatan yang dipersiapkan untuk menghancurkan Republik Indonesia dan untuk selanjutnya akan dikuasai kembali.

"Perang di tanah air kita roepanja soedah tidak dapat dielakkan".⁸⁷⁾

Perundingan-perundingan tidak mempunyai arti lagi. karena setiap persetujuan selalu diingkari oleh pihak Belanda. Jadi benar jika dikatakan perundingan bagi Belan-

⁸⁷⁾ Beberapa halat. tanggal 31 Juli 1947.

da menjadi cara untuk mengulur waktu. Dengan tujuan menguasai kembali Indonesia.

Berbagai alasan dibuat-buat pihak Belanda sehingga membenarkan tindakan agresi terhadap Indonesia. Baik agresi militer Belanda I maupun agresi militer Belanda II. sama-sama bertujuan menghancurkan Republik dan memasukan Indonesia sebagai negara bagian dari kerajaan Belanda. Dengan sasaran utama kota Yogyakarta yang pada masa revolusi fisik (1945-1949) berkedudukan sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Dengan anggapan hancurnya kota Yogyakarta. berarti hancur juga Republik Indonesia.

Adapun agresi militer Belanda yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan tanggal 19 Desember 1948, merupakan kelanjutan dari usaha perundingan antara Indonesia-Belanda yang tidak pernah dilaksanakan.

Seperti diketahui, agresi militer Belanda I terjadi setelah persetujuan Linggajati gagal dalam pelaksanaannya. Dimana terjadi penafsiran yang berbeda atas isi persetujuan. Yang dijelaskan juga dalam surat kabar **Kedaulatan Rakyat** tanggal 12 Nopember 1947 sebagai berikut :

"Kemungkinan ini dibesarkan lagi karena diperbolehkan kepada kedua belah pihak untuk menafsirkan naskah itu, menurut kesukaannya sendiri. Tafsiran ala Jonkman itu adalah akibatnya dengan segala konsekuensinya termasuk juga **politioneele aksi Belanda** !".⁸⁸⁾

Dengan menuduh Republik melanggar persetujuan Linggajati-

⁸⁸⁾ *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 12 Nopember 1947.

maupun persetujuan pemberhentian tembak menembak dan banyak alasan lain yang tidak terbukti. Sementara pihak Belanda secara terang-terangan melanggar persetujuan dengan dilancarkannya agresi militer I.

Kejadian tersebut terulang lagi dengan dilancarkannya agresi militer Belanda II. pada tanggal 18 Desember 1948. Persetujuan Renville yang ada, pada dasarnya lebih banyak memberikan kekuasaan wilayah pada pihak Belanda telah dilanggar dengan serangan militer di atas kota Yogyakarta. Setelah sebelumnya menuduh Republik Indonesia melanggar persetujuan Renville.

Maka jelas bagi kita, bahwa perjuangan dengan jalan perundingan tidak pernah memberi keuntungan pada Republik. Bahkan banyak memberi peluang bagi pihak Belanda untuk memaksakan keinginan di wilayah Republik.

2. Siasat Gerilya Republik Menghadapi Agresi Belanda

Gerakan militer secara besar-besaran telah dilakukan pihak Belanda. Gencatan senjata dan semua persetujuan tidak berlaku lagi bagi pihak Belanda. Aksi polisionil Belanda membuktikannya.

Seperti tersebut dalam bab III, bahwa pemerintah RI telah mempersiapkan rencana, dibidang militer dengan untuk menghadapi aksi militer Belanda. Yaitu pertahanan total dimana TNI menjadi kekuatan inti, dengan dukungan seluruh rakyat.

"Maka tibalah saatnja sekarang bagi seluruh rakjat menoeendjoekkan boektinja kepada negara. Sudah kehendak

Tuhan Jang Maha Esa bahwa kemerdekaan harus kita bela dengan harta benda, keringat, darah, dan jiwa raga".⁸⁹⁾

Seluruh rakyat, dalam arti setiap orang tanpa pandang pria atau wanita, tua atau muda, berkedudukan atau rakyat biasa dari semua lapisan pekerjaan ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan, menegakkan kedaulatan bangsanya.

Saat dimana rakyat menghadapi agresi militer Belanda. hal yang diperlukan adalah mempersatukan segenap kekuatan negara. Untuk itu sebagai pimpinan TNI. Panglima Besar Sudirman dengan tegas menyerukan kepada segenap angkatan perang, segenap anggota kepolisian negara, seluruh barisan kelasykaran dan barisan perjuangan, untuk bersatu menghadapi serangan musuh. Sehingga gembar gembor Belanda bahwa Indonesia lemah, tidak kuat, tidak teratur dan banyak kekacauan serta perselisihan. tidaklah benar.

Melalui perintah atau seruan dari PB. Sudirman seluruh kekuatan dipersatukan. Seperti tersebut dalam surat kabar

Kedaulatan Rakyat tanggal 7 Oktober 1946 sebagai berikut :

1. "Eratkanlah perhoeboengan kamoe sekalian selaku kekoeatan negara (Anggauta Angkatan Negara, Anggauta Polisi Negara, Anggauta Lasjkar dan Barisan Perdjoengan)
2. Adakan serta boelatkankanlah kerdja bersama diantara semoea kekoetan negara
3. Bantoelah sepenoeh-penoehnja tiap2 oesaha dari salah satoe kekoeatan kewadjiban terhadap negara, keloear dan kedalam.⁹⁰⁾

Dimana perjuangan yang dilakukan bukan untuk mewujudkan perjuangan salah satu golongan tetapi merupakan perjuangan

⁸⁹⁾ **Kedaulatan Rakyat**, tanggal 11 Juli 1946.

⁹⁰⁾ **Kedaulatan Rakyat**, tanggal 7 Oktober 1946.

yang wajib dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu senjata bumi hangus total, perjuangan rakyat total, harus dijalankan diseluruh front.⁹¹⁾

Pisetiap front tentara dan rakyat berjaga-jaga. Cara perjuangan rakyat dan tentara tidak berhadap-hadapan seperti pada umumnya pasukan dengan pasukan, tetapi secara gerilya. Dengan mempertahankan daerah-daerah diluar kota pendudukan. memancing musuh meninggalkan kota, masuk ke desa melakukan serangan atau pembersihan. Maka Belanda telah melanggar cease fire order, dan pada saat itulah tentara dan rakyat menyergap menghancurkan musuh.

Didukung kesatuan tekad antara rakyat dan tentara, siasat gerilya berhasil menghadapi aksi militer Belanda. Kembalinya kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 menjadi bukti siasat gerilya memang tepat. Untuk mendukung siasat tersebut pertahanan daerah sangat diperlukan, terutama daerah yang dikuasai, seperti Yogyakarta. Pertahanan dalam arti seluas-luasnya, baik mengenai angkatan perang, maupun mengenai perekonomian dan keamanan.⁹²⁾

Pada masa revolusi, tentara yang bertugas di Yogyakarta terutama Divisi III. Dengan 3 Brigade, 9 Resimen, 38 Batalyon infanteri dengan 2 pucuk meriem bantuan.

Sebelum melaksanakan siasat gerilya, pernah digunakan

⁹¹⁾ Lendayasan Rakyat, tanggal 12 Agustus 1947.

⁹²⁾ Lendayasan Rakyat, tanggal 12 Agustus 1947.

siasat linier yang tidak membawa hasil. Karena, siasat yang dilaksanakan sebelum agresi I itu tidak dipersiapkan baik secara ekonomi, militer maupun politik.

Selanjutnya, dalam menghadapi agresi II, sejak tanggal 19 Desember 1948 semuanya telah dipersiapkan. Pertahanan daerah dan pemerintah militer telah dibentuk menjadi satu kekuatan. Sehingga Republik dapat dipertahankan secara de facto, dengan kekuasaan Panglima Besar atas seluruh Jawa dan Sumatera.

Untuk membulatkan kekuatan pada satu tangan, dibentuk juga propinsi militer (4) dan Gubernur Militer yang merangkap sebagai Panglima Divisi. Wahr-kreise dibentuk di setiap karisidenan, dapat dikatakan dalam menghadapi agresi militer Belanda II, perjuangan rakyat Indonesia telah mencapai tingkatan yang sempurna.

Dapat dikatakan bangsa Indonesia tidak mau mengalami lagi menjadi bangsa terjajah. Untuk itu pengalaman menghadapi agresi militer Belanda I menjadi pelajaran untuk menghadapi serangan berikutnya. Yaitu agresi militer Belanda II yang sudah diperkirakan akan terjadi. Kenyataan terjadi, dengan siasat baru yaitu siasat gerilya rakyat menghadapi musuh dan berhasil mempertahankan kemerdekaan menegakkan kedaulatan bangsa.

BAB V

KESIMPULAN

Pada bab V ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dari skripsi berjudul "Peranan Surat Kabar **Kedaulatan Rakyat** Sebagai Sumber Sejarah Masa Menegakkan Kedaulatan (1945-1949)", sebagai berikut :

Pertama. Menjadi momen penting bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia bahwa kota Yogyakarta pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Ditahun antara 1945-1949 telah terjadi banyak peristiwa berkaitan dengan tegaknya kedaulatan Indonesia. Di kota Yogyakarta rakyat semesta berjuang ikut ambil bagian untuk menyelamatkan tegaknya kedaulatan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, sejak tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan Jepang dan terusirnya kolonial Belanda telah menjadi bencana baru yang telah memberi sumbangan besar bagi tumbuhnya nasionalisme rakyat Indonesia.

Tersebarluasnya berita proklamasi di kota Yogyakarta melalui Kantor Berita Domei cabang Yogyakarta dan surat kabar **Kedaulatan Rakyat**, menjadi berita menggembirakan seluruh rakyat. Berbagai reaksi ditunjukkan sebagai wujud rasa gembira rakyat atas kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan. Segera setelah pasti dan yakin, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan dukungan seluruh rakyat menge-

luarkan Amanat 5 September 1945 yang pada dasarnya memberi dukungan pada pemerintah Republik. Tindakan yang sama dilakukan oleh Sri Paku Alam VIII, diikuti keluarnya Amanat 30 September 1945, yang menguatkan amanat sebelumnya.

Tindakan lain sebagai reaksi rakyat atas Proklamasi kemerdekaan adalah tindakan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang yang terang-terangan tidak mau mengakui bahwa Indonesia sudah menjadi negara merdeka. Bermula dari Gedung Agung, pada tanggal 21 September 1945 yang telah melibatkan tokoh perintis berdirinya Kedaulatan Rakyat, bapak Samawi. Dan mencapai puncak di Kotabaru pada tanggal 7 Oktober 1945 yang menjadi tangsi Jepang.

Untuk menampung semangat rakyat . serta menyatukan kekuatan kemudian dibentuk satuan-satuan keamanan. Sebagai satuan awal dibentuk BKR pada tanggal 20 Agustus 1945 sebagai BPKKP, dan untuk daerah Yogyakarta dipimpin oleh R.P. Sudarsono. Dibentuk juga kelasykaran-kelasykaran seperti DPRI, BPRI dengan dasar Maklumat No. 5/1945 tertanggal 26 September 1945, dan Maklumat No. 8/1945 tertanggal 7 Desember 1945 sebagai peraturan tentang perubahan keanggotaan. Dalam perkembangannya berdasar Ketetapan Presiden tanggal 5 Mei 1947 terbentuk TNI, yang sebelumnya bernama TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berdasar Maklumat no. 5/1945 menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada tanggal 1 Juni 1946 dan bernama TRI (Tentara Republik

Indonesia).

Untuk membantu menjalankan pemerintahan kemudian dibentuk KNI, untuk daerah Yogyakarta dipimpin Soedarisman Poerwokoesoemo. KNID ini pada awalnya menjadi badan penggerak yang mengkoordinir rakyat, sehingga gerakan rakyat menjadi terarah. Sedangkan sebagai badan legislatif, kemudian digantikan oleh DPR Daerah yang dibentuk berdasar Maklumat no. 18 tahun 1946.

Kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 kenyataannya masih mendapat ancaman. Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II menjadi bukti usaha Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Namun demikian pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia atas RIS.

Kedua. Penting kiranya diungkapkan, bahwa dengan latar belakang situasi kota Yogyakarta masa revolusi, perjuangan rakyat mendapat dukungan sepenuhnya dari media massa yang berfungsi sebagai sarana perjuangan. Lahirnya surat kabar **Kedaulatan Rakyat** pada tanggal 27 September 1945 menjadi sarana penting bagi perjuangan rakyat sepenuhnya. Dan **Kedaulatan Rakyat** yang lahir dengan tujuan perjuangan, dipengaruhi oleh jiwa nasionalisme para pemimpinnya akhirnya menjadi pendukung perjuangan rakyat Yogyakarta. Tidak hanya melalui berita-berita yang disuguhkan setiap hari perjuangan **Kedaulatan Rakyat** ditunjukkan juga oleh keikut-

sertaan para wartawannya dalam kaneah perjuangan fisik. Peristiwa tanggal 21 September 1945 melibatkan Samawi, keikutsertaan Wonohito dalam KMB menjadi bukti. Sambil berjuang, berita dikumpulkan, dieusun dan sampai pada pembacanya setelah diproses menjadi berita dalam surat kabar.

Dari berita-berita perihal perjuangan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara pemerintah, **Kedaulatan Rakyat** dan rakyat. Hubungan yang dihasilkan merupakan hubungan saling menguntungkan, sesuai kedudukan dan fungsi masing-masing antara ketiganya.

Ketiga. Sebagai surat kabar yang lahir dan dilahirkan oleh revolusi, **Kedaulatan Rakyat** menjadi senjata bagi para pejuang. Melalui berita-berita yang ditampilkan, mampu menjadi alat pengobar semangat juang rakyat, disamping menjadi sarana pendidikan. Karena dengan surat kabar keinginan rakyat untuk selalu mengikuti setiap peristiwa sekitar perjuangan menjadi terpenuhi. Hal itu berarti keinginan untuk membaca juga meningkat, dan fungsi pendidikan surat kabar tampak pada semakin banyaknya orang yang dapat membaca. Sekaligus menambah pengetahuan si pembaca terutama pengetahuan tentang setiap peristiwa sehubungan dengan perjuangan bangsa.

Jadi secara tidak langsung surat kabar **Kedaulatan Rakyat** telah memudahkan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Dan memudahkan pemerintah untuk mengorganisirnya,

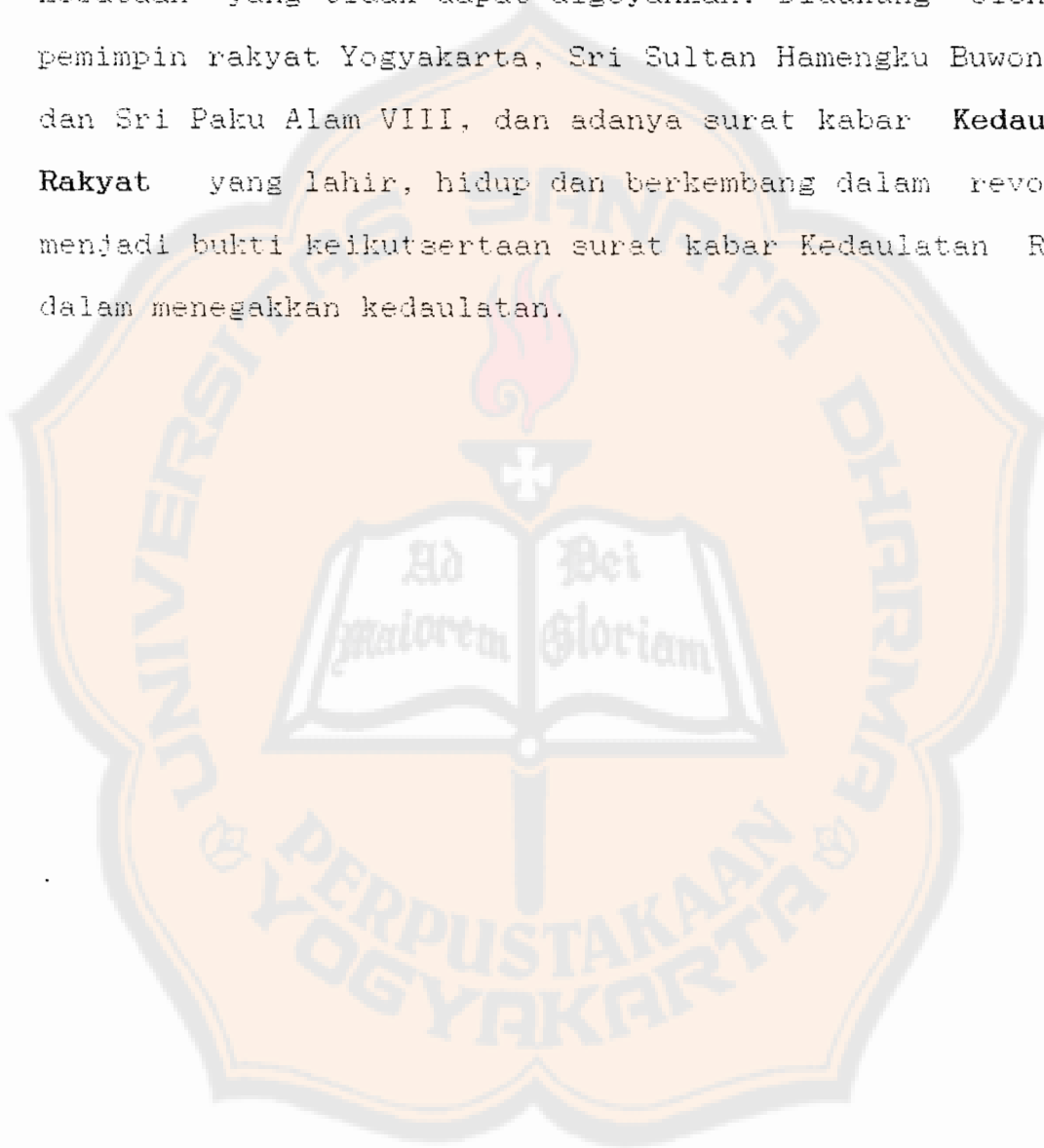
sehingga kesatuan dan persatuan dapat dipertahankan. Dari surat kabar itu juga reaksi rakyat dapat dipancing dan pendapat-pendapat dapat dimunculkan. Dibuktikan dengan sikap dan tindakan rakyat setiap kali ada pengumuman-pengumuman dari pemerintah.

Selain fungsi-fungsi tersebut, semasa perjuangan menegakkan kedaulatan, **Kedaulatan Rakyat** telah menunjukkan peran sertanya. Terutama dengan pemberitaan-pemberitaan tentang usaha perundingan yang selalu mendapat rintangan dari pihak Belanda. Gagalnya pelaksanaan persetujuan Linggajati maupun persetujuan Renville atau perjanjian-perjanjian lainnya, bukan tanpa sebab. Sebab yang datang terutama datang dari pihak Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Gagalnya perundingan dilanjutkan oleh Agresi Militer, yang memang diinginkan oleh pihak Belanda untuk segera menghancurkan RI. Dan tindakan Agresi yang dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947 dan tanggal 18 Desember 1948. menjadi bukti dunia adanya pelanggaran atas kemerdekaan suatu bangsa.

Keberhasilan siasat gerilya rakyat menghadapi Agresi Militer Belanda, membawa pada pengakuan pihak Belanda atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Dinyatakan pada tanggal 27 Desember 1949 di tiga tempat, yaitu Amsterdam, Jakarta dan Yogyakarta yang diterimakan pada Mohammad Hatta (Amsterdam) dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

(Jakarta). Dengan demikian kedaulatan Indonesia kembali ketangan rakyat Indonesia. Dan perjuangan antara rakyat dan pasukan-pasukan keamanan menjadi wujud persatuan dan kesatuan yang tidak dapat digoyahkan. Didukung oleh dua pemimpin rakyat Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, dan adanya surat kabar **Kedaulatan Rakyat** yang lahir, hidup dan berkembang dalam revolusi, menjadi bukti keikutsertaan surat kabar Kedaulatan Rakyat dalam menegakkan kedaulatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmadi, T.
1985 Bunga Rampai. Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia. Jakarta : PT. Pantja Simpati.
- Ahmaddani G. Martha
1985 Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta : Kurnia Esa.
- Bambang Sadono
1993 Penyelesaian Delik Pers Secara Politis. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Darmosugito
1955 Kota Yogyakarta 200 Tahun. Jogjakarta : Jawatan Penerangan DIY.
- Hamzah, A.
1987 Delik-Delik Pers Indonesia. Jakarta : PT. Media Sarana Press.
- Hardjono, R.
t.th Pedoman Ringkas Sejarah Jepang. Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma.
- Koentjaraningrat
1977 Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia.
- Kurniawan Junaedhie
1991 Ensiklopedi Pers Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusworo, FX., JB. Margantoro, Ronnie S Viko
1994 Dibalik Tugas Kuli Tinta. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Utama.
- Moedjanto, G.
1988 Indonesia Abad ke-20 jilid 2. Yogyakarta : Kanisius
- Moedjanto, G.
1994 Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Yogyakarta : Kanisius.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto
1992 Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka.
- Onong Uchajana Effendi
t.th. Dinamika Komunikasi. Bandung : Remadja Karya C.V.

- Peerboom, Robert
1970 Surat Kabar. Bandung : Alumni.
- Purnawan Tjondronegoro
1976 Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku. Jakarta : Balai Pustaka.
- Poerwadarminto, W.J.S
1980 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rachmadhie, Tony S.
1985 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sumanang
1952 Beberapa Soal Tentang Pers dan Journalistik. Jakarta : Balai Pustaka.
- Susanto, Phil Astrid S.
1977 Komunikasi Kontemporer. tt. : Binacipta.
- Subagijo I.N.
1981 Jagad Wartawan Indonesia. Jakarta : Gunung Agung.
- Sartono Kartodirdjo
1982 Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Jakarta : Gramedia.
- Smith, Edward C.
1983 Pembreidelan Pers Di Indonesia. Jakarta : Pustaka Grafitipers.
- Soedarisman Poerwokoesoemo
1984 Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suwarno, P.J.
1994 Hamengku Buwono IX Sistem Birokrasi Pemerintah Yogyakarta 1942-1974. Yogyakarta : Kanisius.
- Tashadi dkk.
1986 Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Di DIY. Yogyakarta : Dep. Dik. Bud. DIY.
- Taufik Abdullah (ed.)
1990 Sejarah Lokal Di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wild, Colin dan Peter Carey
1986 Gelora Api Revolusi. Jakarta : PT. Gramedia.

- t.th. Kritis Mengupas Surat Kabar. Djakarta : Sekretariat Nasional K.M./C.LC.
- 1958 Sekilas Perdiungan Surat kabar. Djakarta : S.P.S.
- 1985 Yogya Benteng Proklamasi. Badan Musyawarah MUSEA.
- 1992 Buku Panduan Museum Benteng Yogjakarta. Yogyakarta : Dep. Dik. Bud. DIY.
- t.th. Kedaulatan Rakyat 40 Hari Selewat Proklamasi. Djogdjakarta : Kedaulatan Rakjat.



SURAT KABAR

Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 Mei 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 30 Mei 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 31 Mei 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 16 September 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 21 September 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 4 Oktober 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Oktober 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 8 Oktober 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 12 Oktober 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 15 Oktober 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 18 Oktober 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 23 Oktober 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 5 Nopember 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Nopember 1946
Kedaulatan Rakyat, tanggal 16 Mei 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 17 Mei 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 17 Juni 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 21 Juli 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 25 Juli 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 22 Agustus 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 Agustus 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 13 September 1947
Kedaulatan Rakyat, tanggal 19 September 1947

Kedaulatan Rakyat, tanggal 5 Oktober 1947

Kedaulatan Rakyat, tanggal 9 Oktober 1947

Kedaulatan Rakyat, tanggal 11 Nopember 1947

Kedaulatan Rakyat, tanggal 12 Nopember 1947

Kedaulatan Rakyat, tanggal 13 Nopember 1947

Kedaulatan Rakyat, tanggal 1 Desember 1948

Kedaulatan Rakyat, tanggal 13 Desember 1948

Kedaulatan Rakyat, tanggal 27 Desember 1949

Kedaulatan Rakyat, tanggal 28 Desember 1949

Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 Juni 1995

Kedaulatan Rakyat, tanggal 23 Juli 1995

Kedaulatan Rakyat, tanggal 6 Agustus 1995

Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 Agustus 1995

Kedaulatan Rakyat, tanggal 3 September 1995

Kedaulatan Rakyat, tanggal 26 September 1995

Kedaulatan Rakyat, tanggal 27 September 1995

DAFTAR INFORMAN

A. Bapak Soemadi M Wonohito

Tanggal : 21 Nopember 1995

Tempat : Jln. P. Mangkubumi 40-42, Yogyakarta

Jabatan : Direktur Utama PT. BP. Kedaulatan Rakyat

Dari hasil wawancara penulis mencoba menuliskan kembali sebagai berikut :

Pertama. Sistim organisasi SKH **Kedaulatan Rakyat** pada zaman kemerdekaan antara tahun 1945-1949 mengalami perkembangan dan pergantian. Awal berdirinya **Kedaulatan Rakyat** dipimpin oleh Alfonsusu Bramono sebagai pemimpin redaksi, kemudian Sumantara. Lantaran para pemimpin **Kedaulatan Rakyat** ini sibuk di peperangan dan sering meninggalkan redaksi, bahkan ada yang kemudian menerbitkan majalah sendiri maka kekosongan ini kemudian diisi H. Samawi. Kemudian dalam perkembangan sejarah Samawi dibantu Wonohito. Dan dua nama terakhir ini menjadi dua serangkai yang gigih mengembangkan SKH **Kedaulatan Rakyat** di zaman Orde Lama maupun Orde Baru.

Dan sistem yang dipakai oleh penerbitannya waktu itu semacam koperasi. Sedangkan sistim pencetakannya menggunakan sistem "cetak tinggi" dengan mesin cetak datar kemudian tahun 1950-an diganti mesin Duplex.

Kedua. Cara memperoleh berita luar daerah dan luar negeri, **Kedaulatan Rakyat** sendiri mengirimkan wartawan perangnya ke beberapa front (garis depan), mereka ini

kemudian mengirimkan berita setelah kembali ke Yogyakarta. Karena transportasi masih sulit perjalanan memakan waktu lama. Diperoleh pula berita telegram dari Kantor Berita Antara yang sudah menggunakan semacam telegram. Mengenai berita luar negeri dari radio. Selain itu para pemimpin perang pun sering menggunakan koran untuk memberikan perintahnya. Ketika Belanda menduduki Yogyakarta, dan percetakan **Kedaulatan Rakyat** ikut dirampas. **Kedaulatan Rakyat** pun ikut bergerilya bersama beberapa mesin cetaknya yang bisa dibawa. Mesin cetak ini kemudian digunakan untuk mencetak pamflet untuk mengobarkan semangat perjuangan, disamping memberitahukan bahwa tentara Indonesia masih ada.

Ketiga. Berita-berita yang dimuat **Kedaulatan Rakyat** diperoleh dari wartawan sendiri, radio, telegram Antara, informan, para pemimpin pejuang kemerdekaan, keluarganya dll.

Keempat. Kendala-kendala yang dihadapi **Kedaulatan Rakyat** waktu itu adalah sulitnya peralatan cetak, mengingat Indonesia ketika itu diembargo ekonomi. Barang-barang serba sulit, mahal. Apalagi untuk percetakan. Situasi pertentangan antara kaum republik sendiri juga membuat pusing para pengelola **Kedaulatan Rakyat** yang harus bersikap dewasa pada waktu itu. Kendala lain adalah soal transportasi yang sulit. Aktualisasi berita menjadi terhambat.

Kelima. Hubungan **Kedaulatan Rakyat** dengan pemerintah

daerah amat erat dan baik. Bahkan nama **Kedaulatan Rakyat** diberikan oleh KPH Poerwokoesoemo, seorang pimpinan KNID. merangkap "Pencarwara" Kraton Yogyakarta.

Mengingat Yogyakarta pernah jadi ibukota republik ini, maka **Kedaulatan Rakyat** pun pernah menjadi koran ibukota. Dan hubungan baik antara pemimpin negara dengan wartawan **Kedaulatan Rakyat** amat erat. Ini terlihat, Bung Karno sering memanggil Pak Samawi maupun Pak Wonohito untuk bertukar pikiran. Bahkan ketika Konferensi Meja Bundar Pak Wonohito ditunjuk pemerintah untuk ikut serta berunding. Demikian juga terjadi dengan Bung Hatta. Pada suatu ketika Bung Hatta singgah ke toko buku **Kedaulatan Rakyat** hanya untuk membeli tinta Cina.

B. Romo Dick Hartoko

Tanggal : 28 Juni 1995

Tempat : Jln. Abu Bakar Ali no. 14 Yogyakarta

Jabatan : Redaktur Majalah BASIS (1957-1995),
Budayawan

Pertama. Bahwa sebutan pers daerah mempunyai konotasi agak pelosok. Seperti diketahui Yogyakarta pernah menjadi ibukota Republik Indonesia, keberadaan surat kabar daerah menjadi sangat penting terutama sebagai sumber informasi bagi daerah Yogyakarta sendiri. Dengan berita nasional yang ada kaitannya dengan Yogyakarta. Sehingga tidak hanya Jakarta saja yang mempunyai surat kabar dengan berita-

berita nasional atau Jakarta sebagai sumber berita yang bersifat nasional. Karena apa yang terjadi di daerah sebetulnya penting untuk nasional. Dan tidak semua ditujukan untuk nasional tapi juga daerah .

Kedua. Mengenai kedudukan pers nasional tergantung pada apakah sifat pers nasional mempunyai kontak dengan daerah atau tidak. Dan surat kabar daerah akan menjadi lebih populer jika ada kontak langsung dengan apa yang ada dalam pikiran orang daerah.

Ketiga. Keberadaan pers daerah dipengaruhi oleh pers nasional, tetapi tidak selalu memandang Jakarta sebagai pusat, karena pers daerah tetap mempunyai otonomi. Seperti pers Bandung dan Surabaya.

Keempat. Untuk fungsinya, fungsi mendidik sudah pasti ada. Dan sebagai sumber informasi pers pada umumnya harus mempunyai pendamping, untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Ditahun 1945-1949, fungsi tersebut sangat dominan, terutama dalam strategi perlawanan. Sedang fungsi mempengaruhi ada jika pers itu mau. Dan di masa revolusi pada umumnya dipengaruhi juga oleh lagu Indonesia Raya yang kemudian dilarang. Karena penjajahan, berita-berita yang dihasilkan mampu mempengaruhi pembacanya, secara tidak langsung.

Kelima. Hubungannya dengan pemerintah sangat erat, karena pemerintah merupakan pusat perlawanan. Khusus mengenai Jogja yang dekat dengan presiden dan Sultan, banyak data yang diperoleh dari mereka, dimana data-data itu tidak ada di Jakarta.

Lampiran-Lampiran



Kedaulatan Rakyat, 29 Mei 1946

KEDALAM MAOEPOEN KELOEAR
KITA TETAP KOEAT

Kesehaloean paham antara Ra'jat dan Pemerintah. Kontra oesoel kepada Belanda?

Keterangan P. M. Sjahrir.

APAKAH kedoeoekan kita makin lama makin lemah, baik di dalam negeri, maoepoen diloeat negeri, saja dapat berkata, bahwa kedoeoekan kita sekarang, diloeat maoepoen didalam negeri makin koeat daripada beberapa waktoe jang laloe." Demikian Perdana Menteri Sjahrir menjatakan kepada wartawan2 dalam pers konferensi sesoeah sidang antara delegasi Konsentrasi Nasional dengan Kabinet pada tg. 28 Mei petang digedoeng kediaman Presiden.

Tentang sidang delegasi Konsentrasi Nasional dengan Kabinet pada hari itoe, beliau menjatakan, bahwa kesehaloean paham politik Pemerintah dan Konsentrasi Nasional jang menggaboengkan sekoeroeh partai2 politik dan gerakan2 serta serikat2 telah terdapat. Pendirian Konsentrasi Nasional menjokong Pemerintah oentoek menjalankan program Pemerintah.

Beliau menjatakan, bahwa pada moelanja ada keinginan beberapa pihak oentoek membentoe satoe Koalisi Kabinet, tetapi setelah fikiran itoe diperoendingkan, Perdana Menteri sendiri menjatakan, bahwa pada waktoe ini dipandangnya perloe oentoek memperkoeat Nasional Kabinet kita. Dalam pada itoe beliau menjatakan, bahwa ada tiga lowongan dalam Kabinet jaitoe oentoek Kementerian Kehakiman, Kementerian Pertanian dan Persediaan dan Kementerian Pengadjaran.

Soal penting jang dibitjarakan dalam pertemoean delegasi itoe ialah: membitjarakan sikap politik kita kedalam dan keloeat negeri, serta mentjari djalan oentoek makin memperkokoh kedoeoekan kita dengan mempergoenakan dan mempersiapkan semoga tenaga masyarakat dan Pemerintah, teroetama tenaga militer oentoek men-

dapatkan satoe sentralisasi komando seperti sekarang soeahan dimoelai.

Terhadap oesoel2 Belanda jang lebih rendah itoe, Perdana Menteri menjatakan, bahwa hal itoe diroendingkan djoega dalam pertemoean dengan delegasi itoe dan moengkin sekali kita mengadakan satoe kontra oesoel jang sama sekali tidak perloe menjimpang dari program kita.

Atas pertanjaan: bagaimanakah nanti djika Belanda mengambil djalan kekerasan dalam menghadapi kedoeoekan kita ini, Perdana Menteri menjatakan: "Saja sama sekali tidak koeatir. Menoeeroet fikiran saja, djika Belanda mengambil djalan kekerasan, tjara Belanda ini malahan akan lebih meroegikan mereka sendiri".

Dalam pada itoe beliau menjatakan, bahwa tekanan terhadap Belanda itoe sekarang lebih keras. Memang nampaknja orang diloeat negeri tidak membitjarakan tentang kita kembali, tetapi selama ini tindakan kita dilapang politik tidak nampak tanda2nja mendapat tampanan. Bahkan tindakan kita memberikan beras kepada India, sedang India moengkin sementara hari lagi akan mendapat pemerintahan sendiri, tindakan itoe memboeka djalan boeat kita.

Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 1946

WASPADALAH BERKENAAN DENGAN TIPOE-MOESLIHAT MEME- TJAH-BELAH.

Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu!
Front perdioe ngan kita bermatjam-matjam sifatnja.

DJAWA-BARAT, 29-5-'46.

IJIPTONING menoeelis sbb.:
Kita semoea ma'oem, sendjata Belanda jang paling berbahaya boekanlah sendjata perangnja pindjaman dari Inggeris ataupun Amerika, melainkan sendjata haloesnja, ialah siasat mereka memetjah-belahkan barisan kita. Sendjata ini boekanlah sendjata baroe, melainkan sendjata „poesaka“, toeroen-temoeroen diwariskan oleh Pieter Both hingga kepada van Mook - van der Plas.

Memang tidak salah kalau kita memindjam kalimat dari pada saja'ir Schiller jang terkenal, dan mengatakan: bahwa siasat memetjah-belah itoe adalah „eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu!“

Sendjatanja sendjata lama, soedah berkali-kali dipergoenakan oleh Belanda, dan senantiasa berhasil dapat memetjahkan barisan kita. Karena apa? Karena kita koerang waspada, sebagai halnja seorang pemoea jang boeat pertama kalinja djatoeh tjinta dan menoeomboek-noemboek tidak karoean arah haloeannja.

Divide et impera oentoek merobohkan Indonesia Merdeka.

Bahwa didalam alam kemerdekaan sekarang ini sendjata Belanda jang terkenal sakti itoe, dipergoenakan mereka lagi, itoe soedah terang. Belanda mengerti, bahwasanja dengan kekoeatan sendjata, mereka ta' akan dapat merobohkan Repoeblik Indonesia.

Oleh karena itoe, maka kembalilah mereka kepada sendjata jang soedah terboekti kasiatnja, ialah sendjata memetjah belah.

Kita masih ingat, bahwa tidak lama sesoedah kita memproklamakan kemerdekaan kita, banjak sekali orang Indonesia kita tangkapl, karena kita tjoerigakan mereka adalah agen Nica.

Boektinja, ada tjap merah poeth biroe ditanganja, didadanja, dilidahnja, dan ditempat jang aneh2 lagi.

Kalau kita kenangkan sekarang, aneh benar! Masakan agen Nica memakai tanda jang begitoe menjolok mata, kalau memang benar mereka agen Nica! Maksoed Belanda tentoe tiada lain ialah akan mengatjaukan barisan kita, agar kita saling tjoeriga-mientjoerigai, sehingga tiadalah dapat dibentoe persatoean jang koeat.

Itoelah siasat memetjah-belah jang oemoem, tetapi ada poela siasat memetjah-belah jang choesoos, special dipergoenakan akan memisahkan satoe golongan jang tertentoe dari rakjat seloeroehnja.

Oesaha memetjah-belah jang choesoos.

Oesaha memetjah-belah jang choesoos ialah misalnja jg dipergoenakan akan memisahkan saudara2 Ambon dan Menado dari pada bangsa Indonesia jang lain-lainnja. Akibat dari pada tipoe-moeslihat itoe ialah, bahwa seliap anak Ambon ataupun Menado ditjoerigai oleh saudara-saudaranja bangsa Indonesia jang lain. Mereka sembea ditjap Nica! Dan loepalah orang pada oemoennja, bahwa diantara Nica-inlander, banjak djoega orang Djawa, orang Soenda, orang Soematera, orang Makassar.

Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 1946

Maka dengan demikian berhasillah tipoe-moeslihat Belanda.

Oentoeng kita semocanja sekarang soedah insjaf, bahwa kita tersesat.

Saudara2 dari Api-Ambon, sekarang P.I.M., dan Kris, ternyata tidak kcerang hebat perdjoeangan-nja dari pada saudara2 lainnja. Siapa jg bertahan di Dajeuhkolot? Saudara2 Ambon! Siapa jang menggemparkan di gang Sentiong? Saudara2 Kris!

Djawa-Barat, Bandoeng, Tjiandjoer.

Kemoedian roepanja Djakarta, dan Bandoeng didjadikan boelan-boelanan oleh Belanda. Kabar disiarsiarkan orang, bahwa pendoeboek Djakarta dan Bandoeng adalah mata-mata moesoe. Kita masih ingat, betapa soesahnja orang Djakarta dan Bandoeng melakoe-kân perdjalanann didaerah Djawa-Tengah dan Timoer. Tidak djarang mereka mengalami kesoesa-han oleh orang2 kita sendiri, dan paling sedikit mereka disamboet dengan edjeikan. „Wah, ada anak daerah djadjahan ini!”

Pengalaman seorang gadis terpeladjar patoet dikemoekakan sebagai tjermin. Nona K., oleh Kementerian Penerangan dikirim ke Bali. Soedah terang oentoek kepentingan negara. Dipoe lau Bali dia ditawan oleh Djepang, dan baroe bisa kembali ke Djawa, setelah ditoe kar dengan Djepang dari Banjoewangi.

Tetapi apakah jang kedjadian? Di Banjoewangi nona K. ditawan oleh orang2 kita sendiri. Alasannya, karena dia dari Djawa-Barat!

Pada achir2 ini roepanja Tjiandjoeriah jang didjadikan boelan-boelanan oleh pihak lawan. Kabar disiarkan, orang2 Tjiandjoer semoea mata-mata!

Disetasioen-setasioen malah kabarnya ada instroeksi soepaja menahan penoe mpang kereta api jg. asalnja dari Tjiandjoer! Sebab semoea orang Tjiandjoer adalah mata2, sebab mereka soedah menjerahkan kotanja dengan tiada perlawanan.

Doedoe knja perkara.

Padahal, bagaimanakah doe-goeknja perkara jang sebenarnja.

Pertama-tama bisalah dimadjoekan pertanjaan: „Apa bisa djadi satoe kota djadi mata-mata, sehingga setiap orang Tjiandjoer haroes diamat-amati?”

Hal itoe sadja soedah agak gancang! Dan moerah benar semangat Indonesia!

Faktor pertama jang haroes diingat ialah: persendjataan Tjiandjoer hanja sedikit sekali. Hanja beberapa poetjoek karabijn, gra-nat tangan, dan selandjoethja golok, bamboe roentjing dan panah.

Faktor kedoea, pemimpin2 pasoe kan dari loear Tjiandjoer koerang-berhoeboengan dengan pemimpin2 pasoe kan Tjiandjoer sendiri, sehingga tiadalah terdapat koordinasi jang betoel.

Persendjataan jang koerang, ditambah poela dengan tidak adanja koordinasi, soedah barang tentoe hasilnja nihil.

Tetapi bahwa semangat pendoeboek Tjiandjoer tidaklah loentoer, njata sekali dari pada perboeatan - perboeatannja hendak menghalang-halangi perdjalanann konvool. Didjalan antara Patjet - Tjipatat, ditempat jang djalannja hanja menempel kepada goenoeng, seperti setagen dipinggang wanita, disitoe djalannja digali oleh pendoeboek. Akibatnja, djalannja hilang sama-sekali, sehingga beberapa lamanja konvool tidak bisa djalan.

Kemoedian dari pada itoe, pada soeatoe malam 2.000 orang berkoempoel didjalan Patjet — Tjipatat, dan bersama2 mereka menebang poehoen kajoe jang besar2, sehingga ketika konvool datang disitoe kedapatan djalannja tertoe-toep oleh 100 batang kajoe besar2, dan mereka haroes membersihkan bagian djalan itoe lk. 500 m. pandjangnja.

Sekarang sebagian djalan diloe ar kota Tjiandjoer ada tentera pendoeboekannja, apakah pendoeboek Tjiandjoer tidak menangs hatinja? Apakah mereka tidak lebih soeka kotanja bebas dari pada pendoeboekannja? Pasti! Dan mereka sekarang menderita batin.

Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 1946

SAJA TIDAK KOEATIR GERTAKAN BELANDA.

Keterangan P.M. Sjahrir.

JOGJAKARTA 31-5 (Antara).

SEBHABIS Perdana Menteri dan Menteri2 lainnja mendengarkan interpelasi Badan Pekerdja K.N.I. Poesat di Poerworedjo, pada tg. 30-5 siang dilangsoengkan sidang Kabinet di Istana Presiden Jogja.

Memoeroet keterangan Perdana Menteri sidang Kabinet akan teroes diadakan oentoek meroendingkan soal2 jang beloem djelas, sehingga soal2 itoe mendjadi terang setera2nja.

Tentang interpelasi Badan Pekerdja K.N.I. Poesat beliau menerangkan bahwa dalam interpelasi itoe dikemoekakan soal2 jang mengenai politik, ekonomi, dan peroendingan dengan Belanda. Beliau berpendapat bahwa oentoek menjempoernakan perhoeboengan antara K.N.I. Poesat dengan Pemerintah perloe sekali K.N.I. Poesat berada ditempat jang sedekat2nja dengan Pemerintah.

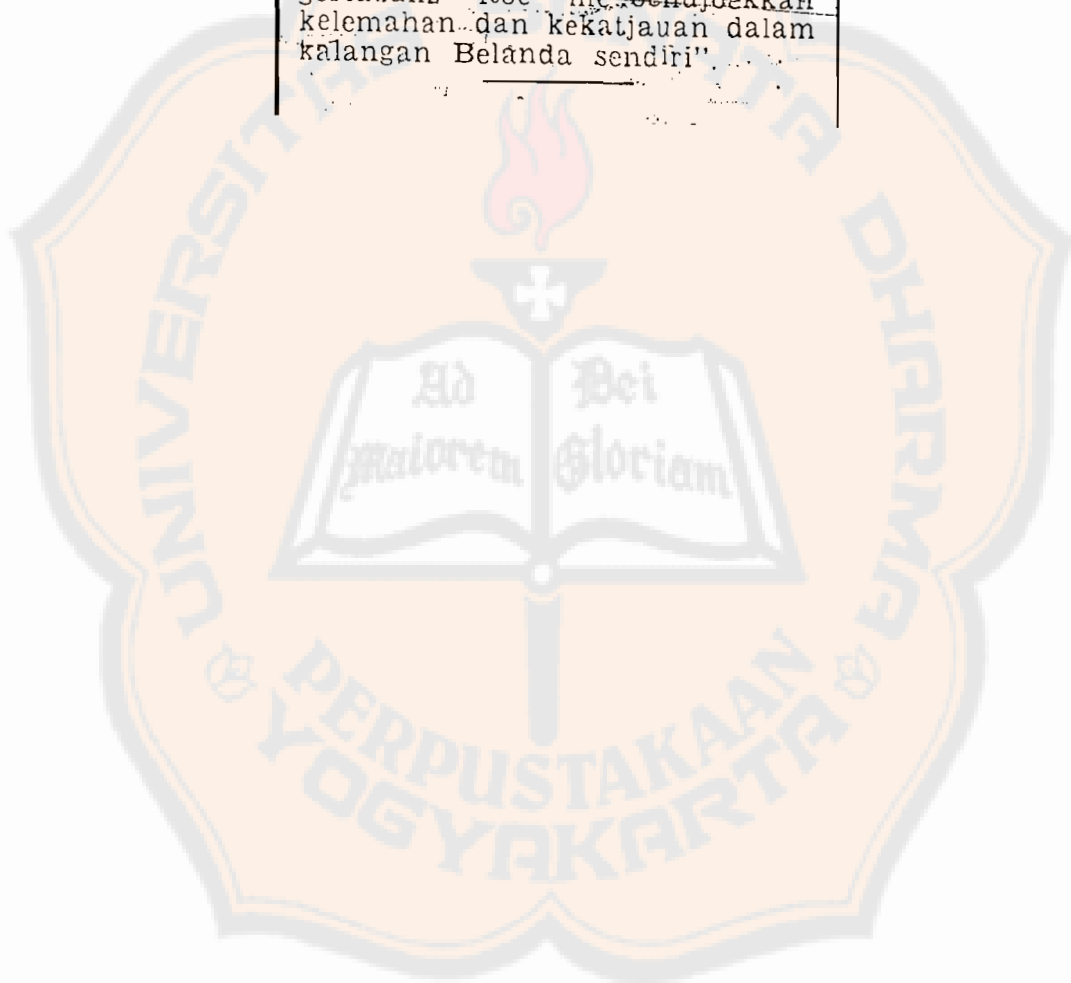
Oleh karena tempat K.N.I. Poesat dan Pemerintah berdjaeohan, maka seringkali tindakan2 kita dari loear tampaknja bermatjam2, tetapi sebenarnja toedjearanja sama. Berhoeboeng dengan itoe maka akan dioesahkan agar soepaja Badan Pekerdja K.N.I. Poesat tinggal disatoc tempat dengan Pemerintah.



Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 1946

Atas pertanyaan wartawan: „Apakah mungkin Belanda tidak mau berunding lagi jika perundingan Indonesia Belanda gagal, dan apakah mungkin perundingan ini menghadapi jalan boen-toe?“, Beliau menjawab bahwa semoea itoe ada kemungkinannja, tetapi soal itoe kini beloem terang, sama sekali.

Selandjoetnja P. M. berkata, bahwa beliau tidak chawatir terhadap gertakan2 Belanda, sebab gertakan2 itoe mesoendjoekkan kelemahan dan kekatjauan dalam kalangan Belanda sendiri”.



Kedaulatan Rakyat, 21 September 1946

Sjarat

Peroendingan.

OEMBOEKAAN (kembali) per-
oendingan. Indonesia-Belanda
hidahoeloei dengan peroendingan
bemberhentian pertempoeran.

Seharoesnja tentera Belanda,
dengan ditariknja tentera Serikat,
djoega ditarik moendoer, sebab
pada waktoe pendaratan Serikat,
dikemoekakan alasan, bahwa ten-
tera Belanda adalah sebagian da-
ri tentera Serikat.

Djika setelah tentera Serikat
mengoendoerkan diri, tentera Be-
landa masih ada di Indonesia,
perarti melanggar kedaulatan ne-
gara Indonesia, jang dengan sen-
dirinja memberi alasan oentoek
pertempoer lagi. Dan Belandalah
jang menjadi agressor. Belanda-
lah jang memaksakan perang ke-
pada Indonesia.

Toentoetan penarikan tentera
Belanda keloea dari Indonesia
adalah toentoetan pendahoeloean
oentoek memboeka peroendingan
politik.

Sekarang marilah kita tindjau
soal peroendingan politik itoe.

Koemisi Djenderal Belanda ter-
diri dari Schermerhorn, J. M. van
Poll dan F. de Boer telah tiba di
Indonesia dan segera akan men-
jalankan peroendingan dengan
pihak kita.

Tentang peroendingan politik
ang penting ialah:

1. Procedure peroendingan.
2. Soalnya peroendingan.

Jang pertama (procedure per-
oendingan) menentoekan kedoe-
doekan dan kekoeatan pihak jang
beroending.

Pihak kita moengkin akan di-
wakili oleh Menteri Loear Negeri
jang moengkin bertindak poela
sebagai Perdana Menteri. Beliau
mempoenjai koeasa penoeh (full
power).

Pihak Belanda hanya diwakili
oleh seboeah koemisi-djenderal.
Meskipun ketoeanja adalah be-
kas premier, akan tetapi kedoe-
doekan koemisi terseboet tentoe
tidak sama dengan Menteri Loear
Negeri. Malah kekoeasaan koemisi
itoe djaoeh lebih koerang dari
"full power" menteri loear negeri
atau doeta istimewa.

Oleh sebab itoealah procedure
soenggoeh gadjil. Jang akan ber-
oending boekan negara dengan
negara.

Jang kedoea (soal peroen-
dingan) sesoenggoehnja menentoe-
kan procedure terseboet diatas.
Jang berhadapan itoe negara de-
ngan negarakah atau tidak?

Bagi Belanda terang boekan ne-
gara menghadapi negara. Belanda
akan beroending dengan dasar
constitutie, jaitoe dengan meng-
moekakan lebih dahoeleoe Rijks-
verband. Djadi tidak mengakoei
revoloesi Indonesia, begitoeperit
tidak mengakoei negara Indone-
sia dan pemerintah Repoebliek de
facto.

Dasar dan pokok pikiran maoe-
poen pendirian Belanda terseboet
tidak dapat berdjoeempa dengan
sikap Indonesia jang tetap akan
mempertahankan kemerdekaannya
dan kedaulatannya.

Kita haroes awas dan waspada.
Kekalahan dalam voorkonferensi
soekar sekali dikedjar kembali.

Kita haroes ingat akan peroen-
dingan jang telah taloe dengan
Kerr - van Mook.

Soepaja djangan memboean
waktoe, sebaiknya Belanda didesak
doeloe soepaja wakilnja mempoe-
njai "full power".

Kedoea pihak sebeloe peroen-
dingan dimoelai saling memeriksa
mandaatnja.

Kedoea pihak haroes berdiri sa-
ma tinggi, masing2 mempoenjai
kekoeasaan penoeh oentoek soeng-
goeh-soenggoeh beroending.

Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 1946

Amanat mempersatukan segenap kekoeatan Negara.

(Pidato radio Panglima Besar pada tg. 5-6-10-'46).
Jogja, 7-10-'46.

A NAK2KOE segenap Anggauta Angkatan Perang, Anggauta Poelisi Negara serta seloeroeh Anggauta Lasjkar dan Barisan Perdjoengan.

Kegentingan jang kita hadapi dan kita alami makin hari makin memoentjak. Moesoeh senantiasa beroesaha segiat-giatnja oentoek menambah serta memperkoeat alat pertempoerannja, baik jang berwoedjoed tenaga manoesia, maoepoen jang berwoedjoed alat2 sendjata. Pasoekan2 baroe dari Negeri Belanda moelai didatangkan ke Indonesia. Moesoeh beroesaha poela memperkoeat alat perang rahasia, dengan menjebar-kan kaki-tangannja kedalam Negeri, oentoek memboeat kekatjauan dan perpetjahan dalam kalangan masjarakat kita.

Kepada doenia internasional moesoeh mempergandakan, bahwa Negara kita tidak koeat. Pemerintahnja lemah tidak teratoer, dengan menoendjoekkan boekti bahwa masih terdapat kekatjauan dan perpetjahan dikalangan barisan2, perselisihan dikalangan Angkatan Perang serta Poelisi Negeranja.

Oleh karena itoe, kita sekalian segenap Angkatan Perang, segenap Anggauta Kepoelisian Negara, Barisan2 serta Lasjkar2 seloeroehnja, jang meweodjoedkan toelang-poenggoeng dari pada soeatoe Negara jang Merdeka, wadjib dapat memberantas oesaha moesoeh itoe dengan amalan (perboeatan) jang njata. Kita toendjoekkan kepada doenia internasional, bahwa Negara kita hanya mempoenjai satoe kekoeatan jang njata. Meskipun kekoeatan itoe terdiri dari matjam2 golongan, Angkatan Perang - Poelisi Negara - Anggauta Lasjkar dan Barisan - Perdjoengan, tetapi dalam menghadapi tiap2 serangan, baik dari loear ataupun dari dalam, matjam2 golongan itoe serempak meweodjoedkan satoe kekoeatan Negara jang njata.

Insjaf dan jakinlah, bahwa perdjoengan kita pada dewasa ini boekan meweodjoedkan perdjoengan dari salah satoe golongan sadja, akan tetapi soeatoe perdjoengan jang wadjib dilaksanak-kan bersama oleh rakjat Indonesia seloeroehnja.

Moesoeh jang datang dari loear, kita hadapi bersama-sama dan kekatjauan jang ditimboekkan oleh oesaha kaki-tangan moesoeh, kita berantas bersama-sama poela. Dengan djalan demikian berarti kita sekalian telah dapat mendjalankan amanat Kepala Negara kita jalah:

Soepaja kita sekalian meneroes-kan perdjoengan dan djangan ada soeatoe tempat jang lemah.

Oentoek melaksanakan amanat Kepala Negara serta oesaha kita bersama, maka kami amalkan dengan tegas pada Anggauta Angkatan Perang, Anggauta Poelisi Negara, Anggauta Lasjkar dan Barisan Perdjoengan:

1. Eratkanlah berhoehoengan kamoe sekalian, selakoe kekoeatan Negara (Anggauta Angkatan Perang, Anggauta Poelisi Negara, Anggauta Lasjkar dan Barisan Perdjoengan).
2. Adakan serta boelatkannja ker-dja bersama-diantara semoea kekoeatan Negara.
3. Bantoelah sepenoeh-penoehnja tiap2 oesaha dari salah satoe kekoeatan Negara dalam melakoe-kan kewadajiban terhadap Negara, keloear dan kedalam.

Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 1946

Peroendingan.

DALAM satoe perskonferensi baroe2 ini di Djakarta, ketoea Komisi Djenderal Belanda dian-larannya berkata:

"Kewadjiban Komisi Djenderal Belanda dengan singkat jalah oentoek mendapatkan soeatoe kepoatoesan jang memoeaskan bagi kedoea belah pihak, pihak Indonesia dan pihak Belanda.

Kita haroes bekerdja dengan pikiran jang sehat, hati jang djoedjoer dan perasaan kemanoesiaan".

Soeatoe kepoatoesan jang memoeaskan kedoea belah pihak! Disinilah letak kesoealitannja.

Tetapi, djika ketiga sjarat - pikiran sehat, hati djoedjoer dan perasaan kemanoesiaan - sebagaimana diandjoerkan oleh prof. Schermerhorn itoe dimaksoedkan dengan soenggoeh-soenggoeh dan akan didjalankan poela dengan soenggoeh-soenggoeh, besar sekali harapan persetoedjoean akan di-dapat.

Apakah pihak Belanda memoeahehi ketiga sjarat terseboet diatas?

Berabad-abad bangsa Belanda memerintah (mendjadjah) negeri kita diloear pikiran sehat, diloear hati djoedjoer, diloear perasaan peri kemanoesiaan. Rakjat Indonesia menderita kemiskinan dan kehinaan selama 3½ abad itoe.

Tetapi apalah goennja kita membangkit-bangkit lagi kedjadian jang soedah laloe itoe. Biarlah kedjadian itoe mendjadi tjatatan sedjaraah dan mendjadi peladjaran goena perdjoengan selandjoetnja.

Jang penting jalah: apakah Belanda dalam berhadapan dengan kita sekarang ini telah memboeang ketiga sifatnja jang boeroek itoe. Boekti telah menjatakan kepada kita selama setahoen ini, 1001 matjam tipoe moeslihat didjalankan mereka. Berapa riboe bangsa kita jang telah mendjadi korban perboeatan2 Belanda diloear batas peri kemanoesiaan? Ambon dan Soelawesi tidak akan menderita kelaparan kalau Belanda dengan kekeoetaan sendjatanja tidak mengatjau dinegeri kita.

Sedikit hari lagi peroendingan

antara kedoea belah pihak akan dimoelai. Kita tahoe bahwa seleroeh doenia menantikan berhasilnja peroendingan itoe. Seleroeh doenia berharap-harap soepaja kekajaan Indonesia jang masih tertoeoep itoe dengan segera dapat membandjiri basar doenia. oentoek toeroet meringankan beban segala bangsa jang banjak menderita sesoedah perang jl. ini.

Goena kepentingan itoe semoesa Indonesia telah memboeka djalan Goena kepentingan itoe semoesa. Indonesia soeka mengalah dengan mengadakan peroendingan, soenggoehpoen kedaulatan negaranja soedah diperkosa.

Siapnja pihak kita beroending berarti bahwa pihak Indonesia masih sedia memberi apa jang bisa diberikan, masih sedia bekerdja bersama-sama, dimana Belanda akan mendapat kesempatan toeroet memetik keoentoengan dari tanah Indonesia jang kaja raja ini asal kemerdekaanja tidak terganggu.

Wakil Presiden Hatta sendiri telah menerangkan bahwa Indonesia memboetoeahkan tenaga2 dari loear oentoek membangoen toeroetama tenaga teknik, dan Belandalah jang akan mendapat voorkeur.

Hari ini disiarkan berita bahwa peroendingan tentang gentjatan perang jang diharapkan akan dapat memoeadahkan djalannja peroendingan hanti-telah gagal. Pihak Sekoetoe (Belanda) ta' dapat menerima kelima sjarat gentjatan perang jang dimadjoekan pihak kita. Sebagai pembatja tahoe, kelima sjarat itoe adalah sjarat minimum dari pihak kita.

Kelima sjarat itoe adalah sjarat2 jang serendah-rendahnja jang ta' dapat dikoeangi lagi. Djika dikoeangi djoega tentoe akan meroezikan pihak kita dan mengoentoengkan pihak Belanda.

Soenggoehpoen begitoe pihak Indonesia, masih akan beroesaha oentoek mentjapai perdamaian.

Kita kemoekakan kembali ketiga sjarat diatas jaitoe **pikiran sehat, kedjoedjoeran dan peri kemanoesiaan**. Ketiga sjarat inilah sampai sekarang beloem dirasai bangsa Indonesia. Keloear dari pihak Belanda maoepoen dari pihak Sekoetoe.

Dan sebeleem itoe, djanganlah diharapkan peroendingan jang akan datang itoe akan berhasil.

Kedaulatan Rakyat, 8 Oktober 1946

PEROENDINGAN INDO- NESIA-BELANDA.

P. M. Soetan Sjahrir, Pemimpin Delegasi Indonesia.

Jogja 7-10.

KEMENTERIAN Penerangan mengoemoemkan:

Dalam rapat jang pertama, setelah Kabinet Baroe dibentuk, pada tg. 5-10-46 di Tjirebon, djam 20, P. J. M. Presiden Rep. Indonesia telah menoendjoek P.M. St. Sjahrir sebagai Ketoea Delegasi Indonesia dalam peroendingan dgn Komisi Djendral Belanda pada tg. 7-10-46 (hari ini).

Soesoenan Delegasi tsb. adalah sbb:

Ketoea: St. Sjahrir. Anggautaz: Mr. Mohammad Roem, Dr. A. K. Gani dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo.

Seuangkan anggauta tjadangan ialah: Mr. Amir Sjariftoeddin, Dr. Soedarsono dan Dr. Leimena.

Lebih landjoet dapat dibarkan, bahwa dasar jang diambil oentoek pokok peroendingan ini ialah politik program Pemerintah jang terdiri atas 5 fatsal sebagai berkoet:

1. Beroending atas pengakuan Negara Repoebliek Indonesia, merdeka 100%.

2. Mempersiapkan rakyat dan negara disegala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial oentoek mempertahankan Repoebliek Indonesia.

3. Mentjapai soesoenan Pemerintah Poesat dan Daerah jang demokratis.

4. Beroesaha segiat-giatnja oentoek menjempoebnakan produksi dan sebagian makanan dan pakaian.

5. Tentang peroeahaan dan perkeboenan jang penting, hendaknja oleh Pemerintah diambil tindakan seperkoenja, hingga memenoehi maksod jang termaktueb dalam Oendang Dasar (atawa) 3 pasal kesedjahteraan sosial.

Kedaulatan Rakyat, 12 Oktober 1946

Akan berhasil?

MELIHAT gelagatnya, lebih tepat jika kita katakan melihat desas-desoersnya, perundingan Indonesia-Belanda seolah-olah akan membawa hasil yang baik.

Begitoe poca tentang perundingan gentjatan semojaka, menoreot rabaan dari kalangan yang mengetahui mungkin poca membawa hasil yang memuaskan.

Berhasilaja perundingan! Inilah yang diharap-harapkan oleh kedua belah pihak, pihak Indonesia dan pihak Belanda. Begitoe poca seloeroeh doenia menaruh minat besar akan terjapainja persetoedjoean oleh kedua bangsa itoe.

Pihak Indonesia telah memboka kartoenja. Tidak ada lagi yang tersembunyi.

Telah berkali-kali dikatakan, dan dikemukakan bahwa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya yang boekal, kemerdekaan 100%. Kemerdekaan yang ta' dapat ditawar lagi.

Tornotoetan Indonesia itoe boekantah soaloe toentoetan yang berkelebat-lelehan. Tornotoetan itoe adolah soaloe toentoetan yang sewadjarnja.

Tiap-tiap negara menghendaki kemerdekaan, tiap2 negara memperdjoeangkan kemerdekaan yang memang hak tiap2 bangsa.

Boekantah bangsa Belanda sendiri telah berkali-kali berdjoeang mati-matian mempertahankan kemerdekaan negaranya dari perkosaan bangsa Djerman, perkosaan bangsa Perantjis, dari perkosaan bangsa Spanyol dll.

Kita pertjaja, jika Belanda menjadi pihak Indonesia, mereka akan berdjoeang mati-matian seperti apa yang diperboet bangsa Indonesia selarang ini.

Indonesia telah menoeendjoeakan pendiriannya.

Tinggal lagi kepada sikap Belanda. Dapatkah Belanda menerima dan mengerti tentang pendirian Indonesia itoe?

Itoe lah sebenarnya yang menjadi perundingan. Djadi, berhasil atau tidaknya perundingan ini bergantung semata-mata kepada Belanda.

Pendirian Belanda ini nanti akan diperboekartinnja dalam perundingan.

Menoeroet desas-desoersnya, perundingan ini nanti akan berhasil baik, kata kita diatas. Itoe berarti bahwa desas-desoers menyatakan bahwa Belanda bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pihak sana mengatakan "harapan besar". Lord Killearn berkata "medah - moedhar". Indonesia menjawab, "Kita merenggoe boekti".

Semoea yang kita katakan itoe adalah desas-desoers yang beredar dari kalangan Belanda. Indonesia sudah mengenal Belanda semendjak berabad-abad, sudah paham benar akan boedi dan pekertinja, mengetahui benar-benar sampai dimana kedjoerannya.

Kedaulatan Rakyat, 12 Oktober 1946

Memilik itoe senjata, melengkap perbocatan Belanda yang sudah, maka kesav-desoes yang dilepaskan pihak Belanda itoe tidak dapat diterima bangsa Indonesia dengan hangat, sebegini melihat bejana yang njata.

Oentoek memetjahkan soal Belanda-Indonesia ini, seperti dimaklumi, djalan yang penting adalah doa.

- 1 Dengan djalan berunding
- 2 Dengan djalan kekerasan

Indonesia telah berslap menempoh djalan manapoem djoga, yang pertama boleh dan katan perloe yang kedocapoen boleh.

Sekarang ternyata, bahwa kedoca-behal pihak memilih djalan berunding, djalan yang terbaik.

Harapan oentoek mendapat persetoedjoean dengan djalan damai tinggal satoe kali ini. Dan tentang hasil atau tidaknja, seperti kita katakan diatas adalah tergantoeng kepada Belanda.

Kalau perundingan ini gagal lagi, berarti Belanda menghendaki djalan kekerasan.

Oentoek inipoen Indonesia telah siap.

Kedaulatan Rakyat, 15 Oktober 1946

Sekali lagi peroendingan.

SEKALAJA oepaja oentoek metjahkan soal Indonesia Belanda didjalankan oleh ke-2 bangsa itoe, oentoek poela sekoet tenaga oleh Inggeris.

Berapa kali sadsja oesaha ini menemoei djalalan boentoe, berapa kali sadsja oesaha ini gagal — sementara itoe berapa sadsja djiwa jang telah melajang karena hasil keganasan berapa sadsja harta serta kekajaan jang telah dihamboerkan, berapa sadsja penderitaan jang ditanggoeng — namoen orang ta berpoetoes asa, kedoea belah pihak tetap berichtiar mentjari djalalan damai.

Oentoek lebih memoedahkan djalannja peroendingan tentang politik, dioesahkan poela soepaja gentjatan perang dapat didjalankan. Poela oesaha ini mendapat kesokaran. Djalalan boentoepon telah dilaloeinja. Roepanja telah terdjadi perbedaan paham jang besar antara kedoea belah pihak.

Orang tidak berpoetoes asa. Peroendingan tentang gentjatan sendjata ini dimoelai poela kembali, sekarang oleh orang2 jang boekan ahli militer, soenggoehpoen disampingnja doedoek djoega sebagai penasihat pembesar2 tentara dari kedoea belah pihak.

Sebagai halilintar ditengah hari, tadi malam kita mendengar komunike jang diotjakan oleh Panglima Besar Soedirman tentang kemadjoean peroendingan perietakan sendjata. Disoesoel poela oleh beberapa resoiesi jang melajang keodara dari radio Repoeblik di Djakarta.

Diantarannja komunike itoe berboenji:

„Peroendingan lengkap antara wakil2 Indonesia dan Belanda jang dilangsoengkan hari ini (tg. 14-10-46) di Djakarta jang diketoeat oleh Lord Killearn, telah dapat mengambil kepoetoesan bersama tentang gentjatan sendjata antara tentera Serikat dan Indonesia dan akan dimoelai setjepat moengkin, bilamana dapat dilangsoengkan.

Dalam waktoe ini segal2 sesoeatoenja haraplah dioesahkan oentoek mentjegah pertempoeran”.

Roepanja soal gentjatan sendjata ini menemoei djalalan jang baik kembali. Moengkin dapat dilaksanakan, tinggal menoenggoe peroendingan tjara mendjalankannja.

Djika gentjatan sendjata ini dapat didjalankan dan djika terdjadi perselisihan antara Belanda dan Indonesia tentang hal itoe, maka ketoea panitia (Lord Killearn) berhak memberi poetoesan. Sesoedah tg. 30 November (sesoedah Inggeris meninggalkan Indonesia) djika terdjadi perselisihan, maka jang berhak memberi poetoesan ialah Panglima Tertinggi Inggeris di Asia Tenggara. Poetoesannja haroes ditoeroet.

Ini roepanja dapat merimboelkan ketjoerigaan dipihak Indonesia. Bagaimanapoen djoega orang Indonesia menganggap bangsa Inggeris itoe boekan bangsa jang netral dalam hal pertikaian Belanda Indonesia. Bagaimanapoen djoega, dimata bangsa Indonesia, bangsa Inggeris itoe ditjap berat sebelah, sangat berat sebelah, berat kepada pihak Belanda. Boekti telah menoendjoekkan.

Hal ini soenggoeh pintjang kelihatanja. Tetapi baiklah kita toenggoe, kita serahkan kepada kedadjaksanaan delegasi kita.

Kedaulatan Rakyat, 15 Oktober 1946

Lagi poela soal gentjatan sendjata ini boekanlah soal jang penting. Jg penting jalah soal peroendingan politik. Gentjatan sendjata tergantoeng kepada soal peroendingan. Djika peroendingan berdjalan baik dan memoeaskan, perietakan sendjata moedah mengikoe-tinja. Sebaliknja, djika peroendingan meremoei djalan jang tak diingini, sendjata gampang di-angkat kembali. Dan soal peroendingan jang penting itoe, sebenar-nja boekanlah hal jang soelit poela, gampang dipetjahkan, djika di-djalankan dengan segala kedjoe-djoeran.

Perkara ini mendjadi soelit dan soekar karena jang dipersoalkan jalah pendirian jang palsoe, pendirian jang boesoek, soenggoehpoen kepalsoean dan keboesoekan itoe ditjoba menoetoepi dan menjirami-nja dengan minjak wangi.

Bangsa Indonesia dalam hal ini berlakoe djoedjoer, malah terlaloe djoedjoer, terlaloe baik, sebab ia beremboeg dan berkompromi setjara lemah lemboet dengan bangsa jang hendak mengoerangi kemerdekaanja.

Bagi bangsa Belanda, andai kata peroendingan tidak mengoentoengkan bagi mereka, andai kata mereka kalah dalam perdjoeangan, keroegian jang dideritanja tidak begitoe besar. Lain dengan bangsa Indonesia jang dalam perdjoeangan ini mempertaroehkan nasib tanah airnja, nasib bangsanja.

Djaja sekali akan djaja seteroesnja, djika djatoeh sekali soekar oentoek bangoen kembali.

Kita haroes waspada.

Lagi poela soal gentjatan sendjata ini boekanlah soal jang penting. Jg penting jalah soal peroendingan politik. Gentjatan sendjata tergantoeng kepada soal peroendingan. Djika peroendingan berdjalan baik dan memoeaskan, perietakan sendjata moedah mengikoe-tinja. Sebaliknja, djika peroendingan meremoei djalan jang tak diingini, sendjata gampang di-angkat kembali. Dan soal peroendingan jang penting itoe, sebenar-nja boekanlah hal jang soelit poela, gampang dipetjahkan, djika di-djalankan dengan segala kedjoe-djoeran.

Perkara ini mendjadi soelit dan soekar karena jang dipersoalkan jalah pendirian jang palsoe, pendirian jang boesoek, soenggoehpoen kepalsoean dan keboesoekan itoe ditjoba menoetoepi dan menjirami-nja dengan minjak wangi.

Bangsa Indonesia dalam hal ini berlakoe djoedjoer, malah terlaloe djoedjoer, terlaloe baik, sebab ia beremboeg dan berkompromi setjara lemah lemboet dengan bangsa jang hendak mengoerangi kemerdekaanja.

Kedaulatan Rakyat, 15 Oktober 1946

PODJOK.

Resèp mandjoer!

WAK Semar! Kalau Sontoloj mbatja kabar2 tentang per-oendingan Indonesia/Belanda dan gentjatan perang itoe kok hati nja sar2an, deg-degan teroes2an. Entah apa sebabnja. Sontolojo ti-dak ngerti. Baroe batja oempa-manja: „Hari ini diadakan reendi-ngan Indonesia/Belanda”, „Gentjatan perang dapat kemadjoean”..... baroe batja kepa-lanja kabaran sadja, hati Sontolojo tidak bisa direm. Djanloeng-nja teroes berdebar2, melarming-koeb. Panas badannja Sontoloj sekedjap naik lebih dari 40 de-radjat Celcius.

Aneh boekan? ! Ja, aneh boek-pembatja! Tapi boeat Sontoloj tidak aneh. Sebabnja ada. Kalan moela batja kabaran: **Roendingan gentjatan perang sekarang dapat kemadjoean**, pikiran Sontolojo melajang diawang2, ingat kedjadi di Soerabaja boelan II th. jl. Setelah ada poatoesan perletakan sendjata, beberapa hari kemoe dian atas perintah Mansergh kot Soerabaja dibakar, dibom, dime-riam djadi karang abang. Po-loehan riboe rakjat mati terboe-noeh. Sontolojo ingat lagi pem-boenoehan disepandjang djalan Magelang-Ambarawa sescedah ad poatoesan perletakan sendjata di Magelang. Oentoeng ada pemoe-da2 melawan teroes hingga sek-rang, hingga kekoeatan moesod kini tetap terbatas dalam kota Se-marang, Bandoeng dan Soerabaj dan tidak bisa mendjalar ke Ja-gjakarta, Solo, Malang dan kota lainnja di Djawa Tengah dan T-moer. „**Peroendingan Indonesia Belanda dimoelai**”. Baroe batja begini sadja, pikiran Sontoloj ingat Pangeran Diponegoro ketika diapoesi Belanda di Magelang de-ngan melèk-melèkan dan tilasnj sekarang masih ada!

Tentoe sadja tjaranja ngapoes sekarang lain dari doeloe. Mesti-nja sekarang rada aloes dan lem-boet banget sampai tak bisa di-lihat dengan mata. Jang bisa me-lihat tjoema mata hati. Mah hati Sontolojo tidak bisa disor-roeh pertjaja lagi sama orang s-matjam Schermerhorn, Idenburg-Koets dan pengandjoer2 dibla-karignja seperti Lord Killeen Meckereth dll.

Orang2 itoe sekarang ndjati (memaksa) ngadjak remboegja, soedah tentoe keadaan sekarang memaksa, keadaan internasional makin roewet, dalam negeri Be-landa sendiri makin boebrah.

Pendirian Sontolojo begini: Waktue moesoeh nangis2 seperti sekarang ini adalah saat jang s-paik2nja memberi hanteman ha-bis2an soepaja si imperialis Belaa-

Pendirian Sontolojo begini: Waktue moesoeh nangis2 seperti sekarang ini adalah saat jang s-paik2nja memberi hanteman ha-bis2an soepaja si imperialis Belaa-da tidak bernafas lagi!

Terserah komentar Wak Semar. Merdeka dan teroes tetap broe-tak!

Anakmoer
Sontolojo

Kedaulatan Rakyat, 18 Oktober 1946

2.400 Tentara Belanda.

Lagi ke Indonesia.

Jogja, 18-10. (Antara).

AMSTERDAM: Dengan kapal „Volendam“ kemarin doeloe telah berangkat dari negeri Belanda, tentera Belanda 2.400 orang ke Indonesia, demikian kabar K.B. Belanda.

K.B. Tass dari Den Haag mengabarkan, walaupun diantara Indonesia/Belanda diadakan gentjatan perang, pembesar2 Belanda masih teroes mengirimkan tentera ke Indonesia. Menoeftelaporan kemarin doeloe dari Rotterdam telah berangkat dua batalyon infanteri sedjoemlah 1.300 orang. Selain itoe berita dari Djakarta mengatakan, kapal indock Belanda „Karel Doorman“ telah sampai di Djawa.

S.K. „Investia“ di Moskow kemarin doeloe dalam barangannya mengatakan, tentera Inggris di Djawa bertempoer oentoek menindas gerakan kemerdekaan rakyat.

Indonesia dan mengembalikan kekuasaan kaum Imperialis Belanda. Bangsa Indonesia menghormati tentera Inggris sebagai wakil negara2 Sekoetoe, tetapi mereka memerangi rakyat Indonesia yang hampir tak bersenjata itoe dengan senapan mesin, tank dan pesawat udara.

Kedaulatan Rakyat, 23 Oktober 1946

BAHAJA BAGI REPOEBLIK BE- LOEM LENJAP.

Gentjatan perang hanja tipoe moeslihat belaka.

23 10 46

Jogja, 22-10 (Antara).

Gentjatan perang digoenakan oentoek memperkoeat tentera.

DEN HAAG (Tass): Menoeroet berita2 soerat-kabar pemdesar2 Belanda hendak mentjari keoentoengan dari gentjatan perang antara tentera Repoeblik Indonesia dan tentera Inggeris/Belanda. Belanda hendak mempergoenakan kesempatan itoe oentoek mengadakan persiapan agar dapat melandjoetkan permoesoehan nanti.

Mereka teroes - meneroes mengirimk tentera dan sendjata ke Djawa. Pada tg. 18 Oktober lebih dari 1500 serdadoe berangkat dari Rotterdam ke Indonesia.

PEMERINTAH BELANDA BOEDAK IMPERIALIS INGGERIS.

KALANGAN2 demokrasi Belanda teroes - meneroes menoentoet soepaja pengiriman tentera dihentikan dan semoea tentera Belanda jang di Indonesia dikembalikan.

Soerat kabar kiri „De Waarheid” menoesih: „Permoesoehan becat sementara waktue berhenti, tetapi tentera kedoea belah pihak masih teroes berhadap - hadapan. Dalam waktue perhentian tembak-menembak tentera teroes diperkoeat hingga pertioempahan darah jang lebih dahsjat nanti pada tiap sa at bisa terdjadi.

Bahaya bagi repoeblik beloem lenjap. Imperialisme Inggeris, pemerintah Belanda itoe hanja boedaknja belaka, dengan kekerasan

dan segala tipoe moeslihat hendak menindas repoeblik Indonesia, dengan maksoed oentoek memperkoeat sistim imperialisme di Asia-Tenggara”.

GENTJATAN PERANG HANJA TIPQE-MOESLIHAT BELAKA.

„Kalangan militer Belanda”, demikian toelis De Waarheid selandjoetnja, „tidak menghendaki perdamaian di Indonesia. Gentjatan perang hanja tipoe moeslihat belaka jang soedah merca rentjanakan oentoek melaksanakan tjita2 mereka jang boeas dengan djalan bagaimanapoen djoega. Hal ini memaksa kita melangsungkan protes jang keras”.

TENTERA BELANDA KE INDONESIA TEROES MENGALIR.

Djakarta, 22-10 (Antara).

Kapal „Indrapoera” jang me-moeat serdadoe dari „divisi 7 Desember” jang kebanyakan terdiri dari infanteri, pada tg. 19-10. telah bertolak ke Indonesia, demikian berita kantor pekabaran Belanda dari Rotterdam.

Kedaulatan Rakyat, 15 Nopember 1946

PODJOK

TIDAK AKAN LAGI

BELANDA selaloe mencong-
borkan, bahwa mereka tidak
akan mendjadjah Indonesia lagi.
Tjoema maoe menolong dan men-
bimbing sadja kearah kersampor-
naan, kearah dapat berdiri sen-
diri. Hal ini dibitjarakan dalam
permoesjawaratan - Malina Djoe-
ga Dr. van Moek, ketika memeri-
ma pemerintahan - kembali dari
tentera pendodoekan Australia
di Makassar dihadap oleh "wakil2
rakyat" berkata sambil menitikkan
air mata: "Saja terima pemerin-
tahan ini oentoek panggilan soe-
tji, bersama-sama dengan toean2
mengerdjakan oentoek kita ber-
sama". Saudara2 kita di sana me-
rasa terharoe dengan oetjapan
itoe.

Tetapi ketika Dr. Boediman iboe
berpidato pada oelang-tahoea pe-
njerahan-kalah tentera Djepang
dalam boelan Aguestoeer jang ba-
roe laloe, ia berkata: "Kemua-
ngan jang semilang beloean dapat
sebeloem semoea jang berhae
Djepang dan boeatan Djepang ki-
ta moesnahkan". Maksudnja ia-
lah kaoem "terroris", "extremis"
kita, pendek kata jang dimaksoed-
nja ialah neera kita.

Demikian poela dalam kurun2
Belanda, baik di Djakarta maoe-
poen dimerri Belanda semoea
hampir menatakakan Noderland-
Indie, Batavia jang selaloe mengi-
ngatkan kita kepada zaman pen-
djadjahan doelo.

Boeat kita adalah mendjadi sa-
toe boekti, segala tindakan2 Be-
landa, sampai dimana mereka
memenoehi segala oetjapannja
itoe. Ini adalah poela satoe tjam-
boek bagi kita oentoek meneroe-
kan tekad kita dengan berkata:
"Memang Indonesia tidak akan
terdjadjah lagi, biarpoen Belanda
beroleh keras memaksanja."

★

Kedaulatan Rakyat, 7 November 1946

RIJKSEENHEIDS - GEDACHTEN

Jang masih melipoeti politik Belanda Mengapa kita tolak?

KALAU kita ikoeti soal Indonesia Belanda dengan tenang, sampai kita kepada satoe hal, jaitoe, bahwa semoea kegagalan dari semoea pembijtaraan itoe ialah: pendirian difihak Belanda menghendaki Indonesia tetap dalam lingkoeangan keradjaan Belanda, dan pendirian Indonesia tetap menolak dalam lingkoeangan keradjaan Belanda.

Pertentangan ini tampak sangat tajam sekarang, diwaktoe kedoea belah fihak mengnadapi peroeendingan politik jang akan menentoekan status Indonesia dikemoedian hari.

Persetoedjoean bisa didapat djika kedoea belah fihak dapat melepaskan pendiriannya atau sedikitnja mengoerangi toentoetan mereka atas terwoedjoednja sikap politik mereka.

Difihak Belanda kemadjoean djalan fikiran mereka dalam menghadapi soal Indonesia-Belanda itoe soedah moelai toemboeh dan berkembang, tetapi beloem sampai pada tingkatan jang kita kehendaki.

Dalam satoe pembijtaraan Schermerhorn mengemoekakan, bahwa masih haroes diakoei adanya satoe „band“ antara Indonesia dan Belanda.

Alam fikiran Belanda mengakoei, bahwa karena adanya hoeboengan 350 tahoen itoe lah tertjipta di Indonesia ini satoe nasionalisme Indonesia jang kokoh sekarang ini. Tetapi alam fikiran mereka itoe beloem sampai pada pengakoean, bahwa nasionalisme Indonesia sanggoep dan tjoekeop koeat oentoek mendjadi satoe sjarat mengasoeh dan membentoek satoe negara kesatoean Repoebliek Indonesia.

Alam fikiran seroeapa ini masih melipoeti kalangan Belanda jang madjoe (progressief) djoega pada orang2 seperti Schermerhorn dan Van Mook. Dan tindakan politik mereka masih tetap dikemoedikan oleh djalan fikiran seroeapa ini.

Oleh sebab itoe, boekankah mendanoeloei satoe keadaan jang terdjadi dalam peroeendingan Indonesia-Belanda ini, djika kita mengatakan, bahwa batas hak Commissie Generaal dalam peroeendingan ini ialah: menoentoet Indonesia tetap dalam lingkoeangan keradjaan Belanda.

Oentoek mewoedjoedkan toedjoean politik jang ditentoekan oleh alam fikiran seroeapa itoe, kalangan Belanda sangat optimistis. Mereka tidak menghiraukan kata istilah internasional, asal saja „band“ jang telah „toemboeh“ selama 350 tahoen itoe dapat dilandjoetkan dalam hoeboengan jang tegas, jaitoe dalam hoeboengan rijksverband. Moengkin optimisme ini djoegalah jang menjebakkan soeatoe pernyataan Schermerhorn: „Boekankah pada pekerdjaan jang kita sedang hadapi itoe seperti biasanja: Hatilah terhadap kitab2 jang tebal dan roemoes?“

Artinja: Lemparkanlah semoea boekoe2 tebal jang memoeat kata2 dan istilah2 jang moengkin menggagalkan pembijtaraan Indonesia-Belanda, tetapi berpeganglah pada satoe realiteit bahwa band (hoeboengan) itoe masih ada, dan perloe diteroeskan dalam satoe lingkoeangan Keradjaan.

Baroe sampai disini kemadjoean alam pikiran Belanda. Dan ini masih djaoeh terbelakang dari pada kita sekarang, jang soedah mewoedjoedkan satoe Repoebliek, satoe bentoek negara jang demokratis dan mendjadi tanda ke-

Kedaulatan Rakyat, 7 Nopember 1946

madjoean bagi doenia sesoedah perang doenia ke II ini.

Dan apakah alasan kita, bahwa kita menolak hoeboengan rijsverband itoe. Dan apakah poela sebabnja kita tidak pertjaja, bahwa hoeboengan rijsverband itoe dapat memberikan kemadjoean boeat kita.

Pernyataan Schermerhorn yang menyatakan bahwa masih haroes diakoel adanja satoe band antara Indonesia dan Belanda, mendjelaskan sikap kita yang soenarinja.

Menoeroet pendapat kita, „Banda yang masih haroes diakoel dan haroes dilandjoetkan itoe, adalah satoe band (satoe hoeboengan) yang timboel karena pendjadjahan selama 350 tahoen. Kalau kita melihat koloniaal-beleid pemerintah Hindia Belanda selama itoe, jaitoe soeatoe beleid yang memberi noda dan kelemahan bagi kemadjoean cultureel, politiek dan sociaal economisch bagi bangsa Indonesia, maka hoeboengan yang ditimboelkan itoe boekanlah satoe hoeboengan yang sehat dan hoeboengan yang tidak sehat ini haroes diakoel dan haroes diteroaskan.

Walaupoen akan ada bentoe dan tjorak yang lain, tetapi inilah yang mendjadi dasar.

Walaupoen ada bentoe dan tjorak yang lain, dan ada beleid yang lebih madjoe lagi, tetapi menoeroet pendapat kita, dalam rijsverband itoe, kepentingan Indonesia menoadi kepentingan kedua dan kepentingan pertama adalah kepentingan pertama.

Negeri Belanda dalam perang doenia ke II mengalami banjak penderitaan dan kesoebaran, dan bentoe membangoenkannja kembali, tidak moengkin ia dapat dengan kekoeatan sendiri. Dengan Suriname dan Curacau tidak moengkin, dan dengan daerah Soerabang poen tak moengkin, selama Djawa dan Sumatra masih mendjadi satoe factor politik.

Berdasar hal ini kita menolak hoeboengan rijsverband itoe, karena dengan memperhatikan soal politiek dan economisch, kita berpendapat, bahwa kepentingan kita och tidak akan terdjamin. Kerjasama kita kehendaki diantara semoea bangsa didoenia ini, terutama dengan Belanda yang soedan kita kenal, tetapi dengan deradja yang sama.

Djika Indonesia masih dalam lingkaran rijsverband itoe, maka soal politiek loepoe Indonesia pasti terdjalin dengan Belanda. Dan hoeboengan itoe, ini dan hoeboengan itoe, masih tetap mendjadi dasar Hoeboengan economisch dan doenia loear haroes menoeroet koeran kepentingan Belanda dan Indonesia, boekan berdasarkan kepentingan Indonesia sendiri. Inilah pendapat kita. Kita menolak rijsverband itoe, tapi kita menghendaki kerjasama yang sama antara bangsa-bangsa didoenia ini.

Kedaulatan Rakyat, 16 Mei 1947

BELANDA

TETAP AGRESIF.

Dalam 2 minggu 10 kapal tentera ke Indonesia

Den Haag, 15-5 (Antara-Tass).
PEMBESAR-PEMBESAR Belanda mempertcepat pengiriman balabanderaan tentera ke Indonesia, demikian menoreet berita s.s.k. kemarahan telah beranukit naah 2000 opsir dan serdadoe dan dalam 2 minggu terachir ini sadja kira-kira 10 kapal telah bertolak dari pelaboehan - pelaboehan Belanda membawa tentera dan alat-alat perang ke Indonesia.

Teroes mengalir...

Nijmegen 14-5 (Antara)

Uraian RSH inemuratakan di Nijmegen, sedoemah 2000 orang dari Repo jad akan dikirimkan ke Indonesia. Demikian ANP.

Romme marah...

Den Haag 13-5 (RRI)

DALAM sidangnja Katholieke Volkspartij Romme antara lain mengatakai bahwa sesoedah persesoesoesan Linggadjadi ditanda tangan, dan peristiwa2 yang timboel dari pihak Repoebliek yang tak sesoesan dengan semangat Linggadjadi. Adalah soeatoe schandak bahwa 1 1/2 boelan sesoesan Linggadjadi ditanda tangan, di daerah Repoebliek masih terdapat orang2 interniran.

Sedandiemja dalam naskah Linggadjadi terdjadi pergolakan tentang kedaulatan Repoebliek. Romme juga menerangkan bahwa soal bekerdja bersama dalam urusan pertahanan haroes ditetapkan dengan pihak Belanda.

Kedaulatan Rakyat, 17 Juni 1947

Desoel

menjelesaikan pertikaian

dengan jalan damai.

*Dilakoean oleh kedoea
belah pihak.*

Djakarta 21-6 (Antara).

MESKIPOEN tidak dapat dimoengkiri, bahwa keadaan perhoe-
boengan antara Indonesia/Belanda genting sekali, kata ka-
langan2 politik Indonesia di Djakarta pada „Antara“, tetapi beloe
ada kelihatan sebab2 oentoek melihat timboelnja pertempoeran be-
ar2an antara Indonesia dan Belanda”.

Kalangan2 terseboet menjatakan
bahwa oentoek melakoean pepe-
rangan perloe oeang jang ba-
njak dan Belanda tidak mem-
poenja oeang. Selain dari itoe
oentoek melakoean gerakan mi-
liter jang besar, Belanda mesti
lebih dahoeoe mendapat „perse-
toedjean” sedikitnja dari Ame-
rika dan Ingeris, kalau tidak
dari Big Four. Demikian djoega
pertempoeran besaran di Indone-
sia, nistjaja akan menjatakan api
peperangan poela cingger2 dekat
Indonesia seperti di Birma, Mala-
ya, India dan Indo China.

★

Hal ini dikerahoei benar oleh
pihak Ingeris, sehingga da-
patlah diacega, bahwa dewasa
ini pemerintah Belanda di Den
Haag ada dibawah pressie jang
keras dari Ingeris. Bahwa peme-
rintah Reboeolk diacega menda-
pat desakan dari Ingeris dan A-
merika, terlihat dari kegiatan kon-
soel2 djenderal negeri itoe pada
hari2 jang achir ini.

Selandjeetnja dikatakan, bahwa
pada achirnja pertempoeran dan
kekajajaan jang timboel di Asia
Tenggara sebagai akibat dari pe-
perangan di Indonesia, diika di-
hoeboengkan dengan perbanding-
kekocasaan didoenia sekarang ini
bisa poela menjadi pemboekaan
bagi peperangan doenia ketiga.
Kalangan2 tsb. menimpoeikan ke-
terangannja, bahwa dalam tingkat
sekarang ini kedoea pihak Indone-
sia dan Belanda masih akan ber-
cesaha oentoek menjelesaikan per-
tikaian dengan tiara damai.

Kedaulatan Rakyat, 21 Juli 1947

Sekali merdeka Tetap merdeka.

PERANG ditanah air kita roepanja soedah tidak dapat dielakkan. Pemerintah Belanda tidak dapat diinsjafkan lagi dan telah melepaskan hawa nafsoenja. Gerakan militer setjara besar-besaran telah dilakoean Belanda moelai tadi malam diseloeroeh Djawa. Moengkin di Soematera telah dilakoean mereka poela gerakan sematjam itoe.

Belanda melakoean serangannja pada boelan Poeasa, semasa oemat Islam melakoean kewadjiban soetji.

Radio Belanda tadi pagi menjlarkan bahwa gentjatan sendjata dan semoea perdjandjian tidak berlakoe lagi bagi Belanda. Pemerintah Belanda sendjandjoetnja akan bertindak sesoea hatinja.

Dan tindakan soeka hati itoe telah didjalankan mereka, dengan mempergoenakan angkatan darat, oedara dan laet.

Damai jang kita tjintai telah diperkosa.

Kemerdekaan jang lebih kita tjintalpoen moelai diperkosa.

Perlawanan sengit sedang dilakoean tentera kita.

Maka tibalah saatnja sekarang bagi seloeroeh rakyat menjoendjoekkan baktinja kepada Negara. Soedah kehendak Toehan Jang Maha Koeasa bahwa kemerdekaan haroes kita bela dengan harta benda, keringat, darah dan djiwa raga.

Nasib Indonesia, nasib anak tjoetjoe kita, tergantoeng kepada kita semoea.

Sembojan jang sering-sering kita gambar-gemborkan selama ini, moelai hari ini haroes hidoep dikalboe seloeroeh bangsa Indonesia dengan tidak memperdoelikan akibat apa jang haroes ditanggoengnja.

Ia berboenji:

Sekali merdeka, tetap merdeka!

Kedaulatan Rakyat, 25 Juli 1947

TINDJAUAN LOEAR NEGERI:

Apakah tindakan doenia terhadap Perang Kolonial di Indonesia?

(Oleh: S. K. Bonar pembantoe kita.)

DIDALAM zaman demokrasi ini, didalam masa doenia bercoesaha mentjapai perdamaian, sekoung 2 forum internasional terkedjoer mendengar poetoesan negeri Belanda oentoek melakoekan "tindakan polisionil" di Indonesia.

Doenia Internasional tertjeang, oleh karena Belanda adalah anggota dari Perserikatan Bangsa2 yang telah mentjoedjoel bahwa tiap bangsa didoenia ini akan diberikan kemerdekaan, akan diperbolehkan memaja penerintahannja sendiri, sebab perang doenia iang baroe iatoe telah menuliskan negar2 bahwa perdamaian hantja bisa tercapai, jika seloeroeh bangsa2 meroepakan soetoe keloeang dimana tidak terdapat tindas, menindas atas sesama manusia.

Doenia beloen lagi lagi beloen lagi berkesempatan mawoedjoerkan tita2nja itoe salah sebarang dari anggotanja soedah memberkosa poetoesan "Dumbarton Oaks" yang mendiadi pegangan sekarang bagi doenia oentoek membentoe perdamaian.

Telah lama doenia mengkoeti sedjadi2 di Indonesia, apakah Linggadi2 iang dijadiakan perjoedjoeran antara Indonesia - Belanda disamboet oleh doenia sebagai oesaha demokrasi, oentoek mentjapai persahabatan antara doea bangsa satoe dari Barat, satoe dari Timoor. Akan tetapi apakah kenyataan sekarang? Bangsa memkoekan "tindakan polisionil" karena Indonesia tidak madoe dengan dijoedjoer melaksanakan poetoesan Linggadi2 itoe, begitoe lah alasan Belanda.

Soepa2 kabae doenia heran mentjajit tindaakan Belanda ini. Boekankah soedah terdapat perjoedjoeran antara Belanda dan Indonesia? Boekankah Republik Indonesia soedah meladeni Belanda dengan schormatnja sampai menekan sentimen2 dan perasaan asal pihak Belanda dapat mengerti tita2 bangsa Indonesia?

Dengan djalan barokmanapoer Belanda tidak akan dapat mentjoep mata internasional terdapat peperangan di Indonesia. Didalam soal persendirjaan Inggris soedah moelal mengeloearkan poera sedjata2 Inggris tidak boleh di pakai Belanda terhadap Indonesia. Dalam pada itoe perang2 Amerika, Inggris dan Australia telah banyak sekali jang melawarkan diri pada angkatan oedra Indonesia.

Djika kita melihat oesaha2 bangsa2 asing ini, dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa doenia internasional tidak akan membolehkan Belanda melandjoetkan peperangan jang telah diantjajkannya, sedjak mereka moelal mendapat beberapa ketoesaan di Indonesia.

Doenia dewasa ini boekan lagi doenia seperti beberapa abad jang laloe ketika negar2 musti bisa bertindak sendiri merboet negar2 asing dengan sesoeke hawnja sadja. Doenia internasional dewasa ini sangat opene arak, oleh karena

national Melha akan sikap negar2 sahabat Indonesia, maka kemungkinan2 pertjampoean tajaan ini akan meroepakan intervasi atau pembawaan soal Indonesia ke UNO.

Apakah nasunja bagi Belanda jika soal Indonesia ini taja soeoe? Silangkan perjoedjoeran antara Bangsa2 Belanda, madoe negar2 Indonesia, jendoe perjoedjoeran ini tidak akan mengijak meroepakan wasit jang beloen sebagai penengahan.

Kedaulatan Rakyat, 25 Juli 1947

Apakah sebenarnya Belanda sekarang? mengambil tindakan lain yang tidak sesuai dengan jalan demokrasi?

Sangat kabar dari Amerika, Inggris, Australia, India, Negara2 Arab dan beberapa negeri Belanda sendiri tidak menyetujui sikap Belanda ini. Para negeri2 itu menganggap bahwa sebagai "tindakan politis" itu tidak dapat menjembatinkan maksud yang sebenarnya dari Den Haag.

Reaksi beberapa negara

Reaksi beberapa negara lain yang telah menyaksikan dan Linggadjati telah menawarkan diri untuk menjadi negara perantara adalah menyelesaikan soal Indonesia — Belanda ini. Amerika Serikat tidak berkeperatan atas pasal Inggris itu. Indrapoet setuju, kalau Inggris menjadi wasit. Akan tetapi, apakah jawaban Belanda?

Belanda menolak soal itu dan mengatakan, bahwa soal ini adalah persoalan dalam negeri semata2 yang tak usah ditjampoen oleh negara2 luar.

Negara2 Arab yang baroe sadja mengakui negara Republik Indonesia juga tidak setuju dengan tindakan Belanda itu. Oleh karena itu Azam Pasha sekretaris jenderal Arab League akan memasukkan soal Indonesia — Belanda ini dalam agenda bagian keamanan dari Perserikatan Bangsa2.

Belanda maoe mendahului negara2 Arab, lalu melampirkan sendiri kepada BNO dengan mengatakan bahwa Indonesia yang tidak dapat menstapi diadit.

Dari perlawanan Belanda ini terangnya bahwa Belanda akan menentang segala usaha negara2 asing yang ingin turut tjampoen tangan untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia — Belanda.

Akan tetapi dunia tidak akan dapat di hambat Belanda dalam penyelesaian soal Indonesia ini. Pemukiman kaum boeroeh di Australia yang telah di soal sekarang oleh pemukiman2 di negeri Belanda sendiri pasti akan di sambue juga oleh kaum boeroeh di negeri2 lainnya.

Orang Indonesia yang berada sekarang di luar negeri sudah moelai beresaha untuk menegerakan negara2 besar turut tjampoen tangan dalam peperangan kolonial yang ditimboelkan oleh Belanda.

Kedudukan politik dunia internasional dewasa ini memperlihatkan bahwa negara2 besar sedang berusaha untuk pengaruhi dunia yang mana yang sempat di pengaruhi. Peperangan kolonial ini akan jadi kesempatan bagi negara2 besar untuk mendapat pengaruh di Indonesia.

Dengan begini peperangan kolonial ini akan dapat di hentikan oleh negara2 besar, akan tetapi hal ini tidak akan mengontingkan Belanda. Bagi Indonesia benar rasanya untuk menerima ini. Yang akan tetapi dengan peperangan ini akan dapat di di hentikan oleh dunia alasan bahwa Indonesia sehingga propaganda Belanda di luar negeri dengan soal ini dengan soal ini bisa dioreksi dan Belanda di hentikan sebagai peressor.

Kedaulatan rakyat, 22 Agustus 1947

PERTAHANAN JOGJA.

DALAM pidatonya kemarin malam, Dr. van Mook tidak ada menjebeuk-jebeuk tentang niatan penyerbu ke Jogja.

Tidak ada Dr. van Mook menjangkal ataupun membenarkan berita yang telah tersiar tentang maksud menyerbu kemari untuk menghapuskan pusat kekuasaan Republik.

Tapi kalau kita perhatikan tuduhan2 yang dilemparkannya kepada alam Republik, bolehlah kita ramalkan, maksud meniadakan pusat kekuasaan Republik tidak bisa dikatakan tidak ada.

Hal itu memang konsekwensi peperangan yang sudah sediak semula kita pikirkan.

Golongan2 yang mungkin belum memikirkan hal ini, baiklah mulai sekarang diangan menutup perhatiannya terhadap kemungkinan ini.

Dalam pada itu perhatian perhatian kita diarahkan kepada pertahanan daerah yang masih kita kuasai, teristimewa pertahanan Jogja. Pertahanan dalam arti seluas-luasnya, baik mengenai angkatan perang, maupun mengenai perekonomian dan keamanan.

Berkenaan dengan angkatan perang, kita tidak hendak memajukan apa2. Gejala sesuatu kita serahkan dengan penuh kepercayaan kepada pimpinan tentara.

Kita yakin, kesatuan komando bagi segala bagian angkatan perang, serta badan2 klasifikasi pasti sudah dapat diwujudkan.

Berkenaan dengan perekonomian dan keamanan ingin kita memajukan beberapa hal. Perekonomian sangatlah rapat hubungannya dengan keamanan. Dan terutama bagi negara berperang, kedua hal itu sangat penting.

Rasanya Kementerian Kemakmuran dengan P.P.B.M., Badan Tekstil Negara dan bagian2 lainnya lagi bisa berdjasa besar dalam hal ini. Tentu saja dengan bantuan pula dari para mereka yang melakukan usahanya di lapangan perekonomian, baik bangsa Indonesia sendiri, maupun bangsa asing.

Hendaknya lapangan perekonomian diangan diagi sukar, adolah sebaik2nya kalau perekonomian bisa berdjalan dengan biasa dan dapat mendiami kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi bahan makanan, dan bagi rakyat murba, pakaian.

Kalau kebutuhan itu bisa ter-

jang sebarang dibatasi musuh, bahan makanan dan pakaian bertumbuh saja diangan. Sehingga bukan kita, melainkan musuh yang membaculkannya kepada rakyat atas nama tentara keradjaan!

Keaktifan pulisi negara dan pulisi tentara akan banyak pada pengarahannya.

Hendaknya tiap2 peraturan diangan nanja disertai anjuran keong saja, tapi sanksi-sanksi harus dijalankan pula untuk diagi contoh peraturan yang mana2 harus diurus.

Akan bahaya mata2 musuh, pasti banyak diangan kita ini manusia yang sangat mendayakan uang, sehingga mau menjual bangsa dan negara.

Itu menjeritkan, tapi kemari. Pada bangsa, maupun diangan ada manusia semacam itu.

Terhadap mereka harus diagi perhatian yang lebih banyak. Tidak boleh diangan hanya membawa busa mata, revolusi itu saja memaknakan manusia sematam itu, diangan maupun mereka memaknakan revolusi.

Kedaulatan Rakyat, 22 Agustus 1947

Pertahanan senjata berko-
mando yang satu. Diserta per-
ekonomian teratur yang men-
dukung kehidupan rakyat. Dan
dilandasi amati oleh pul-
sa yang berani memperluaskan
gigih. Semua itu bersandar-
kan sula atas tekad rakyat
Jogja hidup semati dengan
S. P. Kg. Sultan serta Bung
Karno, pasti akan merupakan
pertahanan yang tahan uji
lahir bathin.

TRIPTONING

Kedaulatan Rakyat, 28 Agustus 1947

Tentara Belanda terus menjerang.

6 Trucknja kita rusakkan.

Jogja, 29-8

SERANGAN Belanda tiada berhentinja dibawah ini kita urai-kan pelanggaran Belanda atas „cease-fire order“ jang di-ambil dari „Situasi militer No. 24.

DJAWA TIMUR.

Tanggal 20-8-1947.

Pasukan Belanda menjerang Kentjeng (Djember Selatan) Kekuatan Belanda 12 truck dan 1 tank.

Tanggal 24-8-1947.

Pasukan Belanda bergerak ke Pasrudjambe (Barat Luma-djang) Pasukan tsb menembaki Balung Sendura dan Ambulu (Barat Lumadjang).

Tanggal 26-8-1947.

Pada djam 06.00 1 compie pasu-kan Belanda menjerang Wagir (Barat-daja Malang). Pasukan tsb datang dari Wilangun dan Djambaan. Serangan tsb dipan-tu dengan tembakan mortier da-ri Kebonagung (Selatan Malang) dan tembakan howitser dari Malang. Penembakan mortier dan howitser 100 kali. Sebuah pesawat-terbang membantu pula serangan tsb dengan menda-tuhkan bom.

Korban kita: 5 orang gugur, banjak lang-luka2.

MADURA.

Tanggal 22-8-1947.

Pada djam 13.00 Belanda me-nembaki dengan mortier ke tu-rusan Bumbungan, kemudian 2 buah tank Belanda menudju ke Bumbungan, dan kemudian kembali lagi.

DJAWA TENGAH.

Tanggal 27-8-1947.

Pada djam 09.00 hingga djam 09.15 pasukan Belanda menem-baki Soboredjo (Utara Pingit). Pada djam 09.50 sebuah pesa-wat-terbang mengintai dijaja Pingit. Tembakan mortier 3 kali ditudjukan ke-Pingit, pada djam 13.10.

Pada djam 14.30 1 truck pasu-kan Belanda bergerak dari desa Ngatjir (Tenggara Demak, Timur Dempet). Pada djam 16.15 Be-landa mulai melepaskan tembakan ke arah desa Kramat dan Podjok (Utara Ngatjir). Pertem-puran sepiandjang dijalan Po-djok, Kramat dan Sana. Pada djam 21.15 pasukan Belanda mengundurkan diri.

DJAWA BARAT.

Tanggal 23-8-1947.

Pasukan Belanda dengan ke-kuatan 1 tank 4 tractor dan 16 truck bergerak dari Mangunre-djo (Selatan Singaparna, Barat Tasikmalaja) menudju ke-Ga-rut. Pada djam 12.00 pasukan Belanda tsb menjerang kita, sehingga terdjadi pertempuran di-Lengkop (Barat Singaparna). 6 truck dapat kita rusakkan.

Tanggal 25-8-947.

Pasukan Belanda jang berge-rak dari Mangunredjo ke diu-rusan Garut pada tg 23-8-47 mendatangkan balabantuan la-gi, berupa 20 truck dan 2 tank.

Pertempuran terdjadi di-Tjipe-retjilt. Di sini kita dapat meng-hanturka 2 truck.

Kedaulatan Rakyat, 13 September 1947

Disetiap front tentera dan rakyat berdjaga-djaga.

Malloboro ditengah-tengah pegunungan.
Aman kita, karena desa mereka.

DIDAFRAH aman kurang akaknya pemberitaan dari daerah pertempuran. Lantas orang menggambarkan sendiri bermalam-bal. Disambung-sambung sendiri. Ditambah dengan dugaan2 yang beraneka-warna. Akhirnya terdapat suatu kesimpulan yang tidak ber-alasan, ja ni, tentera kita tidak berdjaga lagi. Rakyat didaerah pertempuran telah mandah merterah.

Semua itu tidak betul. Tentera tetap berdjaga. Rakyat tetap bertahan. Ta' sudi dididat oleh kom-bali.

Memang tjara tentera berdjaga tidak seperti yang biasa orang sangkakan. Tentera kita tidak berhadap-hadapan dengan musuh setjara pasukan menghadapi pasukan. Tidak. Tidak demikian tjara ranja.

Tentera kita melakukan siyasat gerilja. Mempertahankan daerah diluar kota2 pendudukan.

Setiap musuh meninggalkan kota, masuk kedesa melakukan "pembersihan", mereka melanggar cease fire order. Itulah sebab tentera berama rakyat mendengar mengangguk, menghamburkan pasukan2 musuh. Dengan kecepatan kilat. Dengan segala matlamat senjata serta tenaga yang ada pada mereka.

Kesatuan tekad rakyat dan tentera.

Siasat gerilja berhasil bagus. Sebab syarat yang mutlak ada. Ja ni bantuan rakyat. Kesatuan tekad rakyat dan tentera.

Sebuah tipton. Disetiap desa datang sepasukan kecil musuh. Rakyat keluar meninggalkan desanya. Bergabung dengan sepasukan kecil tentera. Seperti biasa musuh menjerit ternak, ayam dan makanan.

Kain2 dibawanya pula. Pada saat mereka sibuk itu tong-tong dibunkikan. Rakyat berteriak-teriak. Ngalor, ngalor! Ngadul, ngidul! Musuh disepit. Kebingungan mereka. Berlari-larian. Tak kuan arah mudik annja. Diserap mereka oleh rakyat dan tentera. Pukul, pilu, golok, bedil. Segala matlamat senjata dipergunakan. Tenang kembali suasana didalam desa. Habis sudah musuh yang datang merampok. Berpuluh-puluh lagi tipton menundukkan semangat perdjangan tetap berjaga-maja. Tetap rakyat membantu tentera. Sampai2 tentara hampir2 tak perlu mengeluarkan ongkos makan. Rakyat selalu siap mendiami mereka. "Monggo bung makan sedanja".

Keuletan dan ketabahan.
Rakyat daerah aman tak dapat menggambarkan hidup tentera.

REBO PAHING 12-6-1947.

DASAR POLITIK BARU.

Oleh: Mr. DJODY.

BELANDA telah melemparkan persetudjuan Linggadjadi. Dengan demikian ia berbuat memojah - perdjandjian (contract-breuk). Maka dari itu Republik kita tidak terikat lagi kepada persetudjuan Linggadjadi. Meskipun Belanda ingin kembali kepada persetudjuan itu, akan tetapi contract-breuk sudah didjalankan. Sesuatu perbuatan yang sudah didjalankan tidak dapat diladakan lagi.

Bukan sadja Republik tidak terikat lagi kepada persetudjuan Linggadjadi, akan tetapi ia berhak menuntut segala kerugian sebagai akibat dari contract-breuk itu. Semua kerugian karena perang kolonial sekarang itu harus dipertanggung-djawabkan kepada Belanda.

Dengan tidak terikatnja lagi kepada persetudjuan Linggadjadi maka dengan sendirinja Pemerintah Republik meninggalkan politik Linggadjadi dan menggantinya dengan politik baru.

Dalam menyusun politik baru itu maka yang amat penting ialah mengetahui betul2 tentang syarat2 pokok untuk menentukan politik itu. Syarat2 yang kita maksudkan itu ialah:

Pertama: kesanggupan bangsa kita untuk bertempur.

Tentera kita masih in tact. Barisan dan lasikar kita masih siap-sedia. Rakjat kita masih tetap bersemangat mempertahankan negara. Salah pengetahuan tentang kesanggupan bertempur itu dapat merugikan perdjjuangan. Apalagi kalau kesanggupan itu malahan dibikin lemah.

Kedua: tjara mengatur siasat.

Meskipun kita tidak mempunjai sendjata modern yang lengkap seperti Belanda, akan tetapi kita dapat mengatur siasat yang tepat sehingga Belanda terpaksa mundur. Siasat bumi-hangus dan guerrilla, ditambah dengan bantuan rakyat yang tetap thaat kepada Pemerintah, bersama-sama dengan tentera merupakan pertahanan total, yang sulit dapat ditembus oleh musuh. Pertahanan total itu menundjukkan djuga persatuan tekad bulat dari seluruh bangsa Indonesia, persatuan mana mendjadi dasar dan sumber kekuatan perdjjuangan kita.

Ketiga: bantuan luar negeri.

Negara2 tetangga kita seperti Australia dan India sudah membantu kita dengan nyata2. Negara2 Islam sudah mengakui kedaulatan Republik kita. Sebagian besar dari pada anggota2 Dewan Keamanan UNO bersympathie kepada perdjjuangan kita.

Dengan pengetahuan tentang tiga syarat-pokok itu, kerangka politik baru disusun. Malah sudah supaya politik baru itu ditentukan dengan mengingat syarat2 itu. Djanganlah kita mengulangi kesalahan dari pada politik Linggadjadi. Terutama disini yang harus didjaga betul2 ialah adanya persatuan. Sebab persatuan itulah yang mendjadi sumber kekuatan perdjjuangan kita. Maka dari itu sebelum politik baru diumumkan, baik oleh Pemerintah, maupun oleh partai2 politik, hendaknja ditjari dengan djalan apapun djuga suatu persetudjuan yang bulat antara Pemerintah dan Rakjat.

Dengan djalan demikian maka terdjaminlah kemenangan kita melawan agresi Belanda, yang angkara murka itu.

Kedaulatan Rakyat, 19 September 1947

KESANGGUPAN RAKJAT.

Kerbaunja disedlakan.

Jogja. 16-9.

H. HASJIM dari Markas Ulama Angkatan Perang Sabil dalam laporan hasil penindjauannja di suatu tempat pertempuran di Dja-wa Tengah antara lain mene-rangkan, bahwa kerdja-sama me-laksanakan kesatuan komando dllnja antara T.N.I. dan Angka-tan Perang Sabil sangat memuas-kan.

Dikatakan djuga, bahwa pendu-duk sekitar daerah pertempuran banjak memberikan bantuan te-naga dllnja.

Antara lain sama meniatkan: ..Djika saudara2 dapat lebih ma-dju lagi, kerbau kita, kita sedia-kan untuk lauk pauk".

Kedaulatan Rakyat, 5 Oktober 1947

DARAH DAN AIR MATA DI KOTA BARU.

DUA hari lagi, kawan, 2 tahun genap sudah, darah pahlawan ~~membasahi bumi kota~~ ^{Baru} Jogjakarta, 2 tahun lampau runtuh-
lah bendera hinomaru ~~yang~~ ^{yang} kota Mataram. Pada waktu itu... ~~3 1/2 tahun~~ ^{3 1/2 tahun} mengotori angkasa
bahwa semangat lompat-meluap bersinggah, masih ingatlah orang
putra Indonesia. Putusan telah dijatuhkan, ditatap-tatap sanubari

Markas Djepang di Kota Baru hendak dijremukkan. Komando diberikan, setjara kaki beranting, dari bibir ke bibir. Semua siap bersatu tudjuan: Mematahkan kekuasaan tentera Djepang! Sendjata? T.s.t., Mat? Bukan apa?

Djam penyerbuan tiba..... Bagaikan semut menghampiri mangsanja, dikala itu ratusan, bahkan ribuan rakjat Jogja menudui Kota Baru. Tua, muda, ningrat, marhain, buruh, tani, pemuda, kusir dokar, tukang saté..... sampai pengemis pun turut serta. Mitral-jur Djepang, meréntét! Peluru mendesing. Mundur? Pantang! Lari? Ta' boleh diadi! Madju ke tji-taji!

Dikampung orang ta' mau ketinggalan. Kaum puteri memban-ting tulang. Tiap2 rumah merupakan dapur perjuangannya. Siapa berempur, welkom!

Nasi setiap waktu tersedia. Air tinggal minum.....

Dengar, dengar, apa itu? Sorak ramai, gegap gempita! Lihat! Sang Merah Putih naik, berkibar dengan riangnya diatas gedung Markas. Menang!!! Tetapi sesadji harus diberikan. Beberapa teruna gugur. Darah dan air mata menghiasi bumi Kota Baru, menjemarakan hari tg. 7-10-1945. Korban pertama. Kita ta' lupa nama pahlawan Achmad Sareh. Kitapun masih ingat djerih pajah diuru rawat Ertinah Hadje dengan kawan2nja.

Tiga hari lagi, kawan, orang memperingati saat kemenangan itu. Disamping keluarga korban pertama ini menerima tanda jasa dan hadiah sepatutnja. Kami pertjaja, panitya penjelenggara hari peringatan itu, hendak mengadakan upatjara setimpal dengan jasa rakjat yang telah berhatsil merebut Kota Baru. Kita gambarkan kembali peristiwa tg. 7 itu. Semangat tiap2 rumah merupakan dapur berjuangan" belum dan tidak padam, hanja orang mentjari dialannja untuk mewudjudkan ini kembali. Kita sedia-kan truck sebanjak-banjaknja, berkeliling kota dan kampung, berhenti dimuka tiap2 gang, untuk menerima sokongan dari tiap2 penduduk. Entah uang, embuh barang. Kita wudjudkan hari kebadjikan, hari pemberi sokongan totaal untuk perdjungan totaal. Kami pertjaja orang hendak berdujun ke djalan-raja membawa sumbangan menunggu datangnya truck kebadjikan.

Mari, kawan, kita tundiukkan, bahwa rakjat Mataram pernah menang dan tetap akan menang! Marilah kita tundiukkan, bahwa

Republik bukan ~~tersebut~~ Djepang, tetapi tumbuh dari darah dan air mata putra Indonesia.

Terwudjudlah hendaknja "Hari Kebadjikan" ini dikota Mataram, hari kebadjikan yang mengandung semangat mengganti impian belanda "naar Djokja" dengan "naar de maan"! Sokongan totaal untuk perdjungan totaal! Hidup rakjat Mataram!!!!

PAK KOTOT.

Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 1947

KOMISI-3-NEGARA KE INDONESIA.

Pertemuan pertama di Sydney.

Jogja, 9-10 (Antara).
KOMISI - 3 - NEGARA yang diwadjudkan berusaha menjele-
sakan peristiwa Indonesia-Belanda akan pergi ke Indonesia
dengan kesempatan pengangkutan yang pertama, demikian me-
nurut Dr. Lake Success diumumkan hari Rebo kemarin sesudah wa-
kil2 ketiga negara tsb. bersidang. Dalam sidang itu Amerika diwa-
kili oleh Frank P. Graham, Belgia oleh Paul van Zeeland dan
Australia, karena Kirby belum tiba di New York, diwakili oleh
menteri luar negeri Evatt.

Dikatakan, bahwa pertemuan
pertama yang formel akan dia-
adakan di Sydney dimana Kirby
akan bertemu dengan wakil
Amerika dan Belgia.

Dimana markas besar komisi
itu belum ditentukan. Kepuru-
san tentang ini akan diambil da-
lam pertemuan di Sydney keak.

Sementara itu hari Kamis ini,
menurut waktu di Indonesia
nanti malam atau besok pagi,
Dewan Keamanan akan mene-
ruskan debatnja mengenai usul
Gromyko. Dikabarkan bahwa ia
akan berbitjara ialah wakil
Amerika, Belgia, Belanda dan
Rusia.

★
Mengetahui berita pihak Repu-
blik, bahwa Sukarno, di daerah
Tasik, pada tg. 2-10 diduduki
Belanda, tetapi diduduki lagi
oleh pihak Republik pada tg.
4-10, dalam komentarnya warta-
wan UP, menyatakan, bahwa
tempat tsb. terletak jauh di
dalam daerah yang oleh van
Mook dikatakan dikuasainya.

Kalangan militer yang netral,
kata wartawan UP, memberi la-
poran, bahwa sesungguhnya dae-
rah yang luas (didalam daerah
yang menurut Belanda dikuasai-
nja itu) dikuasai oleh pihak In-
donesia.

★
Tentang berita kebakaran di-
pabrik gula Djatiroto (Diawa
Timur) baru2 ini, oleh Aneta
dikatakan, bahwa menurut kete-
rangan wakil2 dari "ekono-
mische zaken" yang baru kema-
rin duu berangkat dari Djati-
roto dan kemarin tiba di Sur-
abaya, pada pabrik tsb. tidak
terjadi suatu apa ketika me-
reka berangkat.

REBO PON 12-11-1947.

LINGGADJATI HIDUP ATAU MATI?

- OLEH: MR. SUNARJO

(I).

LINGGADJATI mendapat perhatian lagi.

Dan sesungguhnya tidak mengherankan kalau muntjul lagi perhatian itu dengan sekuatnija. Karena Linggadjadi dalam kedjadian2 dan perundingan2 dimana sadja jang mengenai pertikaian Indonesia-Belanda terbajang2 selalu sebagai suatu masalah, suatu probleem. Linggadjadi seolah2 sudah mendjadi teka-teki: Masih hidupkah Linggadjadi atau telah matikah ia?

Sebenarnja pertanjaan ini harus dikoreksi sedikit: Siapa jang boleh menganggap Linggadjadi sebagai hidup, dan siapa sebagai mati? Dan apa alasanja? Dan dari mana haknja untuk menganggap begini atau begitu? Dengan demikian, soalnja tidak tinggal sebagai suatu teka-teki, suatu mysterie.

Karena naskah Linggadjadi adalah suatu perdjandjian antara dua pemerintahan diatas nama masing masing negaranja. Dan seperti lain-lain perdjandjian-perdjandjian manusia maka hidup-matinja tergantung dari kemauan manusia sendiri dan anggapan manusia terhadap apa jang boleh dan apa jang tidak boleh.

Djadi soalnja memang benar2 suatu probleem juridis, jang djawabannja, karena mengenai perhubungan antara dua negara, harus ditjari dalam hukum internasional.

Artinja, djikalau seperti pendapat pihak Indonesia sendiri dan dimata dunia, naskah Linggadjadi itu adalah suatu perdjandjian internasional dan bukan suatu perdjandjian, jang tidak begitu banyak lebih tinggi deradjatnja daripada „politiek contract“ didalam lingkungan „Wet op de Indische Staatsregeling“, alias suatu perdjandjian „dilingkungan keradjaan Belanda sendiri“ sadja.

Sebagaimana kita ketahui, baik rakjat, maupun Pemerintah Republik Indonesia sendiri sekarang berpendirian: Kita harus lepas dan sudah lepas dari Linggadjadi. Karena memang sudah njata sekali, bahwa naskah itu, meskipun disana-sini sudah agak dapat memenuhi tjita2 kita, masih terlalu

ragu2 dan masih terlalu banyak memberi kesempatan kepada pihak Belanda untuk mendjerat leher kita. Kemungkinan ini dibesarkan lagi karena diperbolehkan kepada kedua belah pihak untuk menafsirkan naskah itu, menurut kesukaannja sendiri. Tafsiran2 ala Jonkman itu adalah akibatnja dengan segala konsekuensinja termasuk djuga „politieele aksi“ Belanda!

Jang terang tidak memuaskan ialah: a. Pengakuan terhadap (Pemerintah) Republik setjara de facto sadja, b. Pembentukan suatu negara Serikat Indonesia jang tidak pasti tentang sifatnja Indonesia — Ini kemudian dengan djalan memasukkan negara2 boneka N.I. T. dan Borneo sebagai pihak jang tak berharga, bahkan berbahaya bagi pembentukan itu, diikuti dengan pembentukan „pemerintahan peralihan“ jg berarti memasukkan anasir paksaan dari atas (Belanda) dalam usaha mendirikan negara Serikat itu. c. Pembentukan Unie Indonesia — Belanda jang sebenarnja hanya suatu bentuk baru sadja dari keradjaan Belanda, dengan suara terachir ditangan radja Belanda.....

KEMIS WAGE 13-11-1947.

LINGGADJATI HIDUP ATAU MATI?

— OLEH: MR. SUNARJO

II (Habis).

Tentu sadja semua ini mengge-
laskan rakjat kita jang merasa
dirinja sebagai terdjebak didalam
djeratan jang sengadja dipasang
oleh pihak Belanda dan ditarik-
nja dengan perlahan2 tapi dengan
pasti disekitar batang lehernja!

Memang sudah njata bahwa
maksud Belanda ialah merendah-
kan Republik sampai deradja N.
I.T. dan sekaligus memetjah2 da-
erahnja sampai bukan berupa lagi
Republik kita sekarang ini dan
tidak berdaja lagi sama sekali.

Tetapi anehnja: pihak Belanda
sendiri masih kurang puas dengan
itu! Karena menurut pandangan-
nja naskah Linggadjadi sendiri
masih memberi terlalu banyak pe-
ngangan bagi Republik untuk
memperdjatikan kedaulatannja
keluar. Bahaja ini harus dihapus-
kan sama sekali! Oleh karena itu
Belanda sendiri ingin lepas dari
naskah Linggadjadi.

Maka dengan menuduh Repu-
blik, bahwa ia melanggar Lingga-
djati dan perseudjuan pember-
hentian tembak-menembak dan
banyak „alasan“ lagi jang ditjam-
pur-adukkan sampai tidak karuan
sifat tuduhan itu, Belanda mulai
dengan „aksi politioneel“. Jang
djustru terang2an melanggar pasal
17 naskah Linggadjadi jang meng-
hendaki arbitrage, kalau ada per-
seksihan!

Dan sebenarnya siapa jang dari
mula2 melanggar Linggadjadi te-
rus-menerus? Kita tjukup peri-
ngatkan sadja pada pemisahan ta-
nah Papua dari Indonesia, tjara
pembentukan N.I.T., Borneo, usa-
ha membantu gerakan separatist-
sch dari Pasundan, Djawa Timur,
peristiwa Modjokerto, pendeknja
suatu daftar perbuatan jang tidak
ada hinggannja.

Tetapi maksud Belanda itu su-
dah njata, terbukti dari notulen
rapat kaum modal Belanda dengan
menteri2 di Surabaya itu, segala-
galanja memang sudah diatur le-
bih dulu: Republik harus dihant-
jurkan dan persetan dengan
Linggadjadi!

Tetapi kenapa sekarang, sampai
di Dewan Keamanan UNO jang
telah mulai tjampur tangan de-
ngan soal Indonesia ini, oleh Be-

landa dikemukakan, bahkan di-
pertahankan lagi Linggadjadi?

Pertjajalah siapa jang mau per-
tjaja, karena sebenarnya bukan
naskah Linggadjadi jang diperta-
hankan melainkan dasar2 (begin-
selen) Linggadjadi, yakni elemen-
ten jang dapat digunakan Belan-
da untuk menghantjurkan Repu-
blik dengan setjara sewenang-
wenang: Mendirikan „negara2“
ketjil2, „sesuai dengan kehendak
rakjat“ katanja, diantaranya ba-
rangkali „Republik“ jang akan di-
perketjilkan daerahnja. Kemudian
semua dikumpulkan dalam suatu
Indonesia Serikat jang „berdaulat“
dan terikat dalam suatu Unie, se-
mua dilingkungan „Rijkseenheid“
dibawah kekuasaan „grondwet van
het Koninkrijk der Nederlanden“.

Maksud melemparkan naskah
Linggadjadi sudah djatapkan dju-
ga oleh Beel, Van Mook, diperkuat
oleh perbuatan2 jang njata me-
langgar naskah.

Tinggal lagi „beginselen“ Ling-
gadjadi jang disukai, jang Belanda
ingin mendjalankan menurut ke-
hendaknja sendiri. Kita tahu, ba-
hwa Recomba djuga untuk mene-
gakkan beginselen Linggadjadi
begitu pula „aksi politioneel“ Be-
landa sendiri.

Kedaulatan Rakyat, 13 Nopember 1947

Dalam keadaan demikian bagi rakyat Indonesia tidak ada lain jalan dari pada: Lepas dari nasak dan „beginselen” Linggadjati, bagaimanapun juga!

Dan memang, hukum internasional lebih dari hukum biasa, memberi kesempatan untuk melepaskan diri dari suatu perdjian internasional dengan tidak usah menunggu perantara siapa pun juga (hakim umum) apabila pihak yang lain melanggar!

Terang sekali bahwa jalan yg halal inilah yang kita harus tempuh karena tak dapat disangkal, bahwa Belanda sudah melanggar! Berhubungan dengan negeri Belanda harus diatur setjara lain yg lebih dapat mendjamin kedaulatan Republik dan tak dapat ditafsirkan setjara sesukaaja Belanda sadja!

Linggadjati sudah mati, janganlah dihidupkan kembali!

Kedaulatan Rakyat, 1 Desember 1948

Kedaulatan, pusat pertikaian

Oleh: Mr. SUNARIO.

Soal yang menjadi perselisihan antara Republik dan Belanda ini berpusat pada soal kedaulatan, terutama dalam "zaman peralihan" tetapi juga sesudah terbentuk negara Indonesia Serikat. Karena Belanda mempertahankan mati2an kedaulatannya, sedang Republik pun ingin mempertahankan setjara mati2an pula kedaulatannya. Bahkan, Belanda ingin, supaya, meskipun Indonesia Serikat nanti "berdaulat", Uni Indonesia-Belanda masih merupakan suatu bentuk setjara recle Unie, yang mempunyai alat2 kenegaraan, biarpun tidak lengkap (kementerian Uni, Mahkamah Tinggi Uni dsb.).

Oleh karena itu dalam *Grondwet Belanda* yang baru dirubah Uni itu sudah ditentukan sifat2nya, seolah2 Uni nanti hanya suatu pembaharuan sadja dari *keradjaan Belanda* dgn. "rechts-orde baru", jadi seolah2 juga Uni itu pada hakekatnya dan pada dasarnya bukan hasil perundingan antara Republik dan Belanda. Maka dalam G.W. itu tidak diujatakan dengan tegas kedaulatan Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk, sedang Uni mungkin mendiaiankan perhubungan dengan luar negeri (luar Uni).

Dengan mendahului segala sesuatu itu seolah2 perundingan ini dimasukkan dalam ruangan G.W. Belanda serta kemungkinan dan pembatasan2 yang diberikan olehnya. Dengan ini soal kedaulatan NIS dengan sendirinya tidak terdjamin, dan Uni yang sebenarnya tak berdaulat, loh berdaulat. Nasib Republik pada kedaulatan NIS dan Uni itu di-

bentuk, sudah merupakan "negara-bagian" sadja dalam NIS. Artinya dengan demikian kita akan mendapat suatu Indonesia merdeka dan berdaulat (pada 1 Januari 1949) tidak akan tertjapa!

Kalau ditinjau dalam sikap Belanda itu nampaklah, bahwa mereka kurang *ichlas sekali* menyesuaikan perbuatannya dengan apa yg selalu sekarang ini didegung2kan olehnya: "*Periode Kolonial telah lenjap*".

Belanda masih sadja rindu akan "*historische rechten*" disini ini, setjara bewust atau onbewust, dan karena itu begitu sukar melepaskan kedaulatannya dalam arti yang terlalu mutlak dan kolot, sedang mereka hanya ingin memberikan kepada kita kedaulatan yang *relatief* dan *samar-samar semata-mata*.

Dalam mempertahankan kedaulatannya de jure sebagaimana diakui di San Francisco dan Potsdam, tetapi juga kedaulatan yang diakui oleh Republik sebagai azas dalam pas. 1 tambahan naskah Renville, maka selalu terbayang2 difikiran pihak Belanda suatu "*Suprema potestas*" atau "*summa potestas*", suatu kekuasaan penuh dan tertinggi dari suatu negara, sebagaimana arti *mula-mula* (asal) dari *souvereiniteit* itu.

Kedaulatan Rakyat, 13 Desember 1948

K T N. mengadu ke D.K.

Jogja, 13-12, Dalam nota yang disampaikan delegasi Belanda kepada KTN dibentangkan pendirian Pemerintah Belanda mengenai penyelesaian pertikaian Indonesia - Belanda. Dijatakan, bahwa perundingan baik informeel, maupun formeel dengan Republik Indonesia dibawah pengawasan KTN dianggap tidak perlu lagi, selama Republik belum mengubah sikapnya dengan cara radikal dalam penjalanan, gentjatan sendjata.

Pendirian Belanda itu diumumkan dalam sebuah komunike hari Sabtu malam di Den Haag dan di "Batavia".

Komunike tsb. menyatakan, bahwa selesannya akan dibentuk suatu Pemerintahan Interim tidak dengan Republik Indonesia, tapi Belanda tetap membuka kesempatan bagi Republik masuk dalam pemerintahan itu.

Kepada Pemerintahan Interim yang akan dibentuk itu Belanda akan memberikan kekuasaan besar. Matjam Pemerintahan Indonesia selama masa peralihan yang telah disetujui wakil2 Indonesia non-Republik, selesannya harus diproklamirkan.

Sebab sekarang sudah nyata -- demikian komunike itu -- bahwa Republik Indonesia tidak menyetujui persetujuan gentjatan sendjata dan tidak menerima dasar2 Renville, maka Belanda tidak ingin menunda2 atau menghalang2i pelaksanaan orde baru di Indonesia dengan perundingan2.

Perundingan mengenai soal2 politik antara P.M. Hatta dan delegasi menteri Belanda menunjukkan, bahwa ada perselisihan prinsip yang besar antara kedua belah pihak, katanya.

Dikatakan, bahwa dalam pembicaraan dengan Menteri I. N. Belanda Stikker, P. M. Hatta membenarkan, bahwa Pemerintah Belanda akan meneruskan tanggung-djawabnya selama masa peralihan. Hal ini selaras dengan kedaulatan Belanda -- menurut komunike tsb. telah diakui Republik.

Selanjutnya komunike itu menyatakan, P.M. Hatta mengakui pula, bahwa wakil Tinggi Mahkota Belanda akan mempunyai kekuasaan untuk menghadapi keadaan genting, bila ini terjadi.

Bagi delegasi menteri Belanda kemudian ternyata, bahwa pihak Republik Indonesia mundur dari pada pendirian tsb.

Dikatakan komunike itu, pihak Republik telah menyatakan, bahwa pengakuan akan kedaulatan Belanda dalam masa peralihan itu hanya bersifat formeel. Menu-

Kedaulatan Rakyat, 13 Desember 1948

rut Pemerintah Belanda ini berarti, bahwa kekuasaan wakil Tinggi Mahkota Belanda — terutama kekuasaannya mengenai tentara — hanya diakui dalam teori. Lain dari pada itu pasukan2 Belanda lambat laun harus ditarik dari daerah2 yang didudukinya sekarang, sedang pasukan2 Republik tetap ada dan kedudukannya baru ditetapkan kemudian hari. Dengan begitu akan ada 2 tentara dibawah 2 komando yg. berlainan, kata komunike itu.

Aneta mengabarkan, bahwa KTN telah mengirimkan dengan pos udara istimewa laporan perundingan PM, Hatta dan delegasi menteri Belanda kepada Dewan Keamanan di Paris, disertai nota Belanda itu,

Sebagai reaksi terhadap pendirian Belanda dalam soal penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda diwartakan oleh Aneta, bahwa kalangan internasional pada umumnya menaruh perhatian yang sangat besar, dan diharapkan, supaya soal Indonesia dikemukakan lagi kepada Dewan Keamanan.

Pun Kementerian L.N. Amerika Serikat mempeladjar dengan sungguh2 isi nota Belanda itu, karena belum djelas benar apa yang menjadi konsekwensinya.

Kedaulatan Rakyat, 27 Desember 1949

ATJARA PENJERAHAN KE- DAULATAN

Pada tgl. 27/12 '49.

Di Djakarta : Pk. 16.00 Upa-
tjara penjerahan kekuasaan oleh
WTM kepada Delegasi RIS.

Di Amsterdam : Pk. 16.00 Upa-
tjara penjerahan Kedaulatan oleh
Ratu Belanda kpd. delegasi RIS.

Di Jogja : Selesai mendengar
upatjara penjerahan yang disiarkan
radio Djakarta dan Amster-
dam, dimulai sidang istimewa Ba-
dan Pekerdja KNP dengan atja-
ra sbb.:

a. Penjumpahan wk. ketua
KNP.

b. Pernyataan bahwa Presiden
dan Wk. Presiden R.I. akan ter-
halang menjalankan djabatan
masing2.

c. Penjumpahan Pemangku
Djabatan Presiden.

d. Permintaan persetudjuan
untuk menjerahkan bendera pu-
saka kepada RIS.

Kemudian Presiden RIS mene-
rima bendera pusaka, yang dise-
rahkan kepada ketua Delegasi
RIS. Dengan penjerahan bendera
pusaka ini selesai upatjara penje-
rahan kedaulatan.

Kedaulatan Rakyat, 27 Desember 1949

Belum berhenti.

Hari ini kedaulatan Nederland atas Nederlands-Indie diserahkan kepada RIS. Demikian juga kedaulatan Republik Indonesia diserahkan pula. Dgn dua penyerahan kedaulatan itu berdiri Republik Indonesia Serikat. Nederland kehilangan djadjahannya di Pacific selain Irian jg masih jadi persoalan, sedang Republik Indonesia kehilangan kedaulatannya, jang sedjak saat penyerahannya kepada RIS tuak lagi milik Republik Indonesia sendiri, melainkan jadi milik seluruh Indonesia minus Irian.

Sambutan orang didaerah pendudukan dan didaerah bukan pendudukan sungguh berlainan sekali.

Didaerah pendudukan kegembiraan tampak dimana2. Bendera kebangsaan dikibarkan orang. Kegembiraan memuatjak kalau pasukan TNI masuk kota mengoper kekuasaan dari tangan tentara Belanda. Penduduk merasa lega, bebas, merdeka kembali.

Kita tahu, kadang2 penduduk tidak sabar menunggu kedatangan TNI seperti di Tjirebon misalnya, dimana para pegawai mogok, mendesak agar TNI secepat mungkin masuk kota menegakkan keamanan mereka.

RIS belum berarti kemerdekaan jg penuh untuk seluruh tanah air. Pasti tidak seimbang dgn tjita2 kita, kalau perjuangannya kita berhenti dgn RIS. Kalau RIS kita djadikan titik terakhir bagi perjuangan kemerdekaan kebangsaan.

Kita di Jogjakarta, ibu kota Republik Indonesia jang diproklamirkan pada 17 Agustus '45 dan dipertahankan dgn darah dan djiwa, sebenarnya tidak merasakan perubahan suasana seperti jg dialami oleh saudara2 kita didaerah pendudukan. Kepada suasana kemerdekaan kita sudah biasa. Bahkan dgn berdirinya RIS kita seakan2 kehilangan kedaulatan jang telah kita pertahankan bertahun2 lamanya.

Kita bertanja2 dalam hati, un-

berdirinya RIS kita seakan2 kehilangan kedaulatan jang telah kita pertahankan bertahun2 lamanya.

Kita bertanja2 dalam hati, untuk apa berjuang selama itu? Untuk mempertahankan kedaulatan negara sebagai djalan mutlak untuk mentjapai kemakmuran rakyat.

Tetapi sekarang kedaulatan kita lepaskan kepada RIS jang didalamnya belum termasuk sebagian tanah air kita, ialah Irian.

Seimbangkah RIS sonder Irian itu dengan segala pengorbanan, dgn darah jg sudah ditumpahkan dan air mata jang sudah ditjuturkan?

Tentu tidak. Maksud kita ialah kedaulatan penuh! Bukan jang dikutungkan!

Kedaulatan Rakyat, 27 Desember 1949

Tetapi bukan maksud kita semua akan berhenti berdjuaang dgn terbentuknja RIS. Bukan kita sadja didaerah Rep. Indonesia sonder tentara pendudukan Belanda, melainkan djuga didaerah diluarnja, jang ada didaerah pendudukan Bld. Sebab djuga disana penduduk me nganggap berdirinja RIS, keberangkatan Bung Karno ke Djakarta dgn membawa bendera pasuka, sebagai satu tingkat sadja dia perdjuaangan kemerdekaan kebangsaan. Mereka ingin kembali kpi Republik Indonesia, jg mereka jintai dan rindukan.

Kalen kita ingat itu, sungguh tidak usah kita berketjil hati. Kita akan berdjuaang terus dgn Republik Indonesia sebagai modal dan RIS sebagai alat perdjuaangan, bukan sebagai tujuan. Kita belum berhenti.

W.H.

REBO 28 DESEMBER '49.

Peresmian Penjerahan Kedaulatan di Amsterdam-Djakarta-Jogja Perdjoangan djalan terus

Kemarin pagi djam 10 waktu dinegeri Belanda atau lk. djam 5 sore waktu di Indonesia telah dilangsungkan upatjara penjerahan kedaulatan atas RIS di-istana Amsterdam dinegeri Belanda, dihadiri oleh anggga2 kabinet Belanda, anggga2 Eerste dan Tweede Kamer, pembesar2 Belanda dan para tamu dari luar negeri.

Raja Belanda Radja Juliana masuk dalam ruang upatjara Drs. Moh. Hatta selaku ketua delegasi Republik Indonesia Serikat yang bermandaat penuh untuk menerima penjerahan kedaulatan dari tangan Radja Belanda, telah menanda tangani suatu protocol yang berisi penjerahan tersebut termasuk pengakuan suatu rechtsorde yang termaktub dalam grondwet Belanda fatsal 211.

Setelah radja Juliana masuk ruang dan duduk ditengah medja yang panjangnja 7 m, protocol itu dibatjakan oleh Perdana Menteri Drees dimuka Juliana. Kemudian Juliana baru menanda tangani protocol, dengan diketahui oleh Drees dan Maarseveen. Dengan demikian upatjara penjerahan kedaulatan kepada RIS dan pengakuan perdjandjian uni Indonesia — Belanda telah selesai. Protocol ini berarti djuga suatu „geboorte acte” bagi RIS dan Uni Indonesia Belanda.

Dalam kata sambutanja Hatta mengatakan, bahwa ia sangat mengharap-kan spj. perdjandjian uni nanti dapat langsung dengan kekal antara 2 negara yang sama2 merdeka, sama2 berdaulat penuh.

Dalam pidatonja Juliana menyatakan, bahwa penjerahan kedaulatan ini adalah suatu kedjadian yang penting, karena mulai hari ini akan berachirlah segala rasa permusuhan, tindakan2 yang berlawanan, dan segala luka dendam yang ada dikedua belah pihak.

Ini adalah suatu hasil daripada 2 negara Indonesia dan Belanda yang mementingkan demokrasi dan menimbulkan kerdja sama antara barat dan timur, pula hasrat yang tebal untuk memberi sumbangan kepada perdamaian.

Sebelum saat ini rakjat Belanda adalah sangat chawatir terhadap persetudjuan ini, akan tetapi sesudah hari ini rakjat Belanda setuju akan azas persetudjuan penjerahan, dan akan turut berkerdja dalam pembangunan negara baru djika nanti sekiranya diminta hentuannya oleh pemerintah Indonesia.

Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 1949

 Sesudah penjerahan kedaulatan dinegeri Belanda, maka kemarin dilakukan peresmian penjerahan di Djakarta yang diterimakan oleh A.H.J. Lovink kepada Sultan Hamengkubuwono sebagai ketua daripada delegasi RIS yang bertugas menerima kedaulatan di Indonesia.

Dalam upatjara di Djakarta ini yang terpenting ialah penurunan bendera Belanda dan penaikan bendera Merah Putih di muka istana Gambir Djakarta.

Tepat pada jam 17.52 sore bendera Belanda diturunkan dengan diiringi musik "Wilhelmus", sedang jam 17.56 bendera pusaka Merah Putih dinaikkan dengan diperdengarkan lagu Indonesia Raya.

 Sekretariat PBB mengumumkan, bahwa radio Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiarkan keseluruhan upacara dengan gelombang pendek memuat program istimewa dari Djakarta dan

rangnja, jika dibandingkan dengan upatjara2 lain.

Sesudah mendengarkan siaran upatjara dari Amsterdam dan Djakarta upatjara dibuka dengan sidang BP Knip untuk membitjarakan beberapa hal: 1. tidak dapatnja Presiden dan Wk. Presiden mendjalankan djabatannja masing2. 2. perletakandjabatan oleh PM Hatta dan 3. penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada RIS.

Kemudian dilakukan penjumpahan oleh Presiden Sukarno atas dari sdr. Prawoto Mangkusasmito yang telah dipilih untuk mewakili Ketua Knip disusul dengan penjumpahan Mr. Asaat sebagai pemangku djabatan Presiden RI.

Selanjutnja pemangku djabatan Presiden RI menjatakan tidak keberatan menerima perletakkan PM Hatta dengan pengharapan, supaya para menteri sebelum terbentuk Kabinet RI yang baru terus melandjutkan pekerdjaannja.

Upatjara dilandjutkan dengan sidang BP Knip istimewa untuk menentukan diterima atau tidaknja resolusi penjerahan bendera "Pusaka". Dengan suara 18 pro dan 4 contra (Wardoyo, Kubarsi, Rasuna Said, Marjono Nitimiharjo) resolusi diterima.

Sesudah upatjara penjerahan bendera, Presiden Sukarno dengan tegas berujandji, pada tanggal 17 Agustus akan mengibarkan bendera pusaka yang telah menjadi lambang hasrat rakyat menjapai kemerdekaan itu.

Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 1949

Kentongan

Kalau dimasa pendudukan Belanda kentongan berbunyi; dari gunung melintasi tanah ngarai disambut didesa dan kampung sekitar kota, itu tanda gerilja sedang beraksi. Sedang melakukan perjuangan dengan sendjata untuk membe-la kemerdekaan.

Kentongan pukul 6 sore kemarin lain arti dan sifatnja. Kemarin kentongan menjambut dengung sirene jang dibunjikan untuk menjatakan selesainja upatjara penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada J.M. Menteri Penerangan RIS Arnold Mononutu. Sedjak saat itu berachirlah kedaulatan Republik Indonesia, diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, djadi milik seluruh bangsa Indonesia, baik jang didalam, baik jang di luar Republik Indonesia.

Republik Indonesia mulai saat itu djadi negara bagian RIS jang sama tinggi-rendahnja dengan negara bagian lainnja. Segala attributen kedaulatan seperti perhubungan luar negeri, ketenteraan dsb. djadi milik bersama seluruh bangsa.

Memang tudjuan kita semua ialah kemerdekaan utk seluruh bangsa dan tanah air. Tidak sadja untuk rakjat Djawa-Sumatera, ataupun untuk rakjat Jogjakarta sadja, melainkan untuk rakjat seluruh kepulauan kita dari tanah Atjeh hingga Irian.

Maka dengan berdirinja RIS dan terleburnja negara Republik Indonesia kedalamnja, para pemimpin kita dibebani tang-

gung-djawab jang mahabesar, jaitu membuktikan dengan perbuatan, bahwa terleburnja Negara Republik Indonesia kedalam RIS itu tidak menjia-njiakan attributen kemerdekaan jang telah sekian lamanja diperjuangkan dan dipertahankan.

Kita mengharapkan, kita menuntut, agar segala apa jang telah ditjapai oleh Negara Republik Indonesia itu benar2 dipergunakan sebaik-baiknya dan dikembangkan hingga sempurna seperti jang dimimpikan oleh setiap anak Indonesia.

Negeri kita, Indonesia jang kaja-raja serta letaknja sangat strategis ini, terlalu amat menarik perhatian orang asing.

„Negeri tuan banjak gula-nja”? Kata seorang menteri Pakistan kpd kita dilapang terbang Le Bourget, Paris beberapa minggu jl. „Itu sebabnja Bld tjinta akan Indonesia!”

Baiklah kita djaga sebaik-baiknya segala kekajaan itu dan djangan negeri asing berkuasa lagi disini, agar kemerdekaan selamat. Kalau itu tidak terdjamin, kentongan pasti akan berbunyi lagi bersahut-sahutan, dari pegunungan hingga ketanah ngarai dan kota.

W. H.

Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 1949

PENGUMUMAN

Dipermaklumkan kepada seluruh penduduk kota Jogjakarta bahwa mulai tanggal 1 Desember 1948 susunan kepolisian kota Jogjakarta akan diubah dan disusun sebagai berikut:

1. Lingkungan daerah Haminte Jogjakarta dibagi menjadi 2 seksi, yaitu seksi I (seksi Barat) dan seksi II (seksi Timur).
2. Batas yang memisahkan lingkungan 2 seksi tersebut ialah mulai dari Utara ke Selatan: Djalan Djetis, Tugu, Malioboro, Margo Muljo, Alun2, Judonegaran, Gondomanan, Kintelan, Danunegaran terus ke Selatan sampai batas kota.
3. Sambil menunggu gedung2 yang akan diberikan oleh D.P.D dan K.M.K. untuk sementara waktu kantor seksi I berada di asrama polisi Patuk dan kantor seksi II berada di kantor polisi Lalu-lintas di Setjodiningratan. (kantor polisi Lalu-lintas pindah ke kantor Kepolisian Daerah Istimewa Rek-sobajan No. 1 Jogjakarta).

Diharap seluruh penduduk kota Jogjakarta maklum tentang adanya perubahan ini. Pelaporan2 tentang kejadian2 dalam lingkungan masing2 seksi diharap diberitahukan pada kantor2 seksi tersebut diatas. Kepada Djawatan2, Badan2 dan lain2 instansi Pemerintah diharap tentang segala sesuatu yang mengenai kota Jogjakarta berhubungan langsung dengan masing2 kepala seksi yang bersangkutan.

Kepala Kepolisian Daerah Istimewa
Jogjakarta

DJEN MOH. SOERJOPRANOTO.

18-12

UNDANGAN

Segenap anggota PERSAPAP Tiabang Jogjakarta diminta kedatangannya dalam rapat anggota jad:

1. Waktu : Minggu tg. 5-12-1948 jam 9 pagi
2. Tempat : Kantor Tugu 99.
3. Atjara : Status PERSAPAP.

Pengurus PERSAPAP.

21-12

DITJARI DENGAN SEGERA:

a. 1 (satu) orang Kepala Tatausaha (amanuensis) lebih disukai yang sudah berpengalaman, beridjazah S M-P

b. 1 (satu) orang djuridik yang tjakap Gadjil menurut peraturan Pemerintah. Semua pengalaman akan turut dihitungkan untuk menentukan gadjil pokok. Pelamar harap datang di:

SMA BOKRI Gemblakan 42, Dk. 10-12

Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 1949

Lt. Md. SACHRONI
ops dalam pertempuran
da tg. 24-11-1948 dj. 16.00.
angan bagi arwahnja di
a tjita:

Keluarga:
Lt. Md. Sachroni.
IPPI tjb. Magelang.

D I A :
NG KERDJA 1948.
guna sekali buat: Djawa-
h.
(termasuk ongkos kirim)

ang dimuka.
g. Penerbitan
ta. 311 (11)

NG A N.
n blok 42 Solo. anaknia
(n). Setelah diobati 3 kali
Solo. lalu sembuh.
Lawitan Solo sakit gatal2
kali lalu sembuh.
Solo. anaknia umur 2 dan
at obat 1 kali lalu sembuh.
301. (11)

TERBIT:
No. 27 TAHUN 1948.
PERWAKILAN RAKJAT
UTA - ANGGAUTANJA.
END JELASANNJA.
ara. Partai - Partai dan
No. 2. Jogjakarta.
22- (12)

Pada hari Selasa malam
telah wafat dengan tenang
setelah menderita sakit be-
berapa hari dirumah sakit
Panti-Rapih:

G.B.R.A. DJOJOWINOTO

Pemakaman pada hari Ke-
mis tg. 2-12-'48 di Imogiri.
Berangkat dari Judonega-
ran djam 10 pagi.

Jang berduka tjita:
Segenap keluarga.

-23-(12)

Pembeli / pemesan sekaligus:
S A R I N A H
dan

KEPADA BANGSAKU
diberi hadiah sedjilid:
3 x 17 AGUSTUS !

semuanya tetesan pena
Ir. Soekarno. Harga ditam-
bah ongkos kirim: R 480.—
O. P. GOENTOER.
Gambir 10. Jogja.

290-(11)

TIDAK PUAS —
— UANG KEMBALI !

KALENDER Bulanan 1949.
Pakai 3 tanggalan, hari be-
sar, pasaran, mangsa, wu-
ku, tjapdjiesio: Uk. besar
R 50.—. Uk. 27 X 21 cm
R 40.—.

BUKU BARU: Olah raga
Bulu tangkis bergambar
R 150.—. Resia Nasib dan
Batin pakai 45 gambar
R 150.—. Wasiat penera-
ngan Batin R 100.—. Asma-
ragama bergambar R 60.—.
Beli pada:

Toko Buku
TAN HOO LIANG

Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 1946

BERITA TENTARA No 27.

D JOEROEBITJARA Tentara
tg. 4-10-46 djam 11.00 me-
ngoemoemkan:

DJAWA BARAT: Tg. 23-9-1946
kedoedoekan moesoeh tetap di
Gekbrong dan Tjlmangkck.

Tg. 24-9-1946 Tjibodas diserang
Nica. Pasoeakan terdiri dari kira2 95
Blanda totok dan Nica-Inlander,
disapoe bersih dengan tembakan
mitrallieur pihak Indonesia.

Tg. 26-9-1946 Djam 11.00 terdja-
di pertempoeran ketjil2an dengan
moesoeh jang terdiri dari 100
orang di Soekalarang. Djam 12.00
moesoeh mengoendoerkan diri
sampai Gekbrong.

Tg. 27-9-1946. Pertempoeran se-
ngit di Tjikaretek-Tjlmande. Ke-
koeatan moesoeh kl. 300 orang.
Pertempoeran 6 djam di lamanja.
Moesoeh banjak korban. Maroko
ditembaki dengan mortier moesoeh
dari Batoedjar dan Tjibadon.
Tjileungsi djoega ditembaki de-
ngan mortier.

Tg. 28-9-1946. Seboeah kapal pe-
rang Belanda menembaki Merak.
Petang harinja kapal tsb. pergi.

Di Tjiwedaji tendengar letoesan.
Djam 11.00 moesoeh bergerak sam-
pai Tjiwedaji. Menoeroet berita
dari Penjellik, moesoeh mendi-
namit Tjadas.

Tg. 29-9-1946. Tjhamiroeng,
Maroko dan Selokopi ditembaki
dengan mortier oleh moesoeh.
Sembilan orang patroli menjebe-
rang Toreskotok jang disamboet
oleh pihak Indonesia.

Tg. 2-10-1946. Moekai djam 12.00
sampai djam 15.00 moesoeh teroes
meneroes menembaki Tjileungsi
dan Tjibiroe dengan meriam dan
mortier. Djam 13.00 Tjibiroe di-
serangan dengan 5 boeah tank dan
10 truck.

DJAWA-TENGAH, Tg. 30-9-46.

Sektor Sedajoe dengan tiba2 di-
serang oleh 1 kompi moesoeh. Sa-
toe djam lamanja pertempoeran
terdjadi. Hasil: moesoeh di poekoel
moendoer, dengan meninggalkan
20 orang mati atau luka2, dian-
taranja 1 kepala sectie.

Di sektor Timoer 1 kompi moe-
soeh mendekati pertahanan pihak
Indonesia. Pihak Indonesia moen-
doer kl. 100 meter. Laloe diban-
toe oleh pasoeakan mitrallieur be-
ral. Tembakan tepat mengenai
moesoeh dengan hasil 20 orang
luka2 dan mati, majat dan jang
luka diangkoet waktue mereka
moendoer.

Tg. 2-10-1946. Sampai djam 10.55
disektor Timoer terdjadi pertem-
poeran dengan moesoeh jg meng-
goenakan tank. Pertahanan pihak
Indonesia tetap.

DJAWA-TIMOER. Tg. 27-9-46.

Moesoeh terdiri dari 4 seksie
(mata2), bersendjata 14 tomygun,
11 mitrallieur berat bergerak men-
dekati pertahanan pihak Indone-
sia. Moesoeh diserang. Moesoeh
mengoendoerkan diri, dikejar oleh
pihak Indonesia. Kedatangan di-
masoeki dan dibakar oleh pihak
Indonesia.

Kedaulatan Rakyat, 1 Juli 1947

